

**PULIHKAN
EKONOMI BARU
DARI BALI PASCA
PANDEMI**

**TERBIT SUDAH
REGULASI
KEWENANGAN
DI LAUT**

**SERTIFIKAT HALAL,
LOGO BARU
BIAYA TURUN**

**LANGKAH PUAN
SEJAUH INI TANPA
HAMBATAN**

**TANAH DAN AIR
BERSATU DI IBU KOTA
NUSANTARA**

**MOTOGP MERIAHKAN
WISATA LOMBOK**

PERIODE ATAU TUNDA PEMILU

**JENDERAL DUDUNG
KAGUM GAYA
KEPEMIMPINAN
HERMAN DERU**



Rp75.000,-



info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

KUASA

Memasuki Maret 2022, kita langsung berhadapan dengan persoalan kekuasaan dan kewenangan atau otoritas. Di dalam negeri, muncul gagasan penundaan Pemilihan Umum. Sedangkan sebagai bagian dari masyarakat global, kita ikut terdampak oleh krisis Rusia-Ukraina.

Dua perkembangan di dalam negeri maupun pelataran global itu melibatkan bagaimana kekuasaan dan kewenangan memiliki perbedaan yang nyata. Kekuasaan memiliki sifat memaksa untuk patuh. Sedangkan kewenangan memiliki kelebihan berupa penerimaan pihak lain untuk mematuhi. Penerimaan itu, dalam ranah politik, kita kenal sebagai legitimasi atau pengesahan. Dari sini boleh jadi muncul istilah kekuasaan yang sah, bukan berdasarkan paksaan.

Kita simak dulu perkembangan krisis Rusia-Ukraina dari sudut kekuasaan dan kewenangan. Penggunaan kekuatan militer tentu saja merupakan cerminan kekuasaan, bukan otoritas. Namun, dengan melihat keinginan Ukraina menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization, NATO), ada aspek kepentingan yang berbeda antara Rusia dan Ukraina yang pernah bergabung dalam Uni Soviet..

Jika Ukraina menjadi anggota NATO, negeri itu akan mengganggu kepentingan Rusia, setidaknya menimbulkan persepsi ancaman. Dengan menjadi anggota NATO, terbuka kemungkinan pengembangan fasilitas militer berdasarkan otoritas pakta pertahanan itu di halaman depan Rusia. Dari sisi ini kita dapat memahami mengapa Rusia mau mengarahkan kekuatan militernya untuk unjuk kekuasaan.

Namun, kekuasaan tanpa legitimasi memang akan memunculkan perlawanan. Sebagaimana perkembangan yang terjadi dalam krisis Rusia-Ukraina sejak invasi pada Kamis, 24 Februari 2022 itu.

Dukungan moral maupun material kita lihat mengalir untuk Ukraina dari berbagai negara. Namun, belum ada yang dapat memastikan kapan dan bagaimana krisis itu akan berakhir. Dua kemungkinan yang sudah disebut-sebut, kekuasaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy akan tumbang atau justru Presiden Rusia Vladimir Putin yang kehilangan kekuasaan karena dikhianati oleh pendukungnya yang merasa dirugikan oleh berbagai sanksi terhadap Rusia oleh negara Barat. Toh ada kemungkinan lain, kedua negara memilih diplomasi dan mencapai perdamaian. Kita lihat saja.

Nah, di dalam negeri, wacana penundaan pemilu yang berarti juga perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga akan terkait dengan perbedaan antara kekuasaan dan otoritas. Penggunaan kekuasaan tanpa penerimaan yang berarti pemaksaan cenderung akan memicu perlawanan. Kekuasaan yang semula mendapat pengakuan sah dan melekat dengan kewenangan, karena itu, akan kehilangan legitimasi.

Bagaimana perkembangan lanjutan antara kekuasaan dan kewenangan terkait perkembangan di dalam negeri dan tataran global pada Maret 2022 ini? Siapapun akan sulit menjadi peramal. ●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @1nfoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id



DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
MARET
2022



6 INFO UTAMA

Wacana penundaan Pemilu muncul menyusul gagasan Presiden dapat menjabat hingga tiga periode. Keduanya sama-sama memerlukan perubahan atau amendemen konstitusi.



20 INFO SUMSEL

Peningkatan produksi dan kesejahteraan di sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ini melibatkan semua pihak mulai dari petani hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.



30 INFO KUTAI TIMUR

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Klaimantan Timur, berencana mencetak lahan sawah seluas 4.000 hektare di beberapa kecamatan potensial. Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan beras yang mencapai 39 ribu ton per tahun. Saat ini, luas lahan sawah di Kutai Timur yang sudah ada seluas 2.500 hektare.

86 INFO SELEBRITI

Dua anak muda berjuduk Crazy Rich, orang kaya yang boros dan suka pamer, kini menjadi tahanan kepolisian. Keduanya Indra Kesuma alias Indra Kenz yang dikenal Crazy Rich Medan, Sumatera Utara dan Doni Salmanan Crazy Rich Bandung, Jawa Barat.





52 INFO INOVASI

Masih ada provinsi, kabupaten, dan kota yang kurang inovatif, bahkan sulit diukur inovasinya. Kementerian Dalam Negeri berupaya membina daerah yang masuk kategori ini.



56 INFO EKONOMI

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membuat harga minyak mentah dunia mengalami pelonjakan dan mempengaruhi harga jual bahan bakar di Indonesia. Namun, meski terjadi kenaikan harga minyak, PT Pertamina menyatakan tetap mempertahankan BBM jenis Pertalite.



88 INFO KHUSUS

Di berbagai titik pelosok Tanah Air terjadi antrean minyak goreng. Memang ironi, negeri penghasil minyak mentah sawit (crude palm oil, CPO) terbesar di dunia mengalami kelangkaan minyak goreng.

- 3 DARI REDAKSI
- 18 OPINI
- 34 INFO TANGSEL
- 38 INFO JABAR
- 40 INFO NUSANTARA
- 44 INFO NASIONAL
- 48 INFO SOSOK
- 64 INFO POLITIK
- 68 INFO TEKNOLOGI
- 72 INFO ISTANA
- 76 INFO SPORT
- 80 INFO WISATA
- 98 KAJI



3 PERIODE ATAU TUNDA PEMILU

Wacana penundaan Pemilu muncul menyusul gagasan Presiden dapat menjabat hingga tiga periode. Keduanya sama-sama memerlukan perubahan atau amandemen konstitusi.

Intinya memang demikian. Baik jabatan Presiden tiga periode maupun penundaan Pemilu sama-sama memerlukan amendemen konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbeda adalah tanggapan Presiden Joko Widodo sebagai petahana.

Untuk jabatan tiga periode, setidaknya dua kali Jokowi menolaknya. Penolakan pertama pada 2019. "Usulan itu menjerumuskan saya," kata Jokowi lewat akun Twitter resmi @jokowi, Minggu, 2 Desember 2019.

Ia menegaskan sebagai posisinya sebagai produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, berdasarkan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode. "Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak

setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode," kicau Jokowi.

Menyelesaikan masalah tekanan dari pihak luar dinilai sebagai tugas yang lebih penting ketimbang mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode. "Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata Jokowi yang kala itu baru memulai periode keduanya sebagai Presiden.

Isu tiga periode muncul kembali pada tahun lalu. Politisi senior yang pernah menjabat Ketua MPR, Amien Rais, yang mengemukakannya.

Eks Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun bilang rah rezim Jokowi kian jelas. Utamanya berkaitan dengan masa jabatan presiden.

"Jadi mereka akan mengambil lang-



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan

kah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presiden-nya itu bisa dipilih tiga kali," kata Amien melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang mulai tayang pada Sabtu, 13 Maret 2021.

Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, kata Amien, "Maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua sudah ada tahapan, it's now or never tomorrow will be to late," lanjutnya.

Sedangkan partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019, PDI Perjuangan menolak amendemen konstitusi yang mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. "Bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi," kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, Senin, 15 Maret 2021.

Basarah menilai memimpin negara

bukan soal lamanya periode. Konsistensi pemikiran saat pergantian presiden dinilai lebih penting ketimbang memperpanjang masa jabatan pimpinan negara.

"Hanya saja perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional. Sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program



Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra

pembangunannya," ujar Basarah.

Tambahan pula, hasil yang dikerjakan presiden lebih penting ketimbang masa jabatan. Meski tiga periode, kata dia, kalau tidak memperbaiki pembangunan negeri bakal percuma. "Pola pembangunan nasional seperti itu ibarat tari poco-poco, alias jalan di tempat," ujar Basarah.

Jadi, lanjut Basarah, perpanjangan masa jabatan presiden dinilai bukan hal mendesak. Mendorong MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinilai lebih penting ketimbang masa jabatan presiden jadi tiga periode. "Karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini," ucapnya.

Menanggapi wacana tiga periode pada 2021 itu, Presiden Jokowi melalui juru bicaranya, Fadjoel Rachman, memastikan akan selalu patuh terhadap konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

Fadjoel berbicara untuk menjawab derasnya isu rencana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. "Presiden tegak lurus pada

• INFO UTAMA

konstitusi UUD 1945, masa jabatan presiden dua periode,” ujarnya, Minggu, 14 Maret 2021.

Entah ada hubungannya atau tidak dengan pernyataannya, pada Oktober tahun lalu, Fadjoel melepas jabatan sebagai Jubir Presiden dan beralih tugas menjadi Duta Besar RI di Kazakhstan, negara pecahan Uni Soviet di kawasan Asia Tengah. Sedangkan wacana masa jabatan Presiden menjadi tiga periode mulai surut.

Belakangan, malah isu penundaan Pemilu 2024 yang mengemuka. Implikasi penundaan Pemilu adalah per-

untuk menempatkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) ini ke dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Syarief, jika amendemen itu dilakukan, MPR menyadari ada kemungkinan pembahasan akan melebar. Misalnya, kata dia, ada pandangan agar amendemen sekaligus mengubah masa jabatan presiden, periodisasi presiden, hingga usulan untuk menyejajarkan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Syarief lantas menanyakan sikap Presiden perihal itu.

“Kalau Presiden sendiri, saya tahu

puri hal itu. Itu domain MPR,” kata Syarief mengutip ucapan Jokowi.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Fraksi PKB, Jazilul Fawaid mengungkapkan, pertanyaan itu relevan karena saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung dan dapat mengganggu jadwal Pemilu maupun Pilpres. “Nah ini yang jadi tanda tanya kita semua, termasuk Pak Syarief (Hasan). Jadi kalau keadaan seperti ini jangankan TPS, masjid saja ditutup. Kondisinya seperti ini, ya, tentu kondisinya unpredictable sampai hari ini,” kata Jazilul.

la mengatakan akan muncul



Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah

panjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.

Isu penundaan Pemilu itu sudah mengemuka sejak Agustus 2021 lalu. Kali ini Presiden Jokowi langsung berada dalam pusaran itu, sebagaimana terjadi dalam pertemuan sembilan pimpinan MPR dengan Presiden untuk membahas persiapan sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021.

Dalam pertemuan rutin tahunan kali ini, pimpinan MPR sempat menanyakan ihwal perpanjangan masa jabatan presiden. Salah satu yang melontarkan pertanyaan itu ialah Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan. Terlebih saat ini ada masukan

Pak Presiden sendiri tidak setuju, tapi itu kan beberapa tahun yang lalu, nah kalau sekarang bagaimana? Karena kan yang kami takutkan nanti melebar,” ujarnya.

Menurut Syarief, Presiden Jokowi menyampaikan amendemen UUD 1945 merupakan domain MPR dan Presiden tak mencampuri hal tersebut. Secara implisit, ujarnya, Presiden mengamini ada kemungkinan agenda perubahan konstitusi melebar ke persoalan lainnya.

“Jadi Presiden setuju apa yang saya sampaikan bahwa kemungkinan ada yang melebar. Presiden kembalikan jangan sampai melebar. ;Kalau saya tidak, dari pemerintah tidak mencam-

masalah ketatanegaraan jika varian Delta kembali melonjak saat pilpres berlangsung. Sehingga harus dicari solusi jika kemungkinan itu terjadi.

“Mulai sekarang dipikirkan namanya juga membuat arah ke depan. Kita berharap sekuat tenaga kita semua mudah-mudahan selesai di tahun 2021. Dulu bilangnyanya, kan, Juli [selesai], ternyata Juli malah nanjak. Kita hanya mencari jalan saja semoga segera berlalu,” tandasnya.

Ternyata tahun berganti dan harapan Jazilul belum terpenuhi. Memasuki 2022, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia kembali mengemu-

kakan wacana penundaan Pemilu. Ia menyelipkan ide gagasan itu ketika menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu, 9 Januari 2022. Juga menuai kontroversi.

Toh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan lagi ide penundaan Pemilu 2024 pada Rabu, 23 Februari 2022. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyusul kemudian, turut mendukung wacana itu sambil menyinggung hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintah. Partai Golkar pun memberi indikasi untuk mengkaji dukungan terhadap wacana tersebut melalui Ketua Umum Airlangga Hartarto yang mengaku menerima aspirasi itu di kalangan petani sawit.

Sedangkan tiga partai koalisi pendukung pemerintah lainnya, PDIP, Partai NasDem, dan Partai Gerindra menyatakan penolakan. Hanya PPP yang belum menyatakan sikap karena menunggu proses politik yang berjalan di DPR secara formal.

Beberapa pihak, terutama partai oposisi seperti PKS dan Partai Demokrat serta kalangan masyarakat sipil, juga meminta Jokowi bersikap soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini.

Jokowi pun menanggapinya. "Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat," kata dia.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," lanjutnya.

Dalam pernyataan tersebut Jokowi menyebut siapapun boleh mengusulkan wacana penundaan pemilu. Dia tak menyatakan tegas menolak wacana tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut pernyataan Jokowi kali ini tak lebih tegas dari dua pernyataan dia sebelumnya. "Beda dengan tiga periode kemarin yang sampai bawa-bawa 'menampar muka saya ini' dan lain-lain," kata dia, Senin, 7 Maret 2022.

Sedangkan Guru Besar Universitas

Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi di tengah gaduh wacana penundaan Pemilu 2024 itu masih normatif. Menurut dia, pernyataan Jokowi 'taat, tunduk dan patuh pada konstitusi' tidak mencerminkan ketegasan terhadap sejumlah parpol yang menggulirkan ide perpanjangan tersebut.

"Pernyataan Presiden Jokowi (Kompas 5/3/2022) bhw ia 'taat, tunduk dan patuh pd konstitusi' masih normatif; Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik 3 parpol yg mengusulkan penundaan Pemilu 14 Feb 2024," ujar

nundaan Pemilu 2024 hingga sejauh ini.

"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini," kata Luhut melalui saluran Youtube Deddy Corbuzier, Jumat, 11 Maret 2022.

Big data itu, lanjutnya, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut bilang rakyat tak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk me-



Fadjoel Rachman

Azyumardi Azra melalui akun Twitternya, @Prof_Azyumardi, Sabtu, 5 Maret 2022.

Jadi, tetap saja inti persoalannya adalah perubahan konstitusi, amandemen UUD 1945 yang menjadi domain partai politik. Bagaimana gambarnya?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan justru mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luhut mengemukakan, landasannya adalah big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Sedangkan elite Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP menolak usulan pe-

nyelenggarakan pemilu.

Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.

"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," tandas Luhut.

Tentu saja konstitusi tak dapat mengubah batang tubuhnya sendiri. Perlu amandemen, termasuk apakah mungkin jabatan Presiden bisa tiga periode ataupun penundaan Pemilu. ●



Wakil ketua DPR A Muhaimin Iskandar

PERJALANAN PROPOSAL PENUNDAAN PEMILU

Pentas politik nasional tengah menampilkan manuver menggeser jadwal Pemilihan Umum 2024. Seperti sedang mengusulkan proposal kegiatan.

Jadi, bagaimana proposal, gagasan menggeser jadwal Pemilu 2024 sudah penuh di bagian latar belakangnya. Alasan dan dalihnya sudah banyak.

Namun, bagian maksud dan tujuannya belum jelas nian. Apakah sekadar kepentingan kekuasaan dan akses ekonomi, atau memang untuk mencapai target-target yang lebih bermanfaat untuk bangsa secara keseluruhan.

Proposal penundaan Pemilu itu sebenarnya sudah meluncur sejak awal tahun. Adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengemukakannya.

Bahlil mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024

diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.

"Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," ujar Bahlil menanggapi temuan survei Indikator Politik Indonesia.

Acara diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' oleh Indikator Politik Indonesia

itu berlangsung pada Minggu, 9 Januari 2022. Keesokan harinya, wacana itu mulai mengundang reaksi pro dan kontra.

Sedangkan survei Indikator sendiri mencatat 31 persen masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga 2027. Namun, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju dan 25,1 persen tidak setuju sama sekali dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Masyarakat yang setuju berharap agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat diselesaikan secara tuntas.

Meski belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat ini, Bahlil gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada empat bulan terakhir, yang mencapai 71 persen pada Desember 2021 menurut survei tersebut. Toh Bahlil menyebutkan hasil survei tersebut senada dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha. Dia mengatakan kalangan pengusaha berpikir bahwa akan memberatkan bila dunia usaha harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat.

Bahkan, kata Bahlil, bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. "Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu."

Ia menyebutkan, saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. "Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" ujarnya.

Menurut dia, alasan bagi para pengusaha baru menghadapi persoalan pandemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan. "Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil

diskusi saya dengan mereka," kata Bahlil.

Maka, lanjut Bahlil, bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu," tambahnya.

capaian target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. "Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5 persen pada kuartal III 2021," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pula, memajukan atau memundurkan jadwal pemilu bukan sesuatu yang diharamkan kare-



Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia



Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad

Menteri Bahlil optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan target investasi tahun 2021 Rp900 triliun akan tercapai, disusul dengan rencana pen-

na sudah ada sejarahnya di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, kata Bahlil, pada 1997 telah dilakukan pemilu. Namun reformasi pada 1999 membuat

pemilu yang seharusnya digelar 2002 dipercepat dan dilaksanakan pada 1999.

Bahkan Bahlil sudah membawa proposal ini ke ranah politik. Ia berbicara konsisten tentang ruang yang terbuka untuk menunda Pemilu. "Memajukan dan mengundurkan pemilu di bangsa ini bukan haram karena pernah pada 1997 pemilu, harusnya 2002, tapi kan pemilu 1999 karena krisis," tutur Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin, 31 Januari 2022.

Ia menegaskan, sejumlah pengusaha sempat mengusulkan menunda

Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih lagi, kata dia, kerja Bahlil menjadi berat menarik investor ke Indonesia setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inKonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, kata legislator Komisi XI DPR RI itu, Bahlil mencari jalan baru dengan meminta penundaan pergantian presiden pada 2024.

"Menteri Bahlil mencari perhatian baru dari Presiden Jokowi. Bicara mengatasnamakan pengusaha," kata Kam-russamad, Rabu, 11 Januari 2022

Legislator Daerah Pemilihan III DKI

dengan itu (memundurkan pemilu, red). Komisi II sampai hari ini firm bahwa pemilu itu 2024," kata Saan ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.

Komisi II yang membidangi kepi-miluan berencana menggelar rapat kerja membahas kepastian waktu pesta demokrasi. Sebab, kata Saan, penetapan jadwal pemilu membuat isu penundaan penggantian presiden pada 2024 bakal terbantahkan.

"Jadi, kalau misalnya sudah ditetapkan kapan pemilunya di 2024, spekulasi terkait dengan pengunduran masa jabatan itu akan terbantahkan," ungkap legislator Fraksi Partai NasDem itu.

Wakil Ketua Komis II DPR lainnya, Luqman Hakim, melihat Bahlil memakai narasi ekonomi demi menyarankan penundaan penyelenggaraan pilpres pada 2024 menjadi 2027. "Menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian Presiden, sangat tidak masuk akal dan mengada-ada," kata legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu, Selasa, 11 Januari 2022.

Menurut Luqman, penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden atau wakil presiden justru bisa menjadi pemicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua PP GP An-sor itu tidak pernah mendengar sektor ekonomi mengalami kemerosotan ketika pemilu berlangsung di tanah air. "Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu," tutur Luqman.

Dia mengingatkan upaya menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden atau wakil presiden ialah tindakan inkonstitusional. "Antidemokrasi dan melawan kedaulatan rakyat," tandasnya.

Namun, dalam hitungan hari, hem-busan wacana penundaan Pemilu itu seperti mengencang tatkala Ketua Umum PKB yang juga Wakil ketua DPR A Muhaimin Iskandar justru mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 selama satu tahun atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.

Menurut dia, pandemi COVID-19 yang terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penu-



Wakil Ketua Komis II DPR, Luqman Hakim

pemilu 2024. Menurut dia, hal itu mustahil jika dilihat dari kacamata konstitusi, tapi memungkinkan jika dilihat dari sejarah bangsa. "Saya katakan secara konstitusi tidak bisa karena lima tahun sekali, mereka bilang kalau memungkinkan ada ruang tolong pertimbangan," ucap Bahlil.

Di awal tahun itu pula, tanggapan pun muncul dari kalangan politisi. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kam-russamad, misalnya, menilai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sedang mencari perhatian Presiden

Jakarta itu meminta Bahlil membuka nama pengusaha yang turut meminta pelaksanaan Pemilu ditunda dari 2024 ke 2027. "Kami minta daftar nama nama pengusaha yang minta Pemilu 2024 ditunda, agar bisa diperiksa kontribusinya terhadap pembangunan," ujarnya dia.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut pihaknya tidak berencana memundurkan penyelenggaraan pemilu. Legislator di Senayan masih komitmen pesta demokrasi di Indonesia bisa berlangsung pada 2024. "Komisi II tidak ada wacana terkait

runan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu ini, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.

"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin di Gedung DPR RI, Jakarta,

dahsyat. Selain itu, juga akan ada peluang untuk bangkit lebih baik daripada negara-negara mana pun.

Dari masukan para pakar dan hasil kunjungannya ke berbagai daerah, lanjut dia, mengalami masa-masa dua tahun dibilang inefisien karena pandemi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, terutama yang paling terpukul adalah UMKM yang mengalami masa sulit. Selain UMKM, kata Muhaimin Iskandar, juga

hentikan agresivitas ekonomi. Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan biasanya mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu suasana dan momentum perbaikan ekonomi yang sangat bagus, apalagi pasca-G20. Ketiga, lanjut dia, pemilu juga dikhawatirkan bisa terjadi eksploitasi ancaman konflik.

Oleh sebab itu, dari seluruh masukan itu, Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi

RILIS TEMUAN SURVEI

INDIKATOR POLITIK INDONESIA

Pemulihan Ekonomi Pasca-COVID, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024

NARASUMBER



Bahlil Lahadalia, SE
Menteri Investasi RI/
Kepala BKPM



dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia



Philips J. Vermonte, Ph.D
Senior Fellow CSIS
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UII



Burhanuddin Muhtadi, Ph.D
Direktur Eksekutif
Indikator Politik Indonesia



MODERATOR
Zackia Arfan
Presenter Metro TV

LIVE VIA





Minggu, 09 Januari 2022
Jam 13.00 - 15.00 WIB

Rabu, 23 Februari 2022.

Ia mengatakan, para pelaku usaha memberikan masukan penting, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimistis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa. Mereka memperkirakan akan banyak momentum ekonomi untuk pemulihan terhadap dua tahun pandemi yang tidak efisien. Sejak 2021 dilakukan restarting ekonomi yang menurut penilaiannya cukup bagus dan ke depan akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang

sosial, pendidikan, dan politik yang mengalami stagnasi selama 2 tahun.

Menurut dia, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan sehingga Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.

Ia menilai pelaksanaan pemilu biasanya ada tiga kondisi, yakni: pertama, para pelaku ekonomi itu melakukan pembekuan, menunggu, dan meng-

ini tidak hilang, kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun pandemi. Muhaimin akan menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan para pimpinan partai politik terkait dengan usulannya untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Nah, latar belakang proposalnya sudah jelas. Namun, maksud dan tujuan serta target konkretnya untuk keseluruhan bangsa ini masih menjadi pertanyaan. ●

FAKTOR U DAN PENUNDAAN PEMILU

Hingga awal Maret 2022, belum ada kesepakatan mengenai nilai anggaran untuk Pemilu 2024, apalagi pencairannya. Apakah faktor uang dapat menunda Pemilu?

Rencana perjalanan menjadi sia-sia jika tak ada uang untuk melaksanakannya. Begitu pula dengan tahapan Pemilu 2024 yang menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) harus dimulai sejak 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) berbunyi:

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD,



- DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
 - h. Masa Tenang;
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan
 - k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sedangkan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyatakan: "Tahapan Penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara."

Dengan kesepakatan Pemerintah dan DPR yang menetapkan jadwal

Pemilu pada 14 Februari 2024, maka paling lambat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dimulai pada 14 Juni 2022. Tak sampai 100 hari dari 14 Maret 2022.

Namun faktanya, hingga awal Maret 2022, usulan anggaran untuk pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia itu belum disetujui oleh DPR RI dan pemerintah.

Semula Komisi Pemilihan Umum (KPU) semula mengajukan anggaran senilai Rp86 triliun. Namun, anggaran itu telah dipangkas melalui hasil rasionalisasi menjadi Rp76,6 triliun. Pemenuhan anggaran akan dibagi melalui empat sumber, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2022, 2023, 2024 dan 2025.

Ihwal anggaran Rp86 triliun untuk Pemilu 2024 itu sebelumnya pernah mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan usulan anggaran tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan anggaran pemilihan umum di tahun-tahun sebelumnya.

"Kemarin membaca di media peng-

Menurut catatan, anggaran Pemilu 2019 adalah Rp 25,59 triliun; sementara anggaran Pemilu 2014 adalah Rp 15,62 triliun. Sedangkan Mendagri Tito menilai perlu efisiensi anggaran mengingat Indonesia kini masih dilanda pandemi Covid-19.

Ia menyebut kondisi Covid-19 di Tanah Air memang sudah melanda hingga Indonesia dipuji banyak pemimpin dunia dan para ahli. Namun, sambungnya, pemerintah masih memiliki tugas penting untuk memulihkan perekonomian nasional yang sempat minus.

"Ini yang mungkin berbeda dengan pemilu tahun sebelumnya. Jadi, efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kami pertimbangkan," kata Mendagri.

Apapun, hingga awal Maret 2022, belum ada tanda-tanda anggaran segera cair. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan anggaran Pemilu 2024 paling lambat mesti disahkan agar salah satu proses terpenting, yaitu verifikasi partai politik.

Tentu saja anggaran ikut menentu-



ajuan Rp 86 triliun, jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Kamis, 16 September 2021.

kan. Verifikasi parpol itu perlu pengecekan ke lapangan seperti melihat fisik kantor cabang di tingkat provinsi dan kota maupun kabupaten. Lebih dari itu, kesan Pemilu 2024 tertunda pun akan menyurut.

"Kalau pemerintah dan DPR sudah

sepakat, tinggal nanti dikucurkan saja. Paling tidak bulan ini untuk segera bisa disetujui, disepakati, dan disahkan,” kata Ilham, Rabu 9 Maret 2022.

Nah, soal anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati DPR dan pemerintah justru bergulir di tengah wacana penundaan pemilu. Malah pejabat pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi. Luhut bilang rakyat tak mau

watirkan ketika KPU lama membuat tahapan, nanti direvisi oleh KPU baru. Justru itu akan membuat lama anggaran, jadinya. Kan kalau revisi anggaran, tiga bulan jadinya. Kan mendingan KPU yang baru yang mengajukan anggaran,” kata Said.

Selanjutnya, kata Said, KPU dan Bawaslu (setelah pelantikan) menyusun dan merencanakan kegiatan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Atas dasar pengajuan program kerja dari KPU dan Bawaslu yang baru itulah APBN untuk dukungan persiapan pemilu 2024 da-

Syarif Abdullah Alkadrie mengemukakan, anggaran untuk Pemilu 2024 belum ada kesepakatan lantaran memang masih perlu dibahas di Komisi II DPR sebagai mitra kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Politisi Nasdem ini mengemukakan, hingga kini Komisi II baru menyepakati tentang jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, sedangkan soal anggaran belum dibahas.

Pembahasannya kemungkinan setelah masa reses DPR sejak 19 Februari berakhir pada 14 Maret 2022. “Nah nanti setelah diproses di Komisi



uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu.

Toh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, alokasi plafon anggaran pemilu sampai 2024 bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri masih berada di pagu Rp86 triliun. Namun, lanjut politisi asal PDI Perjuangan ini, anggaran itu sementara belum bisa cairkan karena masih menunggu SK Presiden terkait legalitas penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.

Terlebih para komisioner kedua penyelenggara pemilu itu baru saja disepakati DPR. “Kan yang dijaga governance-nya juga. Karena dikha-

pat digunakan,” kata Said.

Sedangkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai pencairan anggaran tidak perlu menunggu pelantikan komisioner KPU dan Bawaslu yang baru. “Kan sudah di-fit and proper test dan DPR sudah memilih tujuh (komisioner) KPU dan lima Bawaslu. Menurut saya nggak perlu menunggu yang baru ini dilantik karena mereka kan baru dilantik April. Sebaiknya, dilakukan dari sekarang karena 2024 kan akan cukup kompleks. Kita harus secepat mungkin mempersiapkannya,” kata Khoirunnisa.

Sedangkan Wakil Ketua Banggar

II, baru masuk ke Banggar,” kata Syarif.

Jadi, Syarif meminta semua pihak tidak berspekulasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Dia menegaskan, DPR tetap mematuhi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menetapkan bahwa pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali.

“Jadi nggak mungkin kami menganulir konstitusi tertinggi kita secara formal. Supaya masyarakat nggak berandai-andai, kami berharap semua berjalan dengan apa yang sudah menjadi ketetapan konstitusi,” tandasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Harman, mengungkapkan adanya potensi

pelengseran Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda dengan alasan anggaran habis digunakan untuk proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Dia mengatakan kondisi anggaran negara habis untuk proyek pemindahan IKN tidak bisa digunakan menjadi dasar untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kalau katakanlah anggaran untuk pemilu oleh presiden dan DPR karena

garaan Pemilu 2024. Menurutnya, langkah sengaja tidak menganggar-kan anggaran pemilu merupakan sebuah kejahatan konstitusi.

"Ini constitutional crime. Risikonya sangat berat untuk presiden dan wapres tentu kalau dua-duanya setuju. Konstitusi kita sangat jelas," ucap Benny.

Ia juga menduga wacana penundaan Pemilu 2024 justru bersumber dari lingkungan Istana dan lingkaran terdekat Presiden sendiri. "Saya punya keyakinan gagasan ini tidak muncul begitu saja sebagai wacana

tusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Benny, meskipun pihak istana dan Presiden Jokowi sendiri sudah membantah soal penundaan Pemilu 2024, pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi sendiri dinilai tidak tegas. Selain itu, ia menilai wacana itu muncul dari luar istana dengan tujuan agar tidak ada kesan subjektif kekuasaan di benak masyarakat. "Supaya tidak ada kesan wacana ini subjektif kekuasaan maka muncul narasi yang juga menyambung di mata publik, yaitu kepentingan menjaga kesinam-



habis anggaran kita untuk bangun IKN maka tentu tidak ada pemilu. Kalau tidak ada pemilu, otomatis presiden dan wapres diperpanjang masa jabatan, mungkin instrumennya nanti dia akan bikin perppu," kata Benny dalam diskusi PARA Syndicate yang berlangsung daring, Rabu, 9 Maret 2022.

Namun, kata Benny, tidak bisa begitu. "Sebelum bikin perppu dia sudah bisa dituduh impeachment dituduh melanggar konstitusi," sambungnya.

Benny bilang, pelengseran Jokowi dengan alasan pelanggaran konstitusi bisa dilakukan karena Jokowi telah dinilai dengan sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk penyeleng-

publik. Ini adalah percikan api dari sebuah sumber api dahsyat dan sumber itu, mohon maaf, adalah istana dan teman-teman sekitarnya itu," kata Benny.

Dugaan itu diperkuat dengan kelompok yang terang-terangan mendukung wacana penundaan Pemilu 2024, antara lain Ketua Umum PKB, PAN, dan Golkar, yang dekat dengan Istana hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Sedangkan spekulasi yang terkait dengan penundaan Pemilu 2024 antara lain terkait dengan pengamanan proyek-proyek perpindahan ibu kota, paket UU Omnibus Law yang harus direvisi sesuai dengan pu-

bungan pembangunan yang sifatnya strategis," ungkapnya.

Dalam pandangan Benny, upaya mewujudkan penundaan Pemilu melibatkan banyak pihak. "Menkopolhu-kam dan Presiden Jokowi bilang ini wacana publik dan hak masyarakat untuk berpendapat. Kalau hanya itu saja tidak ada masalah. Tapi ini adalah wacana yang diproduksi oleh sebuah kelompok kepentingan," tandasnya.

Kembali ke Faktor U, walaupun anggaran Pemilu 2024 cair secara bertahap sesuai dengan jadwal, apakah benar-benar bisa mencegah penundaan Pemilu 2024? Who knows, siapa yang tahu? •

MENYOAL PRESIDEN TIGA PERIODE DAN DAMPAKNYA

“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. (Lord Acton)

Reformasi telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan sistem tata negara tersebut salah satunya berasal dari amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan UUD 1945 yang paling mendasar adalah perubahan masa jabatan presiden: dari yang tak terukur menjadi terukur (hanya 2 periode). Kepastian dan keterukuran dalam sistem demokrasi sangat diperlukan.



Oleh: Prof Dr R. Siti Zuhro
(Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional: BRIN)

Sistem Demokrasi

Apakah ide masa jabatan presiden tiga periode atau usulan tunda pemilu itu relevan signifikan dan urgen dibahas di MPR?

Ide masa jabatan presiden tiga periode jelas bertentangan dengan spirit gerakan reformasi 1998. Salah satu tujuan gerakan reformasi adalah menciptakan sirkulasi kepemimpinan yang terukur dan pasti.

Sistem demokrasi yang disepakati dan dijalankan sejak 1998 memerlukan konsistensi dan komitmen semua komponen bangsa.

Tidak hanya pemilu tapi aturan hukum juga harus diikuti dan ditaati agar jabatan publik (tertentu) tidak diisi orang yang sama dalam waktu yang terlalu lama.

Hukum harus memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Pembatasan masa jabatan presiden dua periode (sebagaimana diatur dalam konstitusi) adalah bagian dari menjaga negara Indonesia sebagai negara demokrasi dimana pembatasan yang demikian tersebut diterima dalam praktik HAM secara universal dan bukan dianggap sebagai pembatasan HAM.

Ciri sistem pemerintahan presidensial secara umum adalah jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu yang bersifat tetap.

Selain itu, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang dibentuknya.

Mengenai berapa periode masa jabatan presiden, praktik negara yang menganut sistem presidensial adalah mayori-

tas mengatur paling banyak dua periode.

Dalam konteks Indonesia, usulan masa jabatan presiden tiga periode sangat tidak relevan dan tidak signifikan karena sebenarnya bisa dicarikan solusi lain dengan cara melakukan reformulasi perencanaan pembangunan nasional yang ada saat ini.

Reformulasi ini dilakukan dengan membuat haluan pembangunan nasional yang berlaku untuk jangka panjang yang dikemas dengan produk hukum kuat sehingga setiap ganti presiden harus dipastikan bahwa penyusunan program pembangunan berdasarkan janji kampanyenya tidak

menyimpang dari haluan pembangunan nasional yang telah disepakati bersama oleh segenap komponen bangsa.

Permasalahan Sistem Pemilihan

Kalau ditarik ke tataran makro, Konstitusi Indonesia tidak cukup melembagakan proses seleksi pemimpin secara demokratis, tapi hanya mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan quasi presidensial yang bersifat umum.

Konstitusi masih dipengaruhi oleh sistem kabinet parlementer pasca-Proklamasi.

Perjalanan demokrasi terputus sejak 1958-1959 sehingga tradisi seleksi kepemimpinan belum melembaga. Dalam hal ini, para pemimpin Republik terpenggil dan terpilih melalui seleksi sejarah.

Praktik sistem Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru menutup peluang lahirnya pemimpin secara “normal” karena menempatkan birokrasi, sipil dan militer sebagai satu-satunya sumber rekrutmen pemimpin (bureaucratic polity).

Perdebatan Perodesasi Kepemimpinan

Ada tiga wacana yang mengemuka, yaitu masa jabatan presiden cukup satu kali dengan durasi kepemimpinan delapan tahun, masa jabatan dua periode dengan cara sela, dan masa jabatan presiden tiga periode dengan durasi kepemimpinan total selama 15 tahun.

Opsi-opsi tersebut harus diikuti oleh kajian serius dan membuat naskah akademiknya dengan mengacu pada filosofi, teks, dan konteks serta pengalaman empirik.

Masalahnya bagaimana menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden setiap menjelang pergantian kepemimpinan (suksesi).

Usulan presiden tiga periode ini tidak hanya muncul saat

ini saja, tapi juga ramai diperdebatkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Waktu itu salah satu kader partai Demokrat mengusulkan kemungkinan SBY bisa memimpin sampai 3 periode.

Namun, usulan tersebut menimbulkan polemik dan resisten publik.

Perdebatan mereda dan akhirnya berhenti setelah SBY merespon dan menjelaskan posisinya untuk tidak menyetujui usulan tersebut.

Semua pihak mestinya memahami bahwa amandemen pembatasan masa jabatan presiden tersebut sebagai respon agar pengalaman Orla dan Orba tak kembali terulang dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Keduanya terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus menerus berkuasa seumur hidup.

Partai politik, DPR, DPD, MPR dan pemerintah harus bekerja serius untuk memajukan Indonesia dan menyejahterakan rakyat. Mereka semestinya berhenti mewacanakan topik-topik yang ujung-ujungnya menimbulkan polemik dan kontroversi serta upaya untuk melanggengkan kekuasaan semata.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa pengalaman terkait hal itu berujung pada chaos.

Permasalahan Krusial yang Dihadapi Indonesia

Masalah riil yang dihadapi pemerintah sampai 2024 adalah menanggulangi dampak-dampak pandemi covid dengan varian-varian barunya.

Dampak-dampak negatif bidang sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial politik serta hukum dan ideologi/kebangsaan sangat berat. Dan ini yang secara terukur harus diberikan bukti solusinya. Bukan sebaliknya, elit politik mengajak rakyat menyoal kemungkinan jabatan presiden tiga periode/tunda pemilu yang membuat gaduh dan menimbulkan ketidakpastian baru dan ketidakpercayaan rakyat.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut, kondisi NKRI sedang tidak baik-baik saja. Permasalahan yang dihadapi negeri ini sangat kompleks. Dampak-dampak covid-19 belum tertangani dengan memadai. Indonesia harus menjalani kehidupan new normal yang sarat dengan budaya digital (digital culture).

Hal ini tentunya tidak mudah bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah harus memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan memadai. Fokus dan energi partai politik dan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tertuju ke penyelesaian masalah yang menjadi tugas fungsinya.

Indonesia ke depan memerlukan terobosan program pengentasan kemiskinan dan inovasi khususnya untuk mengakselerasi implementasi SDM unggul dan menyejahterakan rakyat.

Penataan Politik Hukum

Pertama, penataan menyeluruh atas format pemilu khususnya dan sistem demokrasi pada umumnya membutuh-

kan dukungan politik penegakan hukum secara konsisten, sehingga terbentuk sistem demokrasi konstitusional yang berdasarkan hukum.

Kedua, politik penegakan hukum semestinya dilakukan secara simultan dan sinergis dengan penataan format pemilu dan skema demokrasi agar terbangun koherensi antara "pembangunan politik" dan "pembangunan hukum", sehingga politik yang bersifat anarkis terhindarkan.

Ketiga, politik penegakan hukum seyogyanya lebih berorientasi keadilan yang berporos pada kepentingan bangsa ketimbang sekadar pelembagaan hukum yang berorientasi juridis-formal belaka, sehingga cita-cita sistem demokrasi berdasarkan hukum dapat diwujudkan.

Penataan politik secara menyeluruh atas format pemilu khususnya serta skema demokrasi dan atau sistem politik berikut unsur-unsur yang melekat padanya merupakan suatu keniscayaan.

Pemilu-pemilu yang dilaksanakan sejak 1999, pemilu presiden secara langsung sejak 2004, serta pilkada langsung sejak 2005 dan pemilu serentak sejak 2019 belum menghasilkan pemerintahan yang efektif yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sistem demokrasi belum meniscayakan hadirnya pemerintah dan para wakil rakyat yang bertanggung jawab dalam mengemban mandat politik yang diberikan rakyat.

Karena itu, tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi tidak sekadar terletak pada terpenuhinya segenap prosedural elektoral, melainkan lebih pada kualitas akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyat terpilih yang tercermin dalam kemampuan mereka mewujudkan cita-cita keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bagi segenap unsur bangsa kita.

Cita-cita luhur dan mulia tersebut tidak mungkin terwujud karena demokrasi dan skema pemilu telanjur dilembagakan terperangkap berbagai distorsi.

Karena itu suatu penataan sistem politik secara menyeluruh diperlukan agar bangsa kita tidak mengulang kembali "salah urus" negara dan pemerintahan yang hampir tidak berujung.

Demokrasi Indonesia dan Pentingnya Kepemimpinan Transformatif

Dalam kehidupan demokrasi yang sudah mapan, sistem lebih berpengaruh daripada pemimpin. Ini karena demokrasi mengajarkan pemimpin bekerja dalam sistem. Dalam konteks Indonesia, membangun sistem sangatlah penting.

Namun, realitasnya peran pemimpin relatif lebih dominan/ menentukan.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan transformatif, bukan transaksional.

Pemimpin transaksional cenderung mengambil keputusan dengan pertimbangan untung rugi.

Pemimpin transformatif cenderung berorientasi pada perubahan demi tercapainya tujuan, dengan sejauh mungkin melibatkan pengikutnya. Mereka memanfaatkan soft power dengan memberi contoh, memotivasi pengikut agar memiliki idealisme dalam upaya mencapai tujuan. ●



MENKO AIRLANGGA HARTARTO PUJI KOMITMEN SUMSEL SEJAHTERAKAN PETANI

Peningkatan produksi dan kesejahteraan di sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera

Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan ini melibatkan semua pihak mulai dari petani hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.

Salah satu upaya peningkatan itu adalah dengan pemberian bantuan kepada petani kelapa sawit yang dikelola langsung warga Nahdatul Ulama (NU) Sumsel di Desa Kencana Mulia Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

Atas komitmen tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartato bersama Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf memberikan apresiasi yang tinggi saat menyerahkan bantuan untuk peremajaan sawit bagi petani di Kabupaten Muara Enim tersebut pada awal Maret lalu.

Kemenko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartato mengatakan tana-

man sawit menjadi komoditas utama bagi Indonesia, bahkan dari komoditi sawit ini mampu menghasilkan devisa negara Rp 30 miliar USD pada tahun 2021.

Komitmen Pemprov Sumsel terhadap kesejahteraan petani khususnya petani sawit juga mendapatkan apresiasi dari Menko Perekonomian,

"Meski dimasa pandemi covid-19, komoditi sawit terus memberikan keuntungan bagi negara. Diperkirakan sawit ini terus akan dibutuhkan bukan hanya di Indonesia tapi juga di pasar global," ungkapnya.

Dalam program peremajaan sawit, lanjut Airlangga ini pemerintah sudah menyiapkan sebanyak 180 ribu hektar. Bahkan melalui program ini perhektarnya akan diberikan dana sebesar Rp 30 juta. Dia juga melihat potensi sawit

Sumsel sebagai salah satu provinsi sebagai penghasil terbesar di Indonesia.

"Tadi ada yang 4 hektar Rp 120 juta, kemudian 70 hektar bahkan ada yang 200 hektar. Artinya kalau lebih dari 100 hektar bisa menerima Rp 6 hingga Rp 7 miliar. Dan pemerintah menyiapkan 180 ribu hektar setiap tahun," katanya.

Sebagai Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Airlangga Hartato mengaku bangga melihat warga NU karena disini banyak kebun warga NU dan program pemerintah ini harus berjalan dan dananya sudah disediakan dan dari bantuan penanaman awal tadi bisa dilanjutkan KUR bahkan KUR naik 30 persen, kalau tahun kemarin Rp 283 triliun dan tahun ini Rp 337 triliun.

"Kami harap program ini terus di berbagai daerah dan kerjasama seluruh pihak hingga Pemerintah Pusat, daerah termasuk perbankan dan lembaga lainnya. Kita akan terus lakukan program ini sehingga target 180 ribu hektar bisa dilakukan tahun ini dengan begitu petani bisa berjaya dan sejahtera kembali bangkit dari pasca covid-19," ungkapnya.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, kegiatan itu bagian dari rangkaian acara hari lahir ke 99 NU ke-99 (kalender Hijriyah) di lahan seluas 317 hektare. Menurutnya, program pendampingan dan kerja konkret bersama rakyat adalah salah satu serangkaian kerja sama NU dengan pemerintah melalui beberapa kementerian.

"Ini terus kita kembangkan, seperti kita sampaikan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) bahwa kami ingin NU ini bisa diperankan sebagai penyangga dari berbagai agenda-agenda Negara. Tentu untuk kemaslahatan rakyat banyak," kata Kiai Yahya.

Kyai Yahya Cholil Staquf menambahkan, peremajaan sawit rakyat ini upaya NU untuk ikut mendukung program-program pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat.

"Kita tau pemerintah terus ingin membuat kesejahteraan rakyat maka itu NU ikut membantu agar program tersebut terwujud. Ini salah satu kerjasama PBNU dengan pemerintah dan ini akan terus kita kembangkan," pungkasnya.

Sementara dalam kegiatan penyerahan bantuan peremajaan sawit yang digelar PBNU tersebut Gubernur Herman Deru menilai sangat tepat diberikan oleh pemerintah pusat, sebab melalui program replanting diharapkan akan menjaga keberlangsungan pendapatan petani sawit di Sumsel.

Bahkan dengan adanya bantuan sebut lanjut Herman Deru akan sangat membantu bagi kalangan petani khususnya petani non plasma.

"Hari ini sangat istimewa bagi kita karena mendapatkan bantuan peremajaan sawit yang disebut replanting. Kami mohon kepada Pak Menko untuk dapat memperluas lagi program replanting ini untuk petani sawit Sumatera Selatan," harap Herman Deru.

Herman Deru menilai bantuan yang diberikan

pemerintah melalui program replanting akan berdampak luar biasa bagi kesejahteraan petani.

"Bantuan yang diberikan untuk penanaman ini merupakan angin segar bagi keberlangsungan kebun sawit petani karena setiap hektarnya mendapatkan modal 30 juta rupiah. Atas nama petani dan seluruh masyarakat saya sampaikan ucapan terimakasih pak Menteri," imbuh Herman Deru.

Pertanian yang digarap petani NU sendiri memiliki arti penting bagi pemerintah sehingga tak heran beberapa pejabat negara lainnya turut hadir dalam kegiatan ini seperti Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Ketua PBNU, KH. Nusrin Wahid, Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB.H. Ace Hasan, Anggota Komisi III DPR RI, Kahar Muzakir.

Kemudian Direktur Utama BPDP-KS Eddy Abdurrachman, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI, Sis Apik Wijayanto, Ketua DPRD Sumsel, Hj. RA Noringhati, Ketua PWNU KH. Amiruddin Nahrawi serta lainnya.

Produksi Pertanian Sumsel Naik 3,76 Persen

Upaya peningkatan program pertanian kini membuahkan hasil. Di masa pandemic Covid 19 sekarang ini sektor pertanian justru mengalami peningkatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, mencatat pada Januari 2022, produksi padi diperkirakan sebesar 232,70 ribu ton GKG, dan potensi produksi padi sepanjang Februari hingga April 2022 mencapai 1.163,12 ribu ton GKG.

Dengan demikian, total potensi produksi padi pada Subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 1.395,82 ribu ton GKG, atau mengalami kenaikan sebanyak 50,62 ribu ton GKG (3,76 persen) dibandingkan 2021 yang sebesar 1.345,20 ribu ton GKG.

Kepala BPS Provinsi Sumsel melalui Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Sukerik, SST, MSI menu-



turkan, terdapat tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi (GKG) tertinggi pada Januari hingga April 2022 adalah Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ilir.

"Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan potensi produksi padi terendah pada periode yang sama adalah Prabumulih, Palembang, dan Lubuk Linggau," tuturnya

Sukerik mengatakan, potensi kenaikan produksi padi yang relatif besar pada subround Januari-April 2022

sepanjang Februari hingga April 2022 diperkirakan seluas 213,31 ribu hektar.

"Dengan demikian, total luas panen padi pada subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 256,70 ribu hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 11,60 ribu hektar (4,73 persen) dibandingkan luas panen padi pada subround Januari-April 2021 yang sebesar 245,10 ribu hektar," tambahnya

Sementara pada Januari 2022, produksi beras diperkirakan sebanyak 133,63 ribu ton beras, dan potensi

terangnya.

Sementara Gubernur Herman Deru sebelumnya mengatakan, Provinsi Sumsel memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya peningkatan ekspor, khususnya di sektor pertanian.

"Sumsel ini kaya akan Sumber Daya Alam. Selain pertanian, kita juga memiliki kekayaan mineral dan batubara. Dan ini memang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi bagi masyarakat," jelasnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan akses terhadap hasil pertanian di Sumsel. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif agar proses pendistribusian komoditas pertanian menjadi lancar. Di samping itu, infrastruktur yang baik akan berpengaruh terhadap minimnya biaya distribusi, sehingga penghasilan masyarakat akan semakin meningkat

"Setinggi apapun harga dan banyaknya hasil panen tidak akan menjamin meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa didukung infrastruktur yang baik. Infrastruktur tersebut menentukan besaran biaya dalam pendistribusian komoditas yang kita hasilkan," katanya.

Untuk ekspor, Provinsi Sumsel mengirimkan ekspor komoditas pertanian sebanyak 16,61 ton dengan nilai Rp244,4 miliar ke sejumlah negara. Berbagai komoditas pertanian asal Sumsel diekspor mulai dari kopi, kelapa, karet, maggot atau belatung dan lainnya. Secara nasional sebanyak 1,3 juta ton komoditas pertanian senilai Rp13,72 triliun dan dikirim ke 34 pintu ekspor di berbagai negara.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, ekspor tersebut dilakukan sebagai langkah dan komitmen Pemprov Sumsel dalam mendorong peningkatan target ekspor komoditas pertanian sebesar 300 persen yang bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Pelepasan ekspor akhir tahun ini menjadi tekad kita dalam mendorong peningkatan ekspor sebanyak 3 kali lipat. Ekspor komoditas pertanian ini menjadi salah satu andalan kita untuk meningkatkan kesejahteraan para petani," kata Herman Deru. ●



dibandingkan Subround yang sama pada 2021 terjadi di Ogan Komering Ilir, Lahat, dan Muara Enim.

"Sementara potensi penurunan produksi padi pada Subround Januari-April 2022 yang relatif besar terjadi di Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, dan Musi Rawas Utara," katanya

Sukerik mengakui, luas panen padi pada Januari 2022 mencapai 43,38 ribu hektar, dan potensi panen

produksi beras sepanjang Februari hingga April 2022 ialah sebesar 667,93 ribu ton.

"Dengan demikian, potensi produksi beras pada Subround Januari-April 2022 diperkirakan mencapai 801,56 ribu ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 29,07 ribu ton (3,76 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada Januari-April 2021 yang sebesar 772,49 ribu ton beras,"

OPTIMALISASI PENYALURAN KUR KLASER DALAM KESEJAJARAN ERA DAPELIH



SUMSEL DAPAT ALOKASI DANA KUR RP 8 TRILIUN

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya pulihkan ekonomi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN berkolaborasi untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Sumsel.

Dimana penyaluran KUR tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru bertempat di Hotel Ariata Palembang, pada awal Maret lalu).

Dimana penyaluran KUR untuk wilayah Provinsi Sumsel pada tahun 2020 dan 2021 telah terealisasi dengan nilai kredit Rp. 10.69 Triliun dan dinikmati 227.832 debitur. Sedangkan pada tahun 2022 ini Sumsel menerima kuota sebesar Rp 8 Triliun dengan bunga rendah yang siap untuk membantu para pelaku usaha.

Gubernur Herman Deru dikesempatan itu mengatakan, Pemprov Sumsel

bersama BI dan OJK sudah melakukan kegiatan literasi Perbankan bagi pelaku UMKM di Sumsel hal tersebut diberikan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengetahui kegiatan perbankan.

"Dalam mendorong UMKM berperan dalam peningkatan ekonomi, kami juga sudah melakukan pemahaman tentang literasi perbankan untuk para UMKM jadi nantinya tingkat literasi masyarakat di Sumsel sudah diatas rata-rata," kata Herman Deru

Menurutnya gagasan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto ditengah pandemi Covid-19 sangat banyak memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

"Banyak terobosan yang dilakukan pak Menko di tengah pandemi dan disambut baik bagi para pelaku usaha. Pemda akan menjalankan, memonitoring, serta memantau realisasinya," tegas Herman Deru.

Dia menuturkan, sebagai Gubernur dirinya menjamin masyarakat Sumsel agar tetap patuh mengelola dana KUR

dan dia berharap tahun depan Sumsel akan mendapatkan kuota lebih.

"Terimakasih atas bantuannya dari Pak Menko. Saya akan menjamin para penerima dana KUR di Sumsel akan memanfaatkan dananya dengan baik, dan kita harapkan tahun depan Sumsel akan mendapatkan kuota lebih," pungkasnya.

Sementara itu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwasanya penyerahan KUR secara berkelompok di Palembang dan dapat digunakan seluruh UMKM dari berbagai sektor dengan bunga 3 persen sampai dengan akhir tahun.

"KUR ini nantinya bisa digunakan bebas untuk sebuah sektor UMKM, dan pemerintah memberikan bunga 6 persen setahun tetapi pemerintah memberikan subsidi 3 persen sampai akhir tahun nanti," kata Airlangga.

Dia juga meyakini KUR ini bisa sangat membantu para pelaku UMKM untuk memajukan usahanya.

"KUR ini saya yakini bisa menggerakkan UMKM dan usaha dalam bentuk kluster besar," pungkasnya. ●

HARLAH NU DI SUMSEL BANYAK LAHIRKAN PROGRAM KESEJAHTERAAN PETANI

Peringatan hari lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke 99 di Sumatera Selatan (Sumsel) pada Maret lalu berlangsung meriah. Dimana momentum puncak peringatan ini memiliki makna tersendiri bagi Sumsel terutama di sektor pertanian.

Halakah ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari perwakilan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatra Selatan, PCNU, dan MWCNU se-Sumsel. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 4-5 Maret 2022 di GOR Dempo Jakabaring Sport City (JSC).

Wakil Ketua PBNU KH Nusron Wahid menjelaskan, Harla NU yang digelar di bumi Sriwijaya saat ini berlangsung

sesuai dengan harapan.

"Peringatan harla ini berlangsung baik dan tidak ada halangan. Termasuk Masalah keamanan dan kenyamanan," katanya.

Forum Halakah ini menghasilkan rumusan yang disampaikan Ketua Panitia Harlah ke-99 NU H Nusron Wahid, saat penutupan.

Pertama, terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), skema pengajuannya dilakukan melalui satu komando

koperasi primer, yakni Koperasi Petani Sawit Nahdlatul Ulama (Koptasinu).

"Sehingga nanti status teman-teman semua di cabang dan wilayah adalah menjadi operator dalam melaksanakan program ini," terang Wakil Ketua Umum PBNU itu.

Kedua, berkenaan dengan program perhutanan sosial, lanjut dia, strateginya adalah baik pengurus ranting, MWCNU, dan PCNU se-Sumatra diharuskan mempunyai kelembagaan



koperasi.

Hal ini untuk segera bisa memulai partisipasi dalam akselerasi distribusi perhutanan sosial kepada masyarakat Indonesia yang belum mempunyai lahan dan membutuhkan lahan untuk berkehidupan produktif.

"Karena itu, sebentar lagi mohon dikoordinasi masing-masing PWNU dan PCNU untuk menindaklanjutinya paling lambat satu bulan," tegas Nusron.

Rangkaian Harlah NU di Wilayah Barat resmi berakhir hari ini. Nusron pun menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang turut menyukseskan acara, baik panitia maupun peserta.

"Kegiatan kita yang padat sejak Kamis hingga Sabtu ini tetap utuh melangsungkan 9 rangkaian kegiatan dengan sempurna," kata Nusron. "Syukur alhamdulillah tsumma alham-

dulillah," imbuh pria asal Kudus Jawa Tengah ini.

Sementara Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, pelaksanaan Harlah NU ke 99 ini selain terjaganya silaturahmi antar sesama umat muslim khususnya warga nahdliyin, hal itu juga semakin meningkatkan kekompakan anggotanya.

"Momen semacam ini tentu meninggalkan kenangan, mudah-mudahan kenangan baik seperti keamanan dan kenyamanan," kata Herman Deru disela penutupan Harla NU ke 99 H.

Apalagi, pada peringatan Harla kali ini, NU membuat program yang berpihak kepada masyarakat khususnya para petani.

"Program hutan sosial dan kelapa sawit ini merupakan langkah NU untuk berkontribusi mensejahterakan petani. Sumsel juga merupakan salah satu daerah yang turut menjadi tempat pro-

gram tersebut," tuturnya.

Upaya NU tersebut mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan. Termasuk juga para Menteri di kabinet Presiden Joko Widodo seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Tohir.

"Tapi semua program itu butuh kecekatan dan kecepatan dari para nahdliyin baik dari pengurus cabang, wilayah, pengurus besar," terangnya.

Herman Deru yang juga merupakan Mustasyar PBNU mengaku bangga dengan upaya yang dilakukan tersebut.

"Sebagai tuan rumah kami sangat berterima kasih dan bangga dengan gebrakan NU," terangnya.

Menteri BUMN Erick Tohir yang hadir secara virtual mengatakan, NU sendiri sudah banyak berperan dalam membantu kemajuan Indonesia. Sebab itu dirinya sangat mendukung program



yang akan dilakukan NU saat ini.

"99 tahun bukan hal yang sementara. Sudah banyak yang telah diperbuat NU untuk kemajuan negara ini. Kita terus mendukung upaya yang dilakukan NU," kata Erick.

Kendati begitu, lanjutnya, dalam mewujudkan kemajuan negara saat ini ada berbagai tantangan yang harus dihadapi.

Salah satunya yakni masalah kesehatan. Sebab saat ini, Indonesia masih terus berjuang melawan pandemi covid 19 yang belum berakhir.

"Lalu masalah digital yang telah

lakukan sehingga dapat menjadi ekosistem penghasil pangan dan meningkatkan kemajuan para petani," paparnya.

Sementara itu Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dari dengan para anggota perwakilan NU se-Sumatera.

"Apapun yang di rancang dan rencanakan dapat didiskusikan sehingga nanti bisa kita wujudkan bersama dan penerapannya nanti akan mampu bermanfaat bagi masyarakat banyak dan

"Mudah-mudahan dialog malam ini mampu menampung masukan-masukan dari semuanya dan akan direncanakan kedepannya sesuai dengan harapan kita semua. Nantinya kita akan memberikan arahan, monitoring, dan pelatihan bagi para petani sawit yang dalam hal ini juga merupakan anggota NU," tuturnya.

Dia juga mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Herman Deru beserta jajaran Pemprov Sumsel yang sudah bersedia menjadi tuan rumah pada pertemuan dan peringatan Harlah NU.



mengubah kehidupan kita. Kecanggihan teknologi membuat kita terbiasa melakukan berbagai pekerjaan melalui daring. Ini menyasar berbagai sektor dan persoalan lainnya yang harus dihadapi," terangnya.

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN juga terus melakukan terobosan dan inovasi sehingga upaya mensejahterahkan masyarakat segera terwujud.

"Inovasi memang harus terus kita

mendapatkan banyak kebaikan baik untuk kita yang memberikan ilmu maupun yang mendapatkan ilmunya," kata KH. Yahya

Dia juga mengatakan tema yang diambil juga merupakan hasil diskusi dari semua jajaran NU, mengingat sebagian para anggotanya merupakan petani sawit maka sudah seharusnya NU memberikan arahan hingga pelatihan bagi petani sawit yang merupakan anggota NU.

"Terimakasih pak Gubernur yang selalu mendukung setiap kegiatan NU baik itu dukungan moril maupun materil, Alhamdulillah sekali semoga kebaikan kita semua mendapatkan berkahnya," pungkasnya.

Pada Forum Silturahmi tersebut PBNU mengambil tema Halaqah Lingkungan Hidup Temu UMKM dan Petani Sawit. Dialog melibatkan utusan NU se-Sumatera diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumat-

era Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung.

Para peserta juga melakukan diskusi tanya jawab serta berdialog secara internal kepada jajaran PWNU pusat guna membahas kerangka kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing PCNU.

Bangun Perguruan Tinggi NU Sumsel

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru yang juga sebagai Mustasyar PBNU merasa bersyukur karena kegiatan Silaturahmi antara PW maupun PC NU se-Sumatera dapat berlangsung di Palembang Sumatera Selatan, dan dia berharap melalui diskusi tersebut, PW dan PC NU se-Sumatera mampu melahirkan program yang nantinya akan berperan penting dalam membangun daerah maupun bangsa.

"Saya selaku Mustasyar, memandang bahwa Nahdlatul Ulama dalam melakukan keseimbangan kemajuan antara intelektualitas moralis dan profesional religius sangat dibutuhkan dalam membangun daerah maupun bangsa," kata Herman Deru.

Pemerintah Provinsi Sumsel lanjut dia, terus akan memberikan dukungan kepada seluruh ormas keagamaan yang ada di Sumsel termasuk NU. Karena lanjut dia Keseimbangan Antara Intelektualitas, Moralitas dan Profesional Religius Kunci Dalam Membangun Bangsa.

"Pemprov Sumsel tentunya akan senantiasa memberikan dukungan kepada setiap ormas beragama di Sumsel termasuk NU yang mendirikan Perguruan Tinggi NU dan Pondok Pesantren NU dalam rangka mewujudkan Sumsel religius," tuturnya.

Herman Deru memberikan apresiasi pada forum silaturahmi yang mengambil tema peduli pada para petani sawit dan dia mengharapkan program yang diciptakan melalui diskusi ini nantinya akan bermanfaat bagi para petani sawit di setiap daerah.

"Sebagai tuan rumah, Saya dan jajaran Pemerintah Sumsel mengapresiasi dengan adanya tema yang diambil pada forum diskusi malam ini, semoga nantinya ini dapat bermanfaat bagi PW dan PC NU, dan petani sawit di setiap

daerah," pungkasnya.

Untuk diketahui, pembangunan Perguruan Tinggi NU Sumsel, yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ditandai dengan penyerahan tanah wakaf dan peletakan batu pertama pembangunan Perguruan Tinggi NU Sumsel di Pondok Pesantren (Ponpes) Ar Rahman Palembang, oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi

membangun Rumah Sakit di kawasan tersebut. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk pengabdian NU terhadap masyarakat.

Wagub Mawardi Yahya, menaruh harapan besar dengan keberadaan Perguruan Tinggi NU di Sumsel. Nanti, ia berharap akan membantu pemerintah dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.



Yahya, Kamis (3/3) lalu.

Gedung Perguruan Tinggi NU Sumsel akan berdiri di atas lahan yang cukup luas dan merupakan wakaf dari Pembina Yayasan Ar Rahman Palembang HM Sukarman Dehwana. Lahan tersebut dihibahkan langsung kepada PBNU.

Sukarman sendiri bercita-cita untuk

"Kita menyambut baik pembangunan perguruan tinggi ini. Perguruan tinggi ini akan sangat membantu pemerintah dalam melahirkan SDM yang unggul nantinya," kata Mawardi.

Pemprov Sumsel sendiri siap membantu dengan melakukan peningkatan akses jalan menuju perguruan tinggi tersebut. •

JENDERAL DUDUNG KAGUM GAYA KEPEMIMPINAN HERMAN DERU

Merangkul semua kalangan untuk bersama-sama memajukan Sumatera Selatan menjadi cara atau gaya kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Pola ini mendapat pujian langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman SE. MM yang melihat langsung pembangunan di Sumsel.

Menurutnya informasi mengenai banyaknya pembangunan tersebut didapatnya langsung dari laporan Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi.

"Menurut laporan Pangdam sejak Pak Herman Deru menjadi Gubernur, banyak pembangunan di Sumsel dan ini luar biasa," ujar mantan Dandim Palembang tersebut.

Dudung ternyata tak kaget lagi soal itu. Dalam sambutannya Jenderal bintang empat itu bahkan mengaku kenal betul gaya kepemimpinan Herman Deru yang dinilainya patut ditiru pejabat lain.

"Pak Herman Deru ini terkenal sekali

bagaimana hubungannya dengan para unsur Muspida (Forkopimda). Kalau istilah nya itu "Ngopeni" (bahasa Jawa = menjaga). Jadi itu gak aneh buat saya. Dua kali jadi Dandim disini dan Lubuklinggau rasanya gak ada Gubernur yang seperti itu," tegasnya singkat.

Dibincangi usai ramah tamah, Dudung mengaku senang betul bisa kunjungan kerja sekaligus pulang kampung ke Palembang. Pasalnya ia sudah sangat familier betul dengan warga dan adat istiadat Palembang.

"Rencana Kunker ke Kodam II ini sebenarnya sudah lama tapi sempat tertunda beberapa kali karena kesibukan. Padahal sudah Saya incar-incar betul," ujarnya.

Kebetulan juga mertua Jenderal Dudung merupakan warga asli Belitang OKU Timur. Sehingga selain Kunker meresmikan beberapa bangunan dan mengisi kuliah umum di Unsri, ia juga sekalian mudik dan bernostalgia.

Dengan kepiawaian Gubernur Sumsel H. Herman Deru yang demikian dicintai rakyatnya, Dudung optimis Sumsel akan semakin maju dan berkembang.

"Selama Saya bertugas disini saya gak pernah ada demo. Semoga ini terus terjaga karena masyarakatnya berpikir sangat maju. Dan buktinya banyak putra asli daerah yang sekarang banyak menduduki jabatan penting di tingkat pusat," ujarnya.

Sesuai edaran yang dikeluarkannya, Dudung pun memastikan bahwa TNI



selalu hadir dan memberikan solusi bagi masyarakat.

Sementara itu Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan sangat bangga dengan prestasi yang berhasil ditorehkan Jenderal Dudung sebagai KSAD TNI saat ini.

Demikian halnya mengenai kedatangannya Jenderal Dudung kali ini diakuinya sangat istimewa baik bagi Kodam II Sriwijaya maupun masyarakat umum.

"Bagi Jenderal ini mungkin tidak asing lagi. Tapi bagi kami ini sangat istimewa," tuturnya.

Lebih jauh Herman Deru dalam sambutannya sempat bercerita bahwa ia dan Jenderal Dudung sebenarnya sudah cukup lama kenal dan dekat. Apalagi mertua Jenderal Dudung terkenal cukup dekat dengan ayah kandungnya H. Hamzah yang merupakan Pasirah legendaris di Belitang OKU Timur.

Iapun berharap dalam Kunkernya ini Jenderal Dudung dapat meresmikan bangunan Korem 044 Gapo, yang direnovasi atas usulan Pangdam II Sriwijaya dan bantuan Pemprov.

"Kita juga mohon arahan Jenderal mengenai pembangunan rumah sakit di sekitar areal Puslatpur tentu ini akan memudahkan masyarakat di 5 kabupaten yang ada disekitarnya," tambahnya lagi.

Di bawah bimbingan Kasad TNI Jenderal Dudung Abdurachman, Herman Deru juga berharap Sumsel dapat selalu mempertahankan statusnya sebagai Provinsi Zero konflik di Indonesia.

"Tidak ada konflik di masyarakat. Alhamdulillah semua bersatu dengan baik dan terkendali di bawah bimbingan Pak Kasad tentunya," jelas Herman Deru.

Beri Kuliah Umum di Unsri

Ada beberapa agenda kerja yang dilakukan Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat melakukan kunjungan kerjanya di Palembang, salah satunya memberikan kuliah umum dihadapan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri).

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam kuliah umumnya mengatakan, dia sengaja untuk datang ke sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia guna memberikan pencer-

ahan pemikiran kepada para mahasiswa-mahasiswi sebagai penerima tongkat estafet meneruskan pembangunan bangsa ini ke depan.

Apalagi lanjut dia berdasarkan data penggunaan internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta pengguna. 145,4 juta pengguna diantaranya merupakan generasi Z dan milenial.

"Pesatnya penggunaan internet juga

gan dibanyak negara. Indonesia menduduki peringkat 99 dari 179 negara," ungkapnya.

Lebih jauh Dudung menguraikan, semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara tidaklah mudah. Terlebih ancaman kedepan yang dihadapi bangsa ini lebih kompleks. Persatuan dan kesatuan terus diuji termasuk ancaman internal karena itu



berdampak pada berkembangnya berita bohong, dengan menggunakan platform media. Mempengaruhi opini masyarakat yang digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.

Dudung mengakui, sekarang kebohongan dapat menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan, dan kelompok ini menggunakan media sosial yang didanai pihak pemecah belah.

"Indeks kerentanan pada tahun 2021 terjadi konflik yang berkepanjangan

karakter bangsa Indonesia dapat digunakan dalam menghadapi ancaman internal tersebut.

"Peran mahasiswa dalam memperkuat karakter bangsa, selaku agen perubahan menjaga nilai karakter bangsa. Mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Mahasiswa juga sebagai pemersatu bangsa, Pengontrol sosial yang memiliki kontrol sosial terhadap masyarakat berbangsa dan bernegara," pungkasnya. ●



DEMI SWASEMBADA BERAS, SIAPKAN 4.000 HEKTARE LAHAN

► Bupati: Kaubun dan Karangas Sentra Produksi Padi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berencana mencetak lahan sawah seluas 4.000 hektare di beberapa kecamatan potensial. Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan beras yang mencapai 39 ribu ton per tahun. Saat ini, luas lahan sawah di Kutai Timur yang sudah ada seluas 2.500 hektare.



Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kaubun, 7 Maret 2022, menjelaskan, peningkatan produksi padi akan dilakukan dengan dua cara, baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Secara ekstensifikasi, pemerintah

berencana mencetak sawah baru seluas 4.000 hektare yang dilakukan secara bertahap di beberapa kecamatan potensial. Sementara, secara intensifikasi, Pemkab Kutim akan memperbaiki dan meningkatkan saluran drainase, peningkatan jalan usaha tani, pemberian bantuan bibit dan pupuk, serta alat produksi pertanian.

"Selama ini, dua kecamatan sentra produksi padi, yakni Kaubun dan Karangas, belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat Kutim. Ke depan, ada rencana perluasan lahan sawah di beberapa lokasi potensial yang diharapkan bisa menambah produktivitas padi di Kutim, sehingga bisa menurunkan impor be-



produk beras Kaibun juga mampu bersaing dengan beras impor karena pengolahan pertaniannya sudah profesional dan memadukan teknologi. Namun, menurutnya, beras dari Kecamatan Kaibun saja tidak cukup untuk memenuhi kemandirian pangan di Kabupaten Kutim.

"Dinas Pertanian Kutim sudah mengutak-atik, ternyata kita masih membutuhkan lahan yang cukup besar untuk memenuhi kemandirian pangan daerah. Diperkirakan Kutim membutuhkan lebih dari 4.000 hektare sawah untuk bisa mandiri dari segi kebutuhan pangan terutama beras," ucapnya.

Ardiansyah menyatakan, pertanian menjadi tumpuan pangan dan pertumbuhan ekonomi bagi semua daerah, termasuk Kutim. Surplus beras tahun 2021 bakal menjadi pendorong pihaknya untuk terus memaksimalkan sektor pertanian.

Dia berharap Dinas Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (PPPP) dapat meningkatkan pertanian di Kutim. "Oleh karena itu, saya sangat berharap kepada penyuluh yang memiliki tugas di lapangan. Guna mencapai target program yang disusun oleh Dinas Pertanian dalam meningkatkan hasil pertanian di Kutim," ujarnya.

ras dari luar," terang Ardiansyah.

Dia mengatakan, perubahan perilaku petani yang lebih suka berkebun kelapa sawit dari pada bertani padi sawah juga mempengaruhi produktivitas beras di Kutim. Sehingga menyebabkan beralihnya fungsi lahan sawah menjadi lahan sawit.

"Padahal dengan cara begitu turut mempengaruhi produksi beras kita," ujarnya.

Ardiansyah menambahkan, Pemkab Kutim juga bakal menjadikan Kecamatan Kaibun dan Kecamatan Karang sebagai sentra pengembangan ekonomi berbasis pertanian di Kabupaten Kutim.

Menurutnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kutim memiliki perhatian khusus terhadap dua kecamatan tersebut. Kecamatan Kaibun dikenal dengan produk berasnya yang setiap tahun surplus, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh Kabupaten Kutim

sendiri.

Dengan produk beras yang surplus, Kaibun menjadi salah satu kecamatan yang menopang kebutuhan pangan di Kutim, meskipun belum sepenuhnya mandiri.

"Beras yang sekarang banyak beredar di tengah-tengah masyarakat Kutai Timur, salah satunya berasal dari Kecamatan Kaibun," ungkap Ardiansyah.

Dia menuturkan,

**Bupati Kutai Timur,
Ardiansyah Sulaiman**



Ardiansyah mengungkapkan, Kabupaten Kutim saat ini tengah masuk pada tahun kelima dari 25 tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Memasuki tahun terakhir ini, berarti sudah saatnya Kutim mengimplementasikan RPJP tersebut.

Menurutnya, agribisnis dan agroindustri menjadi desain global yang diterapkan dalam desain RPJP yang memungkinkan adanya perkembangan dan

pembangunan daerah di bidang pertanian.

"Pertanian tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan petani, tetapi juga menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi kita di Kutim," tegasnya.

Dia menyebut, pemerintah juga akan terus mendorong Kutim menjadi agroindustri sesuai dengan rencana awal pada saat Kutim didirikan. "Para

antaranya adalah luas lahan. Setelah dikalkulasikan besar jumlah penduduk dan kebutuhan beras per kapita per tahun, maka kita masih membutuhkan tambahan lahan sawah seluas 4.000 hektare, dari yang sudah ada sekarang ini 2.500 hektare. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan lahan ini swasembada beras di Kutim bisa terpenuhi," papar Dyah.



petani diharapkan lebih banyak mendapatkan manfaat. Mereka pastinya membutuhkan uluran tangan kita semua yang memiliki tugas melakukan kebijakan di lapangan," terangnya.

Kepala Dinas Pertanian Kutim, Dyah Ratnaningrum, menjelaskan, selama ini kebutuhan beras di Kutim masih dipasok dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Penyebabnya, produksi beras lokal belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kutim.

"Belum maksimalnya produksi beras lokal disebabkan beberapa hal. Satu di

Dyah menegaskan, pihaknya akan menjalankan instruksi dari Bupati Kutim untuk lebih banyak mendorong eksistensi lahan di berbagai kecamatan yang belum banyak difungsikan.

"Kita akan dukung dengan sarana dan prasarana yang ada untuk lebih menggeliatkan lahan sawah fungsional," tegasnya.

Dyah menjelaskan, di Kecamatan Kaibun terdapat lahan sawah seluas 700 hektare dan paling besar di Kutim. Lahan tersebut mampu menghasilkan kurang lebih 290 ton beras dalam

sekali panen. Sedangkan, di Kecamatan Karangan akan mendukung penuh program kecamatan yang menginisiasi program 'satu kepala keluarga (KK) satu kapling sawah'.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim, Safuad, menyebutkan, Kecamatan Kaibun selalu surplus produksi beras selama beberapa tahun terakhir. Namun, hal ini juga menjadi persoalan tersendiri bagi petani di daerah tersebut.

Menurut Safuad, masyarakat menyampaikan bahwa produksi beras mengalami surplus produksi hingga kurang lebih 1.725 ton sekali panen. Petani yang masuk dalam sejumlah kelompok tani mengungkapkan, surplus tersebut justru memicu kebingungan terutama soal bagaimana memasarkan hasil panen.

"Jadi di beberapa desa di Kaibun, petani bingung menjual hasil panennya. Bayangkan kalau tiga kali panen bisa lima ribu ton lebih. Untuk itu, saya minta pemerintah harus hadir dalam persoalan ini," kata Safuad, Selasa (8/3/2022).

Politisi PDIP ini mengharapkan, hasil pertanian itu dapat dinikmati oleh masyarakat Kutim sendiri dan mampu mendukung swasembada pangan. Dengan catatan tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani lokal.

"Secara bisnis petani jangan sampai merugi. Kita harus mandiri kan selama ini kita masih impor beras dari daerah lain di luar Kaltim. Kalau bisa mandiri pangan, kenapa kita harus ambil dari luar," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, mendorong agar perusahaan dapat membeli beras lokal untuk membantu petani. Bahkan sebelumnya, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai sudah diminta untuk membeli beras petani untuk konsumsi sehari-hari.

"Terus kita dorong agar beras dari Kaibun ini memiliki pangsa pasar demi membantu meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan petani. Kami juga dorong agar perusahaan bisa membeli beras lokal. Tidak perlu repot beli beras dari luar karena hasil panen di daerah sudah melimpah," paparnya. ●

nfo Sumsel Network

www.infosumsel.id

INOVASI UNTUK NEGERI



INFO PASANG
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Social media

 **WEBSITE:** @infosumsel.id
 **facebook** : @infosumsel.id  **twitter** : @id_infosumsel
 **Instagram** : @infosumsel_id  **YouTube** : info sumsel

Palembang
Jl. Puncak Sekuning, Lorong Sahabat
Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30126

Telp : 0711-7442344
Email : infosumsel.redaksi@gmail.com



MENAMPUNG ASPIRASI MEMULIHKAN EKONOMI PASCA PANDEMI

Pemkot Tangsel Alokasikan Anggaran Rp400 Juta Tiap Kelurahan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai menyusun program kerja untuk tahun 2023 dengan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Usulan dari tujuh kecamatan dan 31 organisasi perangkat daerah ditampung untuk perencanaan pembangunan tahun depan.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menuturkan, Musrenbang adalah amanat undang-undang untuk pembangunan. Salah satu yang harus dimaksimalkan adalah pembangunan ekonomi.

Benyamin menyatakan, camat dan lurah dapat memaksimalkan pembangunan di daerahnya dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Selain itu, bisa juga memanfaatkan kehadiran

investor melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Ciputat, Benyamin mengatakan, Pemkot Tangsel pada 2021 telah menjalankan program penerangan jalan umum di 442 titik dan pembangunan stadion mini Ciputat tahap ketiga.

"Revitalisasi Pasar Ciputat tahap kedua, penanganan rumah tidak layak huni, renovasi TPS3R di empat lokasi, ruang terbuka hijau, penanganan kawasan kumuh, bedah rumah, pen-

anganan prasarana, sarana dan utilitas, penanganan banjir, pembangunan drainase," kata Benyamin di Aula Kecamatan Ciputat, 9 Maret 2022.

Dalam kesempatan itu, Benyamin juga menerima laporan masih banyaknya warga yang buang air besar sembarangan (BABS). Perilaku tak sehat tersebut ternyata hampir tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangsel.

Benyamin mengaku warga yang BABS tersebut masih dapat ditemui di sejumlah sudut Kota Tangsel, seperti

wilayah Ciputat, Setu, dan lainnya. "Bukan di Ciputat saja, Setu ada, Serpong ada. Ada di kecamatan lain juga. Saya jumlah tidak begitu hafal," kata Bang Ben.

Menurutnya, kebiasaan buruk tersebut bukan hanya menyangkut permasalahan ekonomi. Namun juga karena rendahnya kesadaran masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

"Ya itulah salah satu target pembangunan kita. Masyarakat juga harus membangun kesadarannya. Saya yakin ini tidak murni permasalahan ekonomi. Ini permasalahan habit, kebiasaan," ujarnya.

Untuk itu, kata Bang Ben, selain menyediakan bantuan fisik berupa pem-

“

Revitalisasi Pasar Ciputat tahap kedua, penanganan rumah tidak layak huni, renovasi TPS3R di empat lokasi, ruang terbuka hijau, penanganan kawasan kumuh, bedah rumah, penanganan prasarana, sarana dan utilitas, penanganan banjir, pembangunan drainase.

angunan sanitasi yang layak, dia juga akan fokus untuk melakukan sosialisasi terkait pola hidup sehat kepada masyarakat.

"Makanya kita intervensi dulu. Fisik kita siapin, tapi sosialisasi dulu. Tingkatkan sosialisasi untuk jangan buang air di jamban apung. Saya lagi intervensi terus nyari CSR dan perbankkan untuk bikin itu. Saya juga menggandeng TNI Polri untuk sosialisasinya. Membangun kesadaran yang penting," terangnya.

Camat Ciputat, Bachtar Priyambodo, mengaku di wilayahnya terdapat sekitar 118 kepala keluarga yang masih

berperilaku demikian. Paling banyak ada di Kelurahan Jombang dengan 86 KK.

Dia menjelaskan, saat ditinjau ternyata ada beragam alasan yang membuat warganya berperilaku demikian, terutama di Kelurahan Jombang.

tuk di Cipayang itu kosong. Kemudian informasi terakhir, di Kelurahan Ciputat juga sudah ada bantuan, jadi mol. Jadi memang paling banyak Jombang, makanya kita fokus," ujarnya.

Bachtar bilang, salah satu solusi permasalahan tersebut adalah dengan



"Jadi ada yang memang kebiasaan. Kayak ada orang yang sudah sepuh, enggak biasa buang di MCK gitu ya. Ada pula yang memang sebenarnya closet punya, tapi dia buang di sungai. Nah, banyak itu di Jombang. Memang letaknya di bantaran kali," terangnya.

Bachtar mengatakan, selain di Jombang, kondisi serupa juga ditemui di wilayah lainnya. "Memang tersebar. Un-

mencarikan bantuan pembangunan fisik kepada beberapa CSR dan perusahaan-perusahaan lain.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menyatakan, Pemkot Tangsel akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta kepada setiap kelurahan pada 2022 dengan target pemulihan ekonomi usai pandemi.

• INFO TANGSEL

“Yang masuk ke dalam perhitungan adalah memajukan ekonomi kreatif di Kota Tangsel, ditambah dengan ekonomi kecil dan menengah yang sangat butuh perhatian dari pemerintah,” kata Pilar.

Dia mengatakan, saat ini pertumbuhan ekonomi di Tangsel pada angka empat persen. Angka ini diprediksi akan kembali naik hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang pernah diraih yakni enam persen. “Kita pastikan program pemulihan ekonomi terus dioptimalkan,” katanya.

fokus dalam pembangunan di bidang pendidikan. Saat ini, sudah ada pengajuan pembangunan sekolah negeri di beberapa kelurahan. Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihaknya akan berusaha menentukan pembangunan sekolah mana yang sifatnya mendesak.

Saat hadir di Musrenbang di Kecamatan Pondok Aren, 8 Maret 2022, Pilar mengatakan, Musrenbang merupakan momen di mana ide pembangunan yang berasal murni dari masyarakat dapat diserap oleh pemerintah.

akukan pemetaan dulu. Salah satunya ekonomi di masyarakat itu sedang membutuhkan apa. Bahkan, kita juga punya program untuk memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Pilar, seluruh usulan tersebut akan menjadi dasar target pemerintah dalam membangun wilayahnya. Musrenbang ini dinilai mampu menjadi titik balik dalam mengembalikan perekonomian masyarakat yang sempat merosot akibat pandemi COVID-19 beberapa waktu terakhir. “Penanganan masalah ekonominya bisa kita maksimalkan,” imbuhnya.



Dia menuturkan, sambil terus berupaya memastikan program pemulihan ekonomi, Pemkot Tangsel juga terus meningkatkan imun masyarakat dengan menyelenggarakan vaksinasi.

Hingga awal Maret, distribusi vaksinasi untuk tahap satu mencapai 99,6 persen. Sementara, untuk tahap kedua mencapai 88,5 persen. Pilar optimistis vaksinasi di Tangsel akan mencapai 100 persen.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga

“Usulan kami dengar murni dari masyarakat, kebutuhannya seperti apa. Karena kan RT dan RW lebih tau terkait kondisi lingkungan,” ujar Pilar.

Dia menjelaskan, terdapat beberapa usulan program dari masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai program pemberdayaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Ada pembangunan infrastruktur. Nah nanti dari kelurahan harus mel-

malkan,” imbuhnya.

Menjaga Lingkungan Bersih

Dalam membangun Kota Tangsel, Pemkot juga mulai melakukan uji emisi terhadap kendaraan pribadi untuk memastikan masyarakat menggunakan kendaraan yang layak pakai.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menjelaskan, uji emisi dilakukan untuk mengukur kelayakan kendaraan yang dimiliki masyarakat guna

mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan mesin kendaraan. Sebagai bentuk pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan dalam uji emisi, maka setiap kendaraan akan dibebankan biaya sebesar Rp10.000.

Menurut Pilar, uji emisi di Kota Tangsel akan dilakukan secara berkala dan akan bekerja sama dengan beberapa tempat di wilayahnya.

"Memang dari tahun 2021 kami sudah mencanakan untuk menangani masalah energi fosil dan juga masalah lingkungan. Upaya yang kami lakukan

bahwa uji emisi yang dilakukan di Tangsel tetap bisa dimanfaatkan di DKI Jakarta," ujarnya.

Pilar menjelaskan, uji emisi dilaksanakan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mau memperbaiki atau memperbaiki kendaraannya supaya tidak berdampak terhadap lingkungan. Kendati demikian, pihaknya belum akan menerapkan uji emisi sebagai salah satu kewajiban kendaraan di Tangsel.

"Belum sampai sana (penerapan sanksi), karena ini harus ada peraturan

bagus. Mungkin ke depan kalau kondisinya sudah pulih, lambat laun pemkot Tangsel akan menerapkan perda terkait penggunaan mobil yang lolos uji emisi," paparnya.

Namun, dia mengimbau warga Tangsel untuk melakukan uji emisi. Sebab, hasil uji emisi di Tangsel tetap bisa digunakan di DKI Jakarta. Nantinya, setelah warga melakukan uji emisi mereka akan mendapatkan sticker dan barcode yang bisa di akses karena sudah ada link yang menghubungkan ke Dishub Tangsel.



adalah uji emisi," katanya.

Dia menambahkan, saat ini diketahui DKI Jakarta memberlakukan uji emisi yang wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Memahami bahwa banyak masyarakat Kota Tangsel yang masif melakukan mobilisasi ke Jakarta, maka uji emisi ini bisa dilakukan untuk warga yang rutin mengunjungi Jakarta.

"Karena kita sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta

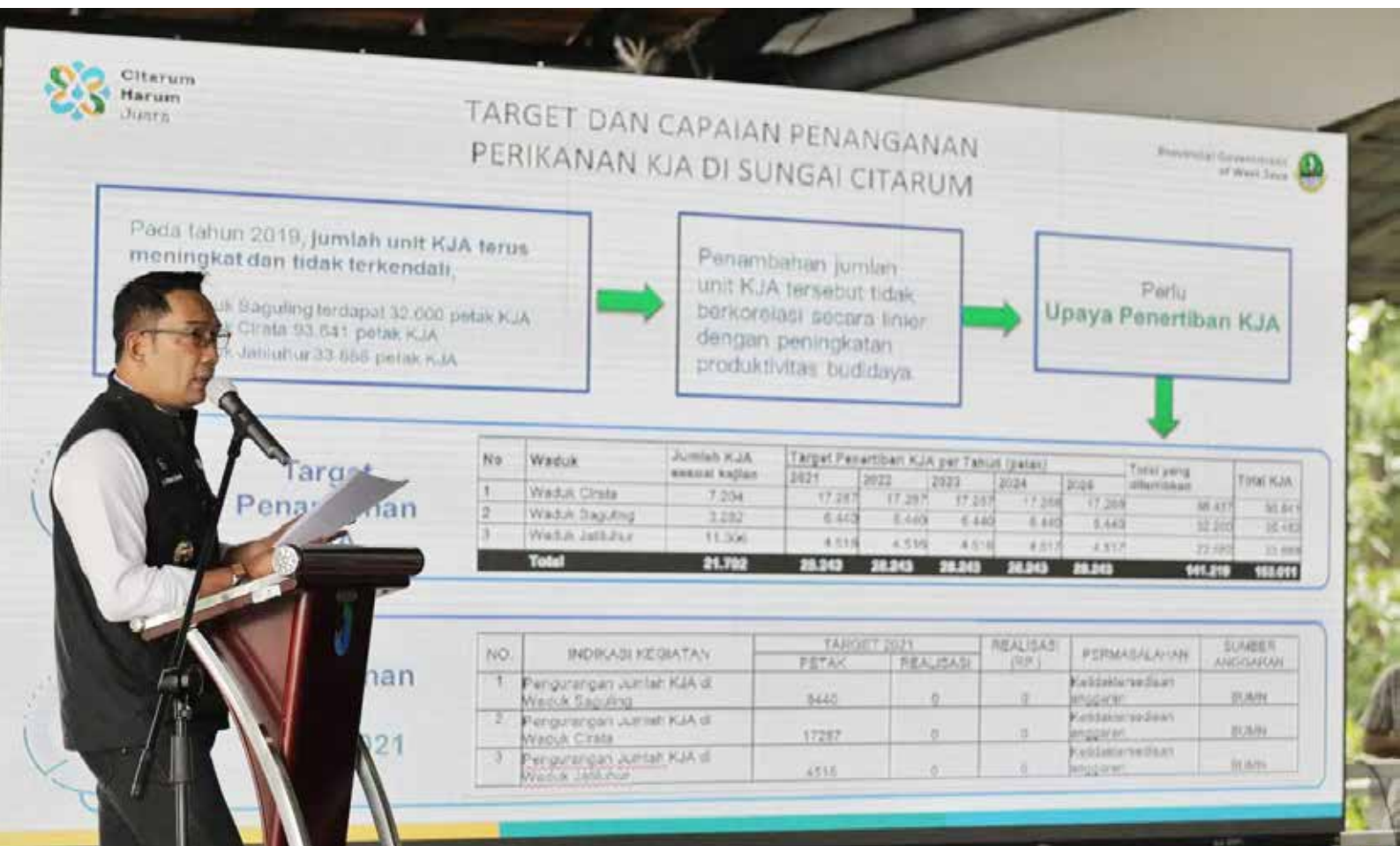
daerah, kalau untuk uji emisi setahun sekali. Langkah selanjutnya apakah ada pembatasan atau apa, itu terus kami diskusikan untuk jangka waktu yang lebih panjang," terangnya.

Pilar beralasan, belum diberlakukannya sanksi terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi, karena saat ini pihaknya tengah fokus pemulihan ekonomi nasional. Karena itu perlu dilakukan banyak pengembangan.

"Kondisi masyarakat juga lagi kurang

"Bahwa dia benar sudah melakukan uji emisi dan lulus. Karena Dishub Tangsel sudah berkoordinasi dengan DKI, sehingga bisa dimanfaatkan. Alatnya sama, metodenya sama," terangnya.

Kepala Dinas Perhubungan Tangsel, Chaerudin, menjelaskan, sejak Februari hingga 7 Maret 2022 sudah ada 72 kendaraan yang melakukan uji emisi. "Dari 72 yang kami uji, ada dua kendaraan yang tidak lulus," ungkapnya. ●



SUNGAI CITARUM SEMAKIN HARUM

Ridwan Kamil: Kualitas Air Membaik dalam Empat Tahun

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan saat ini kondisi Sungai Citarum sudah membaik dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Selain statusnya sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat, sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi 18 juta warga di 13 kabupaten/kota di Jabar yang dilintasi DAS Citarum. Sungai Citarum juga vital bagi kemakmuran 682.227 hektare lahan sawah di 1.454 desa.

Pemerintah telah menetapkan ultimate goal sebagai indikator dan target keberhasilan utama dari pelaksanaan rencana aksi PPK DAS Citarum, yakni Mutu Air Kelas II, atau setara dengan nilai IKA sebesar 60 poin yang ditargetkan dapat tercapai pada akhir 2025.

"Kondisi awal Sungai Citarum pada 2018 adalah cemara berat, setara IKA

33,43 poin. Selanjutnya pada akhir 2021, kondisinya membaik dengan kualitas mencapai 50,13 poin atau cemara ringan," kata Gubernur Jawa Barat saat menerima kunjungan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, di Kabupaten Purwakarta, 15 Maret 2022.

Kang Emil, sapaannya, menjelaskan, mutu air kelas II ini memungkinkan air tersebut digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama.

Gubernur yang juga menjabat

Komandan Satgas Citarum Harum ini mengatakan, dengan kondisi air yang kini sudah membaik, maka ultimate goal menuju Mutu Air Kelas II hampir tercapai. Pemprov Jabar dan Satgas Citarum akan terus berupaya agar IKA Sungai Citarum sebesar 9,87 poin lagi bisa tercapai dalam waktu dekat.

Dia menyatakan, terdapat 31.700,39 hektare lahan kritis di sepanjang aliran DAS Citarum yang telah dihijaukan. Angka ini di atas dari target 2021 yang hanya mencapai 15.647,45 hektare. Sementara, target 2025 bisa menghijaukan 80.174,99 hektare lahan.

Pada Penanganan Limbah Peternakan, Satgas Citarum telah menan-

gani limbah, khususnya sapi sebanyak 26.947 ekor sapi. Angka ini lebih banyak dibandingkan target 2021 sebanyak 26.864 ekor sapi. Sedangkan, target 2025 sebanyak 53.052 ekor sapi.

Untuk Penanganan Keramba Jaring Apung, Satgas Citarum berhasil dalam program penanganan KJA. Hingga 2021 telah menangani KJA yang angkanya mencapai 33.868 unit dari target 28.243 unit. Sementara pada 2025 penanganan ditargetkan bisa mencapai 141.219 unit.

Pada program pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, Satgas Citarum berhasil membereskan genangan air tersisa sebesar 90 persen dari target 70 persen. 0,7 m3/d penambahan air baku dari target 1,4 m3/d dan empat lokasi destinasi wisata air dari target lima lokasi. Target 2025 diharapkan membereskan luas genangan tersisa mencapai 20 persen, penambahan air baku 3,7 m3/d dan lima lokasi destinasi wisata.

Pada sisi penegakan hukum, terdapat 204 kasus pengaduan dari target 455 kasus. Sebanyak 34 kasus perdata/pidana dari target 29 kasus, serta 87 kasus sanksi administratif dari target 105 kasus.

Kang Emil memaparkan, progres Program Citarum Harum, salah satunya terkait penanganan sampah mengalami kemajuan, di mana mencapai sekitar 2.800 ton per hari. Dia mengatakan, hampir sepertiga wilayah Jawa Barat terkena dampak yang besar dari Sungai Citarum.

"Dari target 3.000 ton sampai saat ini sampah yang ditangani sudah mencapai 2.800 ton per hari. Tinggal sedikit lagi target tercapai, juga tentunya dengan zero waste program yang terus kita tingkatkan," ujarnya.

"Jawa Barat mengalami dampak luar biasa dari Citarum, di antaranya penghasilan listrik, irigasi, bahkan sumber air Jakarta juga semuanya dari Citarum lewat Waduk Jatiluhur," terangnya.

Kang Emil juga menyinggung indeks kualitas air Citarum yang masuk kategori cemar ringan dengan skor 60. Capaian ini berkat kerja semua pihak, termasuk dari para komandan sektor. Sehingga indeks kualitas air Citarum dari cemar berat telah menjadi cemar ringan.

Dampak dari kemajuan kualitas air Citarum ini terlihat pada dua fenomena sosial yang dapat disaksikan dari mun-

culnya aktivitas di sekitar sungai. "Dua fenomena sosial terjadi, ikan-ikan yang dulu hilang hadir lagi, dan anak-anak kampung bisa berenang lagi pada kondisi sungai yang telah mengalami perbaikan," ujarnya.

Kang Emil juga mengapresiasi bantuan dari World Bank untuk percepatan Program Citarum Harum. "Dengan adanya bantuan dari World Bank sebesar USD100 juta, diharapkan seperti di Kabupaten Bandung pengelolaan air limbah domestik untuk tahun depan, Insya Allah bisa tercapai sesuai dengan target," katanya.

Kang Emil pun mengapresiasi 78 institusi pendidikan yang turut berga-

dari Jerman untuk membiayai sebagian penggunaan teknologi IPAL Bojongsoang.

"Apapun yang kita buat di sini harus bisa dirasakan manfaatnya, bukan hanya oleh masyarakat Kota dan Kabupaten Bandung, tapi juga untuk kawasan Bandung Raya," kata Luhut.

Luhut menuturkan progres pelaksanaan Program Citarum Harum IPAL sudah mencapai 80 persen. "Kunjungan ini merupakan salah satu bagian dari Program Citarum Harum. Dari laporan yang saya terima tingkat kebersihan Sungai Citarum termasuk penekanan banjirnya sudah mencapai 80 persen. Sisa 20 persen lagi," kata dia.



bung memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Program Citarum Harum. "Jumlah ini sudah sangat jauh, lima kali lipat dari target, dengan adanya penambahan 24 komunitas yang terlibat," tuturnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memuji kreativitas dan inovasi berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang diterapkan dalam Program Citarum Harum. Instalasi tersebut milik Perumda Tirta Wening Kota Bandung yang berada di Desa Cikoneng, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Luhut meninjau IPAL Bojongsoang, sekaligus melihat progres penanganan Sungai Citarum terkait rencana bantuan

Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan pelaksanaan program ini hingga 100 persen agar bisa menghadirkan manfaat untuk menekan banjir. Dia mengatakan hasil pengolahan limbah di IPAL Bojongsoang sudah 100 persen bersih saat dibuang ke Sungai Citarum.

la mengatakan pemerintah akan membangun panel solar cell di atas air Danau Retensi Cieunteung yang memiliki luas 8,7 hektare dan Danau Andir seluas 4,7 hektare.

"Dari dua danau ini bisa menghasilkan listrik solar cell sebesar 100 MW, yang menghasilkan karbon kredit senilai USD 10,4 juta per MW atau bisa digunakan juga untuk energi listrik bagi pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya," kata dia. ●

PULIHKAN EKONOMI BARU DARI BALI PASCA PANDEMI

Visa on Arrival Naikkan Kunjungan Wisman ke Pulau Dewata

Pemerintah menyatakan tengah serius memulihkan sektor pariwisata di Pulau Dewata sebagai bagian dari ekonomi baru pasca pandemi COVID-19. Ekonomi baru yang dimaksud ialah go digital, lebih peduli aspek kesehatan, aspek kebersihan, serta aspek keberlanjutan lingkungan.



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan, sejak 7 Maret 2022, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tanpa karantina dan uji coba pembukaan wisatawan mancanegara datang ke Bali. Selama seminggu, kebijakan tersebut dinilai

sukses karena tidak ada kenaikan jumlah kasus pengidap COVID-19.

"Karena tidak ada kenaikan kasus, maka akan diperluas ke wilayah lain di Indonesia," kata Sandiaga.

Begitu pula dengan fasilitas visa kunjungan saat kedatangan atau Visa on Arrival (VoA) khusus wisata yang resmi dibuka untuk wisman dari 23 negara

yang hendak mengunjungi Bali. VoA akan diperluas ke negara lainnya, seperti Tiongkok dan India. Ia juga mengaku telah mengajukan negara yang tergabung dalam ASEAN agar memperoleh VoA.

"Selama ini, VoA banyak ditunggu karena dari segi kemudahan wisatawan masuk ke Bali. Ini salah satu poin yang harus kita selesaikan. Kami akan terus

mendorong pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi PeduliLindungi sebagai bagian dari kesiapan dan perbaikan sektor ekonomi kreatif menyambut kembali wisatawan mancanegara,” ujar Sandi.

Berdasarkan data 3 Februari-12 Maret 2022, terdapat hampir lima ribu Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke Bali, di mana 76 persen di antaranya merupakan wisman.

Seiring bertambahnya jumlah maskapai yang hendak masuk ke Bali, antara lain Singapore Airlines yang menambah jumlah penerbangan, maskapai baru seperti Emirates dan maskapai dari Australia, Sandi sangat optimistis pemulihan pariwisata Bali akan dimulai tahun ini.

“Pemulihan pariwisata di Bali mudah-mudahan bisa membawa kita ke era baru pariwisata CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability) dan fokus terhadap nature and culture (alam dan budaya),” ujarnya.

Sandi menyebut, peningkatan jumlah wisman ke Bali ikut mempengaruhi tingkat okupansi hotel di yang tumbuh 10-20 persen. “Ini sangat ditunggu-tunggu karena berkaitan dengan kesiapan menuju beberapa event atau kita sebut sebagai side event untuk G20,” imbuhnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan, uji coba tanpa karantina di Bali dalam seminggu terakhir berhasil mendongkrak kunjungan wisman ke Pulau Dewata. Luhut juga menyebut tingkat positivity rate PPLN dalam uji coba tanpa karantina mencapai level yang rendah, yakni di bawah satu persen.

“Namun, kami masih akan melakukan evaluasi selama satu minggu ke depan, sebelum kebijakan ini diterapkan di seluruh Indonesia,” katanya.

Koordinator PPKM Jawa Bali itu mengatakan, sejalan dengan uji coba tersebut, penerapan Visa on Arrival juga turut mendongkrak kenaikan kunjungan wisman.

Sejak 7 Maret 2022, kata dia, total kedatangan PPLN dengan Visa on Arrival sebanyak 449 pax (penumpang), dengan total PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp224 juta.

Meski dibuka tanpa karantina, ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi, yakni PPLN yang datang harus menun-

jukkan bukti booking hotel yang sudah dibayar minimal empat hari, atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. PPLN yang masuk juga harus sudah divaksinasi lengkap/booster dan harus melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar.

Setelah negatif, mereka bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian, PPLN

lainnya seperti Jakarta dan Surabaya,” katanya dalam konferensi pers daring terkait PPKM yang dipantau di Jakarta, Senin (14/3/2022).

Khusus untuk Bandara Juanda, Surabaya, akan kembali beroperasi untuk keberangkatan dan kedatangan PPLN Non PMI (Pekerja Migran Indonesia), termasuk bagi jemaah umroh. Luhut menyebut semua persiapan untuk men-



Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine



Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah

kembali melakukan PCR test di hari ketiga di hotel masing-masing. PPLN juga telah atau tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin COVID-19 sesuai ketentuan.

Luhut mengatakan pemerintah juga berencana memperluas penerapan Visa on Arrival di bandara lain di Indonesia untuk mendongkrak kunjungan wisman. “Pemerintah juga akan menerapkan Visa on Arrival di beberapa bandar udara

karantina dan isolasi hingga kesiapan petugas di lapangan sudah dikoordinasikan dengan sangat baik.

“Beroperasinya Bandara Juanda untuk PPLN non PMI akan berdampak positif bagi ekonomi Jawa Timur,” tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham telah menerbitkan 447 visa on arrival sejak dibuka 7 Maret 2022 bagi wisatawan dari beberapa ne-

gara.

"Fasilitas VOA diberikan kepada 23 negara yang memenuhi kriteria, seperti high tourism spender, memiliki akses penerbangan yang mudah ke Bali, memiliki kebijakan karantina yang mudah bagi pelaku perjalanan luar negeri, serta negara di wilayah ASEAN," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh, Selasa (15/3/2022).

Pada hari pertama pembukaan layanan VOA khusus wisata, kata dia, persentase pengguna sebanyak 4,46

menggunakan VOA khusus wisata. Misalnya, kebijakan karantina di negara asal, kemudahan mendapatkan asuransi dari negara asal, dan preferensi wisatawan.

"Pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kebijakan VOA khusus wisata ke Bali ini," kata dia.

Beri Layanan Terbaik

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Trisno Nugroho, mengatakan, pemberlakuan kebijakan PPLN ke Bali tanpa karantina harus diiringi layanan yang terbaik dalam berbagai aspek.

yatakan di Bali memang baik dan lebih baik lagi pasca-COVID-19," ujar Trisno.

Di samping itu, dia menyarankan Bali juga menyampaikan pada pemerintah pusat agar bisa terus mempromosikan dan mengenalkan kembali Bali ke dunia internasional.

"Akomodasi wisata di Bali sudah mengantongi sertifikat CHSE, yakni cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (kelestarian lingkungan) dan juga sudah ada perbaikan destinasi wisata," ucapnya.



Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

persen dari total WNA yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Negara yang paling banyak menggunakan fasilitas tersebut, antara lain Australia 76 orang, Singapura 64 orang, Amerika Serikat 47 orang, Belanda 44 orang, dan Malaysia 39 orang. Sementara itu, beberapa subjek negara yang terpantau belum menggunakan VOA khusus wisata, yakni Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja.

Dia menyebutkan, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penentu kedatangan turis asing ke Bali dengan

"Kita harus melakukan hal yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang juga membuka diri untuk wisman, seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan sebagainya," kata Trisno.

Menurut Trisno, para pemangku kepentingan terkait di Pulau Dewata haruslah membuat wisman yang datang merasa nyaman dan jangan sampai mereka merasa dipersulit. "Saya kira ini penting, karena semua negara melakukan hal yang sama untuk mencari simpati agar wisatawan mau datang. Ketika wisatawan sudah merasa nyaman, maka ketika kembali ke negaranya akan men-

Dengan diberlakukan uji coba kebijakan PPLN bebas karantina dan penerapan Visa on Arrival untuk 23 negara yang dulunya sebagai penyumbang devisa, Trisno mengharapkan dapat mendorong kunjungan wisman ke Bali. Demikian juga dengan dukungan kebijakan wisatawan domestik yang tidak perlu lagi syarat perjalanan melakukan rapid antigen dan swab PCR jika sudah mendapatkan vaksin lengkap atau penguat (booster).

Pihaknya berharap kunjungan wisdom per hari bisa di atas delapan ribu seperti saat libur Natal dan Tahun Baru.

Namun, karena penyebaran COVID-19 varian Omicron, sempat turun lagi sampai 4.900 orang per hari. Dia menambahkan, pemerintah juga perlu mewaspadai dampak perang Rusia dengan Ukraina, yang bisa menyebabkan ketidakpastian wisatawan dari Eropa datang ke Bali.

"Mudah-mudahan di sisa waktu beberapa hari ini menuju triwulan I-2022 ini, kunjungan wisatawan terus naik," ujar mantan Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta itu.

Angin Segar Pariwisata Bali

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menyatakan, kebijakan penerapan dan pemberlakuan kembali visa on arrival memberikan angin segar terhadap percepatan pemulihan industri pariwisata Tanah Air. Meski penerapan VOA ini masih terbatas di Bali, tetapi kebijakan ini menjadi langkah pembuka bagi pemulihan industri pariwisata di Indonesia.

Piter mengatakan, kebijakan penerapan dan pemberlakuan kembali visa on arrival dan bebas karantina berdampak positif untuk mempercepat kebangkitan ekonomi Bali. Selama ini, perekonomian Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata, terutama wisman.

Berbeda dengan pariwisata lain di Indonesia seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang bergantung dengan kunjungan wisatawan domestik, pariwisata Bali sangat bergantung pada kunjungan wisman.

"Pariwisata Yogyakarta juga masih dapat dijangkau dengan kendaraan darat, jadi banyak wisatawan domestik. Kalau Bali peran pariwisata sangat besar, akses dijangkau dengan pesawat, dan dominan wisatawan mancanegara," lanjut Piter.

Kebijakan VOA dan bebas karantina ini akan menarik para wisman untuk mengunjungi Bali sekaligus menjadi kabar baik bagi pelaku usaha pariwisata. Sebelumnya, Bali telah menerapkan warm up vacation dengan sistem travel bubble untuk mendatangkan wisman ke Pulau Dewata. Dia berharap, ke depan daerah lain dapat mengikuti dengan pertimbangan kondisi kasus penularan COVID-19.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, pelonggaran

ini akan mendatangkan wisman secara bertahap ke Indonesia. Menurutnya, turis yang akan datang diperkirakan berasal dari negara ASEAN, Australia, China, atau Jepang. Mengingat, wisman asal Amerika Serikat dan Eropa biasanya mengunjungi Bali pada liburan musim dingin dan akan berakhir pada Maret 2022.

"Dampak dari pelonggaran karantina bisa memicu masuknya wisatawan asing tapi secara bertahap," kata Bhima.

Bhima juga melihat jika kebijakan ini berhasil, maka dapat diterapkan di provinsi yang menjadi destinasi prioritas, seperti Sumatera Utara, DIY, NTB, dan Manado. Namun, ia mengingatkan

gaktifkan kembali dua rute internasional, yaitu Kuala Lumpur-Bali (PP) dan Kuala Lumpur-Surabaya (PP). Kedua rute ini akan menambah layanan penerbangan internasional berjadwal AirAsia antara Indonesia dan Malaysia menjadi tiga rute, termasuk rute Jakarta-Kuala Lumpur (PP) yang telah beroperasi selama ini.

Rute Kuala Lumpur-Bali dan Bali-Kuala Lumpur mulai beroperasi pada 21 Maret dengan frekuensi tiga kali seminggu hingga 31 Maret. Sementara selama April, frekuensi penerbangan 7 kali seminggu.

Rute Kuala Lumpur menuju Surabaya dan sebaliknya yang dimulai 25 Maret 2022, akan beroperasi tujuh kali dalam



Pariwisata di Bali.

meski ada pelonggaran, masyarakat diharapkan tetap harus mentaati aturan protokol kesehatan agar tidak muncul gelombang baru yang tidak diharapkan.

"Yang penting proses dan testing-nya berjalan efektif, saya kira tidak jadi persoalan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine, mengatakan, Grup Maskapai AirAsia menyambut gembira pengumuman pemerintah untuk mempermudah persyaratan bagi PPLN yang sudah divaksin lengkap dengan mengurangi masa karantina ke Indonesia, dan penerapan visa on arrival untuk kunjungan ke Bali.

Dia mengatakan, AirAsia akan men-

seminggu, sama seperti rute Kuala Lumpur ke Jakarta dan Jakarta ke Kuala Lumpur.

Veranita menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka menormalkan kembali layanan penerbangan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam menyambut rencana pembebasan karantina oleh pemerintah kedua negara mulai April 2022.

"Dua rute ini kami harapkan menjadi awal dari pengaktifan kembali lebih banyak rute internasional lain di masa mendatang. Tidak hanya Indonesia-Malaysia, namun juga dengan negara lain," sambungnya. ●



TERBIT SUDAH PP REGULASI KEWENANGAN DI LAUT

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sudah terbit. Apakah kontroversi mereda?

Adalah Presiden Joko Widodo menandatangani PP bernomor 13 Tahun 2022 itu pada Jumat, 11 Maret 2022. PP ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

"Dalam rangka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyinergian tugas dan fungsi dari beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut," ujarnya.

Di PP itu disebutkan, penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi In-

donesia dilaksanakan oleh: 1. Menteri; 2. Badan; 3. Instansi Terkait; dan 4. Instansi Teknis.

Pada Pasal 4 ayat 1, penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh menteri, badan, instansi terkait dan instansi teknis. Badan dalam hal ini adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan sebagai koordinator kementerian/lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang hubungan luar negeri," demikian bunyi Pasal 4 ayat 2.

Salah satu tugas pengamanan laut adalah patroli yang dilaksanakan oleh Badan dan Instansi Terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu berupa patroli bersama, patroli mandiri dan patroli terkoordinasi. "Patroli bersama yaitu diselenggarakan oleh Badan dengan melibatkan Instansi Terkait dan Instansi Teknis secara bersama-sama, terpadu, dan terintegrasi," demikian keterangannya.

Untuk penegakan hukum, setiap instansi yang melakukan penyidikan wajib memberitahu ke Badan. "Jika instansi yang memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak penyerahan dan/ atau tidak menindaklanjuti hasil

penindakan yang dilakukan Badan maka instansi tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyerahan wajib melapor kepada Menteri disertai alasan hukum," bunyi Pasal 25 ayat 1.

Lalu apa fungsi Badan di PP ini? "Badan bertindak sebagai koordinator kementerian/ lembaga pada forum internasional guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Selain itu, secara khusus untuk kerja sama coast guard, badan perwakilan pemerintah Indonesia," demikian bunyi penjelasan PP 13/2022.

Ternyata PP No 13 Tahun 2022 ini juga terkait dengan Omnibus Law yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi harus direvisi dalam jangka waktu dua tahun. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan progres pembahasan Omnibus Law Keamanan Laut itu. Antara lain, ada beberapa tahapan yang disepakati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Omnibus Law.

"Ya jalan. Jadi begini tahapan-tahapan yang sudah disepakati oleh Presiden itu ada tiga. Pertama dikeluarkan peraturan pemerintah dulu yang sekarang sudah di Setneg dan sudah ditandatangani oleh menteri terkait ya, Menkumham, Menko Polhukam, dan Menko Marves serta Mensesneg," ujar Mahfud di Kantor Bakamla RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Maret 2022.

Dia mengatakan selanjutnya akan ada revisi terbatas UU Kelautan. Dia menyebut tahapan ketiga adalah pembuatan Omnibus Law yang punya kaitan dengan urusan keamanan laut. "Lalu yang ketiga kalau ini sudah tentu akan dengan sendirinya harus dilakukan Omnibus Law terhadap sekian belas UU yang mempunyai kaitan itu sehingga nanti akan ada satu pintu kendali. Tentu pintu tahapannya ada di Presiden," kata Mahfud.

"Kemudian bagaimana cara itu semua yang selama ini sendiri-sendiri diatur tanpa harus mengurangi kewenangan masing-masing yang sudah ada tinggal model koordinasinya itu aja sehingga nanti fokus pemerin-

tah sekarang untuk program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) itu nanti harus didukung ya oleh keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum di laut. Itu sangat penting," sambungnya.

Mahfud menyebut banyak pelanggaran di lautan. Di antaranya pelanggaran batas, pencurian kekayaan alam, penyeludupan, dan pengiriman narkoba. "Macam-macam lewat situ

nanti lintas lagi. Yang penting kita akan insyaallah akan menyelesaikannya sampai tahap itu," jelasnya.

Sebelum menjadi PP, Laksamana Muda (Pur) Soleman B Ponto sempat menyoal Rancangan PP (RPP) ini pada akhir 2021 lalu. Menurut Soleman yang pernah menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013 itu.

Dia mengemukakan, beleid ini ber-



sehingga harus ada keamanan, ada penegakan hukum tapi juga keselamatan. Nah, itu semua tahap-tahap tapi ya kita harus tunggu sesuai prosedur-prosedur karena semua itu harus ada yang ini nanti selesai di Presiden, yang ini di DPR dan pemerintah, yang ini

potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga, bahkan mengarah kepada kekacauan penegakan hukum di laut. "Kekacauan dalam penegakan hukum di laut ini dapat menyebabkan laut Indonesia berada pada status "high risk water" (perairan berisiko

tinggi)," kata Soleman.

Dampaknya adalah tingginya nilai asuransi barang yang diangkut kapal niaga melewati perairan Indonesia. Dampak lanjutannya, sambung Soleman, mahalnya harga beli barang oleh masyarakat karena meningkatnya biaya logistik.

Menurut dia, RPP tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sudah ditolak oleh Panitia Antar Kementerian. Namun,

hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sebagaimana diatur pada Pasal 9 Huruf b UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

Surat dengan Nomor: B -205/HK.00.00/12/2021 terkirim dengan tembusan, Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Sekretaris Negara itu mengundang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM.

Jumat, 17 Desember 2021.

Menkopolhukam, Mahfud MD, sambung Soleman, harus mengklarifikasi kenapa KSAL tidak diundang dalam RPP tersebut. Apalagi Mahfud MD juga berlatar belakang hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya paham peraturan ketika akan berbuat. Karena TNI AL jauh lebih dulu ada sebelum Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Menkopolhukam Mahfud MD harus menjelaskan itu," tandasnya.

Menurut Soleman, tidak diundang-



sambungannya, Menko Polhukam melanjutkan prosesnya, malah tanpa melibatkan Kepala Staf TNI AL (KSAL).

Soleman mengisahkan, pada akhir 2021 itu beredar surat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) terkait Permohonan Rapat Terbatas (Ratas) membahas RPP tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Surat yang beredar melalui percakapan aplikasi WhatsApp (WA) tertanggal 14 Desember 2021 itu tidak mengundang Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Padahal KSAL adalah pihak yang bertugas dalam hal menegakan

Juga kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, tembusan pula untuk Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Keamanan Laut.

"Ini surat RPP siluman yang kedua di tahun 2021. Yang pertama bertanggal sekitar Maret 2021 terkait Tata Kelola Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (TKKKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, tapi ditolak," ujar Soleman,

ya KSAL pada rapat yang membahas RPP tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia tentunya mengundang tanda tanya. "KSAL sebenarnya mutlak harus hadir Alasan KSAL sudah diwakili panglima TNI jelas adalah anggapan yang keliru karena UU Nomor 34/2004 tentang TNI mengatur secara tegas pembagian tugas antara panglima TNI dan KSAL," ungkapnya.

Soleman menjelaskan, Panglima TNI bertugas menegakkan kedaulatan yang dilaksanakan melalui Operasi Militer yang berprinsip kill or to be killed, sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 UU Nomor 34/2004. Sementara tugas

KSAL diatur pada Pasal 9 Huruf b, yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional dengan melaksanakan prinsip mengejar, menangkap, menyelidiki dan menyidik para pelanggar hukum untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

"Jadi, dalam hal penegakan hukum di laut KSAL bertindak sebagai penyidik. Di sinilah bedanya, Panglima TNI tidak bisa bertindak sebagai penyidik di laut. Akan tetapi dalam hal operasi militer, KSAL ada di bawah perintah Panglima TNI," kata dia.

Ia menegaskan pula, Bakamla tidak mendapat status sebagai penyidik karena tidak ada tempat lagi bagi Bakamla untuk melakukan penyidikan di laut. "Kenapa begitu? Lihat saja, di wilayah laut teritorial, penyidiknya adalah Kepolisian RI sebagaimana yang diatur oleh UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Lalu di wilayah laut Yurisdiksi penyidiknya adalah TNI AL berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang TNI. Artinya seluruh wilayah laut Indonesia mulai dari wilayah laut Teritorial sampai dengan wilayah laut Yurisdiksi sudah ada penyidiknya," kata dia.

Itulah sebabnya, sambung Soleman, bila Bakamla mendapat status penyidik, maka di laut teritorial akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Polri, sedangkan di wilayah laut yurisdiksi akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan TNI AL. Sehingga mudah dipahami mengapa UU 32/2014 tentang Kelautan tidak memberikan status Penyidik kepada Bakamla.

"Saya sebagai purnawirawan TNI AL juga ikut bertanya tanya dalam hati, apakah Menko Polhukam dengan sengaja merekayasa Bakamla untuk menggantikan TNI AL, atau Bakamla dibentuk untuk mengecilkan arti TNI AL?" ungkap Soleman.

DPR juga mempertanyakan soal RPP ini pada awal 2022. Kepala Bakamla RI yang menjawabnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bakamla RI dengan komisi I DPR RI pada Selasa, 25 Januari 2022.

"RPP ini tidak menghilangkan kewenangan K/L lainnya tetapi menin-

gkatkan kepastian hukum, sinergitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah," papar Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia.

Aan menjelaskan, sejatinya keberadaan Bakamla adalah wujud dari politik hukum pemerintah sebagaimana sejak dibentuk pada 15 Desember 2014, saat peringatan Hari Nusantara. Dalam pidatonya, Presiden mengarahkan visi Bakamla ke depan dan memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mendukung Bakamla dengan aset dan personel.

Presiden kemudian dalam Ratas pada 21 September 2015 meminta untuk melakukan revisi regulasi untuk

Lebih lanjut, Laksdya Aan mengungkapkan urgensi dan pokok pengaturan RPP PKKPH ini adalah membentuk sistem yang lebih baik dalam keamanan maritim dengan adanya Kebijakan Nasional tentang Kamla, sinergitas patroli, integrasi sistem informasi dan monitoring penegakan hukum.

Ia juga menjelaskan, kebijakan nasional nantinya akan memberikan pedoman terkait gelar patroli K/L. Kemudian, sinergitas patroli diwujudkan dalam gelar operasi bersama. Lalu, integrasi sistem informasi dilaksanakan melalui sistem informasi maritim satu atap, serta kewajiban untuk memberikan informasi gakkum kepada Men-



Laksamana Muda (Pur) Soleman B Ponto

memberikan kewenangan kepada Bakamla sebagai Coast Guard. Keinginan Presiden ini belum diwujudkan secara penuh sehingga kembali disampaikan dalam pelantikan kepala Bakamla RI Aan Kurnia pada 12 Februari 2020.

Dalam kesempatan itu Presiden memberikan pernyataan dalam konferensi pers di depan awak media, "Kita harapkan ke depan Bakamla itu menjadi embrio coast guardnya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing. Dan di laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla. Jadi Bakamla kayak Indonesia Coast Guard."

kopolhukam.

"Kami juga telah merencanakan dan menyiapkan mekanisme untuk membentuk produk turunan dengan melibatkan semua instansi yang berwenang di laut sehingga peraturan ini dapat langsung diimplementasikan bila telah ditandatangani dan diharapkan dapat berjalan dengan baik dan seoptimal mungkin pada 2022 ini juga," pungkasnya

Nah, Maret 2022 akhirnya RPP ini sah menjadi regulasi turunan UU berbentuk PP. Namun, setiap regulasi yang dinilai kurang layak, tetap terbuka jalan untuk merevisinya. Malah UU setingkat Omnibus Law saja dapat berstatus inkonstitusional, meskipun bersyarat. •



Ir Bambang Susantono MCP, MSCE, PhD.

PULANG KAMPUNG MEMBANGUN IBU KOTA BARU

Bukan sekadar non-partai seperti Presiden Joko Widodo kemukakan, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki rekam jejak panjang di bidang pembangunan maupun tata kelola pemerintahan.

Tujuh tahun ia meninggalkan jabatan pemerintahan dan bekerja untuk Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian Development Bank) yang berpusat di Manila. Bambang Susantono kini kembali ke Indonesia. Bagai-kan pulang ke kampung halaman untuk membangun kota baru. Lebih istimewa lagi, kota baru itu adalah Nusantara, Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Rekan seangkatan ketika kuliah teknik sipil di ITB, Hilman Widiatmojo, mengaku sudah mendengar nama Bambang disebut-sebut sebagai calon kuat Kepala Otorita IKN. "Sebelum isu ini muncul saya bercanda ke beliau: Bos kayaknya mau jadi ketua IKN nih. Dia cuma diam saja nggak mau komentar. Saya dapat bocoran itu minggu lalu. Waktu disinggung, nggak, Bambang yang lain mungkin," ucap Hilman menirukan ungkapan Bambang, Rabu, 23 Februari 2022.

Toh Hilman mengakui sosok Bambang memiliki kekuatan di sisi pengembangan wilayah. Kecuali itu, Bambang sebagai Vice President Asian Development Bank (ADB) juga mampu membuka akses kepada para investor. "Beliau punya pengalaman di bidang pengembangan wilayah, studi S2, S3 kan itu jadi sangat kuat. Bekerja di ADB punya akses keluar untuk investor, barangkali cocok. Jadi beliau punya kekuatan dari sisi itu," ungkapnya.

Memang, Bambang menjadi calon kuat menjadi Kepala Otorita IKN dengan latar belakang yang pernah berada di kursi pemerintahan dan memiliki segudang pengalaman di bagian infrastruktur dan pengembangan wilayah. Pria kelahiran Yogyakarta, 4 November 1963 ini malah pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010—2014 dan sempat menjadi Pelaksana Tugas Menteri.

Dia juga pernah menjabat sebagai Deputy Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada



2007-2010. Bambang juga pernah menduduki posisi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini awalnya bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya pada 1996, ia menggondol gelar master tata kota dan wilayah di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat.

Mantan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia periode 2004—2010 juga pernah menduduki jabatan Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Tbk. Di sela-sela kesibukannya, dia masih sempat mengajar dan membimbing tesis di Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia (UI), melakukan penelitian di bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sosial perkotaan.

Di tingkat internasional, Bambang pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation Studies (EASTS) dan hingga kini menjadi anggota Board of Trustees untuk The Southsouth North Foundation di Johannesburg, Afrika Selatan, yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan. Selain itu, bersama sepuluh guru besar dari universitas ternama di Asia Timur, dirinya melakukan penelitian mengenai fenomena transportasi di kota-kota megapolitan di Asia Timur. Bahkan, ia juga dipercaya menjadi Presiden Intelligent Transport System Indonesia (ITS Indonesia).

Gagasan dan ide-idenya mengenai infrastruktur dan transportasi sudah sering muncul di berbagai media cetak dan elektronik baik berupa tulisan atau penampilannya sebagai pembicara di forum nasional dan internasional. Ia juga telah menulis beberapa buku seputar infrastruktur dan transportasi, salah satunya adalah "Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah" yang menjadi panduan dalam melakukan terobosan dalam rangka pembangunan nasional.

Buku lain yang pernah ditulis oleh peraih penghargaan Satyalencana Karya Satya, Satyalencana Wira Karya dan Satyalencana Pembangunan ini. Antara lain berjudul "1001 Wajah Transportasi Kita", "Strategi dalam Pe-

nataan Ruang dan Pengembangan Wilayah", dan "Memacu Infrastruktur di Tengah Krisis".

Dalam menangani kesemrawutan dalam sistem transportasi, Bambang Susantono mengusulkan pendekatan transportasi humanis, yang diawali dengan etika dalam bertransportasi.

kan oleh masyarakat; harus nyaman dan layak ditumpangi; tarif angkutan umum harus terjangkau dan terjamin keamanannya.

Bambang terlahir sebagai putra pasangan dr H Mohammad Susanto-Hj Rustini. Ia beristerikan Lusie Indrawati SH, MBA LLM, yang aktif sebagai ad-



Menurut dia, hal ini sangat penting untuk menjaga keteraturan dalam bertransportasi sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna. Dalam hal konsep transportasi yang humanis, ia mengatakan bahwa selain melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya, sistem transportasi humanis harus memperhatikan empat aspek, yaitu angkutan umum harus tepat waktu agar bisa diandal-

vokat profesional. Dari pasangan Bambang-Lusie lahir dua putri --Nurul dan Dianissa.

Ia mengakui pengaruh besar dukungan keluarga. "Bagi saya, keluarga itu sangat berperan penting. Setelah beraktivitas di luar, pulang ke rumah, kembali keluarga, itulah kebahagiaan yang sejati. Keluarga memberi saya energi yang luar biasa," ungkapnya saat masih menjadi Wakil Menteri Per-

• INFO SOSOK

hubungan memperingati ulang tahunnya yang ke-50 pada November 2013 lalu.

Sebagai Wakil Menteri Perhubungan periode 2010-2014, ia sudah mengemukakan pentingnya peningkatan kualitas generasi muda untuk mengantar Indonesia keluar dari krisis infrastruktur. Dengan begitu, percepatan pembangunan infrastruktur bakal berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik.

"Gambarnya sekarang krisis in-

daya manusia rendah.

Menyadari hal itu, sebelum pemerintahan beralih dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, Bambang sempat mengaku siap jika ditunjuk Presiden terpilih Joko Widodo untuk kembali ke dalam kabinet. Namun, keputusannya tersebut merupakan hak prerogatif presiden. "Siap. Tergantung Presiden itu," ujar dia di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2014.

Menurut dia, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh

han. Toh ia bersikap realistis dengan jabatannya. Jika tidak lagi berada dalam kabinet, dia memilih melanjutkan karirnya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Selain itu, dia berencana untuk melakukan penelitian tentang transportasi. "Ya paling mengajar, riset sama cuti dulu," kata dia.

Akhirnya pada 2015 ia berlabuh di di Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dengan jabatan Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development. Cakupan pekerjaannya adalah pengelolaan keseluruhan operasi Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim, Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional, dan Departemen Hubungan Eksternal.

Setelah lima tahun, pada 2020 lalu ADB memperpanjang jabatan Bambang hingga Juli 2022. Sayup-sayup, nama Bambang Susantono mulai terdengar sebagai calon Kepala Otorita IKN setelah Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan President Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa, Jumat, 18 Februari 2022 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan resmi Jokowi dan Asakawa membahas sejumlah hal seperti penanganan pandemi Covid-19 hingga dukungan ADB terhadap transisi energi di Indonesia. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Kepala Otorita IKN akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Kepala Negara juga memastikan bahwa Kepala Otorita IKN akan dijabat oleh seseorang dari kalangan non-partai politik. "Non-partai. Kriterianya, orang itu bukan berasal dari partai politik," kata Jokowi kepada wartawan usai peresmian Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat, NasDem Tower, Selasa, 22 Februari 2022.

Ternyata Bambang Susantono orangnya, yang tak sempat masuk kabinet. Namun jabatan Kepala Otorita IKN adalah jabatan setingkat menteri.

Akhirnya, welcome back Pak Bambang Susantono. Semoga sukses membangun Ibu Kota baru. ●



frastruktur, kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia di bidang infrastruktur," kata Bambang saat menjadi pembicara di Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia, Selasa, 9 September 2014.

Menurut dia, ada tiga persoalan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Yakni, implementasi dan koordinasi lemah serta kualitas sumber

Menteri Perhubungan. Utamanya membangun infrastruktur transportasi. "Pekerjaan rumah buat pemerintahan mendatang adalah memperkuat konektivitas segera. Lalu, memperlancar Public Private Partnership atau kerja sama asing karena keterbatasan dana pemerintah, membangun Good Governance dan membuat E-Government sampai E-Program," ujarnya.

Banyak infrastruktur transportasi yang perlu diselesaikan. Mulai dari infrastruktur perkeretaapian, bandara dan pelabu-



BEKAL DARI ADB UNTUK IBU KOTA BARU

Rekam jejak Bambang Susantono yang panjang di bidang pembangunan memang meyakinkan. Tak terkecuali untuk membangun Ibu Kota baru Nusantara di Kalimantan Timur.

Namun, akan banyak yang penasaran, bagaimana Bambang Susantono menggagas sebuah pembangunan kota? Terlebih untuk sebuah Ibu Kota baru yang baru memiliki nama, gambar dan maketnya saja.

Nah, pengalamannya hampir tujuh tahun menjadi Wakil Presiden di Asian Development Bank (ADB, Bank Pembangunan Asia) tampaknya akan menjadi bekal juga ketika ia menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Apalagi jabatannya di ADB sejak 2015 dan baru berakhir pada Juli 2022 adalah Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development. Jelas berkaitan dengan tata kelola (manajemen) dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai kisi-kisi, gagasan Bambang terungkap ketika ia menjadi pembicara kunci di acara Urban 20 International Event on the Road to G20, salah satu rangkaian menjelang puncak pertemuan G20. Di acara yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis,

24 Februari 2022 itu, ia membahas tantangan yang dihadapi kota-kota di Asia dan Pasifik, kawasan yang proses urbanisasinya berlangsung cepat dibandingkan dengan belahan bumi lainnya dewasa ini.

Bambang menyebutkan, urbanisasi (proses tumbuh dan berkembangnya kota) di kawasan Asia Pasifik telah terjadi sejak dasawarsa 70-an. "Namun, telah semakin cepat sejak pergantian Abad XX ke XXI. Kita harus mengelola urbanisasi yang cepat ini secara efektif dan melakukannya secara berkelanjutan," ungkapnya.

Sebagian besar kota di Asia yang berkembang, lanjut Bambang, berjuang menghadapi layanan perkotaan yang kurang memadai dan infrastruktur dasar perkotaan yang tidak cukup memenuhi keperluan warganya. "Sudah menjadi tantangan besar sebelum pandemi, kurangnya layanan perkotaan yang memadai ini telah menempatkan daerah yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada kerugian yang lebih besar. Karena merekalah yang pertama mengalami gangguan dalam operasi normal," ujarnya.

Ia mengemukakan, yang paling menghadapi kesulitan di perkotaan, sebelum maupun di masa pandemi,

terutama adalah penduduk miskin dan warga yang rentan. Rentan karena mudah terinfeksi penyakit dan kurangnya kesempatan menghasilkan uang untuk bertahan hidup karena keterbatasan ekonomi.

Dari situ, sebagai Wakil Presiden ADB, Bambang mengemukakan lembaga tempat ia bekerja selama tujuh tahun terakhir itu telah merumuskan pendekatan yang menggabungkan aspek keuangan, pengetahuan, dan kemitraan. "Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan masyarakat --dan komunitas warga-- sebagai pusat perencanaan dan pengembangan kota. Sasarannya adalah membuat kota lebih layak huni, meskipun pengertiannya beraneka ragam," ungkapnya.

Rumusannya, kata Bambang, dapat diringkas menjadi pendekatan 5E, yaitu: 1) Economic competitiveness (daya saing ekonomi), Environmental sustainability and resilience (kelestarian dan ketahanan lingkungan), Equity and inclusiveness (pemerataan dan inklusivitas), Enablers (para pemberdaya), dan Engagement (keterlibatan).

Bagaimana dengan Ibu Kota baru? Banyak bekal dari ADB tentunya. Entahlah, siapa tahu termasuk pembiayaannya juga. •





GENCAR MEMACU INOVASI DAERAH

Masih ada provinsi, kabupaten, dan kota yang kurang inovatif, bahkan sulit diukur inovasinya. Kementerian Dalam Negeri berupaya membina daerah yang masuk kategori ini.

Menurunkan tim dari jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) ke lapangan, Kemendagri berupaya membina daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Tim ini bertugas mengidentifikasi persoalan hingga menyosialisasikan pentingnya inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Kegiatan ini kelak diharapkan dapat meningkatkan capaian inovasi di tahun

selanjutnya. Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Litbang Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, mengatakan program ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan kerja inovasi di wilayahnya.

"Ini merupakan format awal untuk menghadirkan inovasi secara nyata di setiap wilayah Indonesia. Kegiatan (pembinaan) ini diharapkan mampu memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih memperkuat inovasinya," ungkap

Eko dalam sambutan pembukaan kegiatan pembinaan di Hotel Sahid, Surabaya, Rabu, 9 Maret 2022.

Selama proses kegiatan, Eko berharap para peserta dapat saling bertukar pikiran, berkoordinasi, hingga menguraikan persoalan yang mereka hadapi dalam pelayanan publik. "Agar kerja-kerja inovasi yang dilakukan ke depan dapat terencana, terpadu, dan selaras. Itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum di



Indonesia,” ujar Eko.

Kepada tim yang bertugas, Plh Kepala Balitbang Kemendagri tersebut juga menekankan arti penting kegiatan ini dan dampak yang akan dirasakan masyarakat. “Kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan daya saing setiap kabupaten, kota, dan provinsi ke depan. Meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah juga berarti meningkatkan pelayanan publik yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum, terlebih lagi pada daerah-daerah yang dinilai kurang inovatif,” terangnya lagi.

Target kegiatan ini adalah memacu dan memotivasi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara kreatif, solutif, dan inovatif. “Dengan kebijakan pembangunan nasional dengan memperkuat inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih pintar dan lebih baik,” ucap

Eko yang baru dilantik oleh Mendagri M Tito Karnavian menjadi Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) pada Kamis, 10 Maret 2022.

Di sisi lain, Eko mengungkapkan dengan adanya pembinaan inovasi ini, nantinya diharapkan daerah mampu mengoptimalkan anggaran, memangkas jalur birokrasi, dan mempersing-

kat waktu pelayanan publik. “Filosofi inovasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan smart city, and smart regional sebagai cikal bakal pemerintahan Indonesia yang smart government,” terangnya.

Dia juga meminta peran serta Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) perangkat daerah, dan



anggota masyarakat untuk menginisiasi inovasi guna mendorong peningkatan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kegiatan pembinaan serupa akan digelar secara maraton di enam kota, dari 8 Maret hingga 14 April 2022. Kegiatan akan berlangsung di Surabaya, Medan, Jayapura, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. Masing-masing kota selanjutnya akan dihadiri oleh perwakilan daerah dari masing-masing kabupaten/kota berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai dalam penguku-

Timur, dan Gorontalo.

Rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. "Sering kali, pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan," ujar Kepala Badan Litbang Kemendagri kala itu, Agus Fatoni, Kamis, 17 Juni 2021.

Kelima provinsi tersebut masuk dalam kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun

Fatoni kemudian mengimbau bagi pemerintah daerah (pemda) yang memperoleh hasil skor indeks rendah untuk segera berbenah. Para kepala daerah ia minta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan menyinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi.

Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian. "Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat



ran Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. "Semoga para peserta dapat memahami dengan baik tujuan pembinaan ini," ungkap Eko.

Pada pertengahan tahun lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) mengeluarkan hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. Dari hasil penilaian itu, terdapat lima provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan

2020. Sedangkan, masih terdapat 55 kabupaten dan tiga kota yang tidak dapat dinilai inovasinya alias disclaimer berdasarkan hasil penilaian tersebut.

"Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak tapi tidak dilaporkan, atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada," jelas Fatoni yang baru dilantik Mendagri Tito menjadi Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri pada Kamis, 10 Maret 2022.

daerah harus menumbuhkan budaya inovasi," kata dia.

Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, kata Fatoni, dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapnya. Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dia menerangkan, Kemendagri sendiri selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah.

Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut daftar pemerintah daerah dengan kategori kurang inovatif dan disclaimer hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 yang disampaikan pada kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021.

Provinsi dengan Skor Indeks Inovasi Terendah atau Kurang Inovatif:

7. Kabupaten Dogiyai
8. Kabupaten Fakfak
9. Kabupaten Halmahera Barat
10. Kabupaten Halmahera Tengah
11. Kabupaten Halmahera Timur
12. Kabupaten Intan Jaya
13. Kabupaten Kaimana
14. Kabupaten Kapuas Hulu
15. Kabupaten Kepulauan Aru
16. Kabupaten Kepulauan Yapen
17. Kabupaten Lanny Jaya
18. Kabupaten Mahakam Ulu
19. Kabupaten Malaka
20. Kabupaten Mamberamo Raya

34. Kabupaten Pegunungan Arfak
35. Kabupaten Polewali Mandar
36. Kabupaten Pulau Taliabu
37. Kabupaten Puncak
38. Kabupaten Puncak Jaya
39. Kabupaten Raja Ampat
40. Kabupaten Rokan Hilir
41. Kabupaten Sabu Raijua
42. Kabupaten Sarmi
43. Kabupaten Seram Bagian Timur
44. Kabupaten Sorong
45. Kabupaten Sorong Selatan
46. Kabupaten Supiori
47. Kabupaten Tambrau



1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 2. Provinsi Kalimantan Barat
 3. Provinsi Maluku
 4. Provinsi Kalimantan Timur
 5. Provinsi Gorontalo
- Kabupaten dengan kategori Tidak Dapat Dinilai atau Disclaimer:
1. Kabupaten Boalemo
 2. Kabupaten Boven Digoel
 3. Kabupaten Buru
 4. Kabupaten Buton Tengah
 5. Kabupaten Buton Utara
 6. Kabupaten Deiyai

21. Kabupaten Manggarai
22. Kabupaten Manggarai Barat
23. Kabupaten Manggarai Timur
24. Kabupaten Manokwari Selatan
25. Kabupaten Mappi
26. Kabupaten Maybrat
27. Kabupaten Mamberamo Tengah
28. Kabupaten Morowali
29. Kabupaten Nduga
30. Kabupaten Ngada
31. Kabupaten Nias Utara
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pasangkayu

48. Kabupaten Tana Toraja
 49. Kabupaten Teluk Bintuni
 50. Kabupaten Teluk Wondama
 51. Kabupaten Timor Tengah Utara
 52. Kabupaten Tolikara
 53. Kabupaten Waropen
 54. Kabupaten Yahukimo
 55. Kabupaten Yalimo
- Kota dengan kategori Tidak Dapat Dinilai atau Disclaimer:
1. Kota Sorong
 2. Kota Gunungsitoli
 3. Kota Subulussalam •



MEMPERTAHANKAN HARGA PERTALITE MENJAGA HAJAT HIDUP RAKYAT

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membuat harga minyak mentah dunia mengalami pelonjakan dan mempengaruhi harga jual bahan bakar di Indonesia. Namun, meski terjadi kenaikan harga minyak, PT Pertamina menyatakan tetap mempertahankan BBM jenis Pertalite.

Keputusan tidak menaikkan harga jual Pertalite dilakukan demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat, karena Pertalite adalah BBM yang paling banyak digunakan di Tanah Air.

"Pertamina sebagai BUMN yang berperan dalam mengelola energi nasional sangat mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penetapan harga produk BBM," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, dalam keter-

angannya di Jakarta, 9 Maret 2022.

Fajriyah menjelaskan, Pertamina mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, meski harga minyak dunia menembus angka USD130 per barel, perseroan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memutuskan harga Pertalite akan tetap Rp7.650 per liter.

Menurutnya, harga tersebut tidak berubah sejak tiga tahun terakhir. Apalagi, saat ini, porsi konsumsi Pertalite ada-

lah yang terbesar, yakni sekitar 50 persen dari total konsumsi BBM nasional. Sehingga pemerintah terus melakukan pembahasan untuk skenario kompensasi agar stabilisasi harga Pertalite dapat terjaga.

Pertamina juga terus melakukan berbagai efisiensi di segala lini, termasuk menekan biaya produksi BBM dalam negeri. Hal itu guna mengurangi tekanan lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap peningkatan biaya penyediaan BBM.

Sejumlah strategi efisiensi tersebut, di antaranya memaksimalkan penggunaan minyak mentah domestik dan mengoptimalkan penggunaan gas alam untuk penghematan biaya energi. Paralel juga dilakukan peningkatan produksi kilang untuk produk yang bernilai tinggi.

Kebijakan penyesuaian harga produk juga dilakukan secara selektif hanya untuk BBM nonsubsidi tertentu, seperti Pertamina Series maupun Dex Series, yang porsi konsumsinya hanya sekitar 15 persen dari total konsumsi BBM Nasional.

Jenis BBM ini sebagian besar dikonsumsi oleh kalangan konsumen mampu, pemilik kendaraan pribadi jenis menengah ke atas. Ke depannya, harga produk BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan secara rutin mengikuti harga pasar sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 62 Tahun 2017.

"Pertamina sangat berhati-hati dalam menetapkan harga. Namun, kami yakin segmen konsumen ini telah merasakan manfaat BBM berkualitas yang lebih hemat dan lebih baik untuk perawatan mesin kendaraan. Sehingga dapat menerima harga yang selama ini tetap sangat kompetitif dibandingkan produk yang sejenis lainnya," ujar Fajriyah.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, mengatakan, risiko global mengalami eskalasi akibat konflik Rusia-Ukraina. Hal itu akhirnya mempengaruhi kenaikan harga yang tinggi atas komoditas energi, baik itu minyak mentah, batu bara, hingga gas.

"Peningkatan harga minyak mentah dunia tentunya berdampak terhadap APBN," kata Isa.

Secara keseluruhan, Isa menjelaskan, kenaikan harga komoditas termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) memang berdampak positif terhadap pendapatan negara, terutama Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara, terutama subsidi energi yang menjadikan ICP menjadi salah satu parameter utama dalam perhitungan tersebut.

Pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan mengukur dampaknya terhadap APBN. Pemerintah akan mengambil kebijakan

yang diperlukan secara menyeluruh dengan melihat dari sisi potensi penerimaan negara, beban terhadap belanja negara, dan konsekuensi terhadap pembiayaan anggaran. Hal itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang saat ini baru pulih dari dampak pandemi COVID-19.

yang mendukung dunia usaha," ujar Isa.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mendorong agar pemerintah dapat menetapkan Peralite sebagai BBM dalam penugasan. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan BBM yang terjangkau masyarakat luas, sekaligus sebagai pengganti Premium.

Mulyanto menyatakan, pemerintah



Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede



Direktur Celios, Bhima Yudhistira

"Pemerintah akan terus melakukan monitoring perkembangan perekonomian, termasuk volatilitas harga komoditas terkini dalam rangka antisipasi kebijakan. Pemerintah akan memastikan respons kebijakan mengutamakan stabilitas perekonomian nasional dan menjaga supply barang kebutuhan pokok masyarakat, baik pangan maupun energi, serta menjaga keberlanjutan fiskal

perlu menugaskan Pertamina untuk menyediakan Peralite dengan volume dan harga tertentu untuk didistribusikan ke seluruh wilayah NKRI. Sedangkan, selisih antara harga jual dan harga keekonomiannya dikompensasi pemerintah.

"Memang sekarang ini, resminya BBM dalam penugasan adalah Premium. Namun, faktanya BBM jenis ini tidak tersedia di pasar. Akibatnya BBM yang ter-

sedia dengan harga terjangkau untuk masyarakat luas hanyalah BBM umum Peralite,” ungkapnya.

Dia berpendapat, penetapan Peralite sebagai BBM dalam penugasan ini penting agar negara hadir menjamin ketersediaan BBM dengan harga terjangkau. Serta tidak menyerahkan 100 persen kepada mekanisme pasar.

“Dengan penetapan ini, di satu sisi masyarakat tidak dihantui kekhawatiran akan kenaikan harga Peralite, menyusul kenaikan harga migas dunia yang dipicu oleh meletusnya perang Rusia-Ukraina,” paparnya.

Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan Pertamina agar pasokan Peralite tetap tersedia di tengah gejolak

naik 30 persen dibandingkan 2020 yang tercatat 18 juta KL.

Tepat Tahan Harga

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menyebut, keputusan pemerintah mempertahankan harga Peralite di tengah gejolak harga minyak dunia cukup realistis dan tepat dalam jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, tidak tepat apabila diterapkan dalam jangka panjang.

Joshua menyatakan, harga keekonomian Peralite mencapai Rp11.000 per liter. Jika dibandingkan badan usaha swasta lain yang beroperasi di Indonesia, harga Peralite masih paling murah. Sebab, para pesaing menetapkan ban-

disubsidi,” kata Joshua.

Menurut Joshua, kebijakan subsidi BBM yang dilakukan setiap tahun menjadi kontraproduktif terhadap anggaran. Mengingat subsidi BBM merupakan kegiatan konsumtif. Subsidi tersebut cenderung tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan menengah ke bawah.

Selain itu, disparitas harga yang tinggi berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan tindakan menyalahgunakan subsidi, seperti menjual ke industri, penyelundupan, dan sebagainya.

Dia menambahkan, ada dua justifikasi dari pemberian subsidi BBM jenis Peralite dalam jangka pendek saat ini. Pertama, dengan kondisi pandemi COVID-19, banyak masyarakat rentan miskin dan menengah ke bawah yang semakin memburuk kondisi ekonominya.

Kelompok ini cenderung minim mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, mempertahankan daya beli kelompok ini menjadi penting agar pemulihan ekonomi terjaga.

“Akan tetapi, apabila perekonomian kembali ke level normalnya, pemerintah dapat kembali menyesuaikan kebijakan subsidi BBM ini,” katanya.

Justifikasi kedua, kata dia, kondisi harga minyak saat ini bisa dikatakan abnormal dampak dari tensi geopolitik yang meningkat antara Rusia-Ukraina. Ke depan, peningkatan tensi geopolitik ini diperkirakan kembali mereda. Akhirnya akan menurunkan harga minyak mentah dunia kembali ke rata-rata harga jangka panjangnya.

“Di tengah kondisi abnormal ini, pemerintah berupaya untuk menekan dampaknya pada perekonomian domestik dengan memberikan subsidi BBM Peralite,” ucapnya.

Dia mengatakan, saat ini, Peralite memang belum menjadi BBM penugasan. Namun, apabila ke depan akan ditetapkan sebagai BBM penugasan, selisih antara biaya produksi dan harga jual penetapan sepenuhnya akan diganti oleh pemerintah.

Akan tetapi, dengan Peralite disubsidi, terdapat risiko peralihan konsumsi BBM dari sebelumnya nonsubsidi ke subsidi. Dengan demikian, terdapat potensi kenaikan jumlah konsumsi Peralite



Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto

kenaikan harga minyak dunia. Juga mengingat penggunaan Peralite paling banyak dibandingkan jenis BBM lainnya.

“Pengaturan penggunaan Peralite itu jadi kepentingan bersama. Penegakan hukum oleh aparat ini bisa langsung melakukan tindakan, peranan penegak hukum sangat besar. Jangan sampai ada upaya penimbunan,” ujar Anggota DEN, Satya Wira Yudha.

Dia menjelaskan, selain paling banyak digunakan, BBM dengan kadar oktan (RON) 90 yang dijual Pertamina ini paling murah dibandingkan produk serupa dari pesaing. Sepanjang 2021, konsumsi Peralite mencapai 23 juta Kilo Liter (KL),

derol rata-rata di atas Rp10.000 per liter.

Josua berpendapat kebijakan penetapan harga BBM harus dilihat dari latar belakang, di mana pemerintah berupaya melindungi daya beli masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, menjaga inflasi domestik tetap rendah, agar daya beli masyarakat terjaga, menjadi salah satu tujuan dari pemerintah dalam menjaga harga Peralite.

“Kami menilai, dalam jangka pendek, kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli, namun tidak untuk kebijakan yang bersifat jangka panjang dan setiap tahun harus terus

di masa mendatang, apalagi jika disparitas harga cukup tinggi.

"Upaya kontrol tetap perlu dilakukan melalui pembatasan volume dan konsumsi, agar pemerintah mengetahui apakah terjadi kebocoran atau tidak dalam penyaluran BBM penugasan ini," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurutnya, keputusan menahan harga Peralite juga tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah melambungnya

perlu diapresiasi. Pasalnya, BBM jenis ini konsumsinya lebih dari 50 persen total konsumsi BBM nasional.

Menurut dia, BBM jenis nonsubsidi seperti Peralite tinggal alokasikan saja dana kompensasi melalui skema APBN. Dana kompensasi itu bisa diperoleh dari windfall atau keuntungan booming-nya harga komoditas.

Bhima menambahkan, sejauh ini berdasarkan kajiannya, ketika harga minyak mentah mencapai di atas USD127 per barel, ada tambahan pendapatan ne-

masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan Pertamax di tengah harga minyak dunia yang terus melesat. Dengan cara tersebut, Pertamina tetap bisa mempertahankan harga jual Peralite.

Kesadaran masyarakat kalangan mampu untuk tetap mengonsumsi BBM jenis Pertamax Series sangat penting.

"Selain itu jika masyarakat kalangan mampu turut mengonsumsi Peralite, tentu berpengaruh terhadap membengkaknya APBN. Kalau sudah begini, sama saja dengan orang kaya berlindung di



VP CORCOMM Pertamina, Fajriyah Usman

sejumlah harga pangan akhir-akhir ini.

"Untuk mengendalikan inflasi ya dengan tidak menaikkan harga Peralite ini. Hanya saja, Pertamina sebagai badan usaha harus mendapatkan dana kompensasi tambahan dari pemerintah, karena Peralite bukan BBM penugasan," kata Bhima dalam keterangan di Jakarta, 12 Maret 2022.

Bhima mengatakan, kebijakan pemerintah menahan harga Peralite memang

gara dalam bentuk pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp192 triliun.

"Pendapatan kan langsung naik, jadi APBN punya ruang untuk menahan kenaikan harga Peralite. Bahkan, Pertamax juga bisa ditahan kenaikan harganya, meski harga minyak mentah sedang liar," ujar Bhima.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, meminta

bawah orang miskin," ujarnya.

Trubus menilai positif kebijakan Pertamina yang tidak menaikkan harga Peralite, meski di sisi lain harus menyesuaikan harga Pertamax series, Pertamina Dex, dan Dexlite.

"Jika Peralite dinaikkan tentu akan berpengaruh terhadap inflasi harga-harga kebutuhan. Jika ini terjadi, tentu akan muncul gejolak di tengah masyarakat," ujar Trubus. •



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

**PEMERINTAH TETAPKAN LABEL HALAL INDONESIA
YANG BERLAKU SECARA NASIONAL**

MAJELIS ULAMA
INDONESIA
HALAL

»

**HALAL
INDONESIA**

**Label halal yang ditetapkan MUI
masih **DAPAT DIGUNAKAN HINGGA**
1 FEBRUARI 2026.**

@Kemenag_RI Kementerian Agama RI @Kemenag_RI Kemenag RI

Sertifikasi Halal

LOGO BARU, BIAYA TURUN

Di luar tanggapan tentang desain baru logo halal, biaya sertifikasi menurun drastis. Indonesia mengejar status halal hub (pusat produk halal) global.

Yang jarang mendapat perhatian, proses sertifikasi halal dengan logo baru dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kementerian Agama (Kemenag) adalah biayanya yang lebih murah dibandingkan dengan saat sebelumnya. Biaya sertifikasi halal reguler untuk UMK dipatok Rp 650 ribu.

Rinciannya, Rp300 ribu untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Kemudian, Rp350 ribu untuk pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sedangkan un-

tuk usaha mikro dan kecil (UMK) berlaku tarif Rp 0 melalui mekanisme self declare atau deklarasi halal secara mandiri. "Tarif baru ini jauh lebih murah," kata Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham.

Sebelum ada ketentuan tarif itu, biaya sertifikasi halal relatif lebih mahal. Instansi pusat maupun daerah biasanya mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku UMK sekitar Rp3-4 juta. Untuk usaha menengah sekitar Rp5 juta dan usaha besar maupun asal luar negeri mencapai Rp12,5 juta.

barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sebelumnya, BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022, ditanda-

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam Keputusan Kepala BPJPH," ungkap Aqil Irham di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2022.

Aqil menjelaskan, Label Halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan merepresentasikan Halal Indonesia. "Bentuk La-



Menurut Aqil, penurunan biaya itu bagian dari komitmen afirmasi (kebijakan positif) pemerintah untuk pelaku UMK. Tujuannya untuk stimulasi, khususnya pada masa pandemi seperti sekarang.

Dia mengatakan, pemberlakuan peraturan tarif ini lebih meringankan pelaku usaha serta mendorong akselerasi sertifikasi halal. "Dengan begitu target 10 juta sertifikasi halal dapat kita capai," jelasnya.

Kewajiban untuk mendapat sertifikasi halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Produk yang wajib memiliki sertifikasi halal mencakup

tangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022.

Penetapan label halal tersebut, menurut Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

"Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37

bel Halal Indonesia terdiri atas dua objek, yaitu bentuk Gunung dan motif Surjan atau Lurik Gunung pada wayang kulit yang berbentuk limas, lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia," kata Aqil Irham mengilustrasikan.

"Bentuk gunung itu tersusun sedemikian rupa berupa kaligrafi huruf arab yang terdiri atas huruf 'ha, Lam Alif, dan Lam dalam satu rangkaian sehingga membentuk kata Halal," lanjutnya.

Bentuk tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin mengerucut (golong gilig) manunggal-

ing Jiwa, Rasa, Cipta, Karsa, dan Karya dalam kehidupan, atau semakin dekat dengan Sang Pencipta. Sedangkan motif Surjan yang juga disebut pakaian takwa mengandung makna-makna filosofi yang cukup dalam. Di antaranya bagian leher baju surjan memiliki kancing tiga pasang (enam biji) yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman. Selain itu motif surjan/lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda/pemberi batas yang jelas.

"Hal itu sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk," imbuh Aqil

MUI masih berlaku hingga masa berlakunya habis. "Masih bisa sepanjang sertifikat halalnya masih berlaku. Logo lama masih berlaku sampai batasnya sesuai ketentuan," ujarnya.

Menurut dia, pencantuman label halal yang baru ini untuk yang sertifikatnya dikeluarkan oleh BPJPH. "Sertifikat halal yang diterbitkan dan akan diterbitkan oleh BPJPH, akan menggunakan label halal baru ini," ujar Aqil.

Jadi, penerapan label halal baru ini dilakukan bertahap. Dia menggarisbawahi tidak semua produk harus ganti label halal menggunakan label baru berwarna ungu sekarang. Sedangkan jika sudah kedaluarsa, barulah diganti menggunakan label yang baru.

Nah, Sekretaris BPJPH Muhammad

produk," kata Arfi Hatim.

Sebagai penanda kehalalan suatu produk, maka pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat atau konsumen. Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

"Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal, pencantuman label halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, di samping kewajiban menjaga kehalalan produk secara konsisten, memastikan terhindarnya seluruh aspek produksi dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat



Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham

Irham.

Aqil Irham menambahkan bahwa Label Halal Indonesia menggunakan ungu sebagai warna utama label dan hijau toska sebagai warna sekundernya. "Ungu adalah warna utama Label Halal Indonesia. Warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah Hijau Toska, yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan," jelas Aqil Irham.

Meski begitu, Aqil menjelaskan, produk yang menggunakan logo halal

Arfi Hatim menjelaskan bahwa label Halal Indonesia berlaku secara nasional. Label ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH.

Karena itu, pencantuman label Halal Indonesia wajib dilakukan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. "Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada

halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH," tegas Arfi.

Sekretaris BPJPH Arfi Hatim menambahkan, Label Halal Indonesia terdiri dari dua komponen: Logogram dan Logotype. Logogram berupa bentuk gunung dan motif surjan. Sedangkan Logotype berupa tulisan Halal Indonesia yang berada di bawah bentuk gunung dan motif surjan. Dalam pengaplikasiannya, kedua komponen label ini tidak boleh dipisah.

Secara rinci, warna ungu Label Ha-

lal Indonesia memiliki Kode Warna #670075 Pantone 2612C. Sedangkan warna sekunder hijau toska memiliki Kode Warna #3DC3A3 Pantone 15-5718 TPX. "Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal dan panduan teknis tentang penggunaan label halal selanjutnya dapat diakses di laman resmi BPJPH Kemenag www.halal.go.id/info-penting," jelas Arfi.

"Selanjutnya mari kita gunakan Label Halal Indonesia ini sesuai ketentuan, sebagai penanda yang memudahkan kita semua seluruh masyarakat Indonesia dalam mengidentifikasi produk yang telah terjamin dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH," tandasnya.

Sebelumnya, sejak tahun lalu Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerukan agar proses sertifikasi halal harus dilakukan secara cepat dan murah sekaligus mendorong terisnya Kawasan Industri Halal (KIH) dengan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) halal. KIH merupakan salah satu upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia.

Sejauh ini Indonesia telah membuka sejumlah KIH. Antara lain Sidoarjo Safe N Lock, Modern Cikande Industrial Estate, dan Bintan Inti Industrial Estate telah ditetapkan sebagai KIH. Namun, operasional di kawasan tersebut belum bisa dilakukan karena kendala proses sertifikasi halal dan biaya yang dianggap masih mahal oleh pelaku UMKM.

Wapres meminta pihak-pihak terkait untuk bersinergi agar KIH segera terisi dan beroperasi. Kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Wapres meminta agar segera membuat peraturan terkait dengan sertifikasi produk halal.

"Saya meminta kepada Menteri Agama dan BPJPH agar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan turunannya yaitu terkait dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) jaminan produk halal terutama yang menyangkut kemudahan sertifikasi halal bagi UMK dan pendampingan proses produk halal bagi UMK," ungkap Wapres Ma'ruf.

Selanjutnya, kepada Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),

Wapres mengimbau untuk segera menyelesaikan kodifikasi nomor sertifikasi halal pada pelaporan ekspor dan impor produk halal agar KIH segera terisi. Ia juga meminta fatwa halal yang cepat dari MUI dan promosi yang gencar dari Kementerian Investasi.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Apakah dengan masuknya pemerintah untuk masalah ini, sistem sertifikasi ini akan menjadi lebih mudah atau tidak, lebih murah atau tidak, atau nanti justru menjadi lebih rumit birokrasinya atau menjadi lebih mahal," kata Sholahuddin,



Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim



Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah MUI, KH Sholahuddin Al Aiyub

Sedangkan Ketua Bidang Halal dan Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Sholahuddin Al Aiyub berharap masuknya pemerintah dalam ekosistem sertifikasi halal membuat pekerjaan ini menjadi lebih baik ke depannya. "Ini menjadi tantangan betul bagi teman-teman di BPJPH (Badan

Senin, 14 Maret 2022.

Sholahuddin mengungkapkan, pemerintah masih ada di dalam masa transisi untuk urusan sertifikasi halal ini. "Mekanisme dan aturan-aturan yang digunakan sebelum adanya aturan BPJPH masih menggunakan aturan di MUI," ungkapnya. •



LANGKAH PUAN (SEJAUH INI) BEBAS HAMBATAN

Puan sudah bersosialisasi untuk maju sebagai calon Presiden. Tapi, ada yang bilang, Puan bisa menjadi Cawapres jika skenario Presiden tiga periode menjadi kenyataan.

Perjalanan demi perjalanan menyempatkan Ketua DPR RI Puan Maharani beranjangsana ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada pertengahan Maret 2022. Kedatangan kali ini resminya untuk mempererat kerja sama sekaligus silaturahmi.

Ikut mendampingi Puan beberapa Anggota DPR RI sebagai rombongan: Ahmad Basarah, Utut Adianto, Said Abdullah. Diah Pitaloka juga. Sedangkan

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, dan jajaran pimpinan PBNU lainnya menerima langsung kedatangan Puan dan Rombongan.

"Terima kasih atas pertemuan silaturahmi yang hangat, kami sepakat untuk menjaga harmoni keseimbangan antara seluruh umat beragama. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional," ujar Puan usai pertemuan di Kantor PBNU, Kramat Raya, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa, 15

Maret 2022.

Puan menyampaikan alasan mendatangi kantor PBNU karena ingin meneruskan jejak sang kakek, Presiden pertama Indonesia Soekarno, dan juga ibunya, Megawati Soekarnoputri. Puan menyatakan, keluarganya mempunyai kedekatan dengan para tokoh NU. "In-sya Allah ini menjadi tugas saya untuk melanjutkan silaturahmi keluarga besar Bung Karno dengan PBNU," ucap mantan Menko PMK itu.

Keakraban dan kehangatan selalu



hadir dalam silaturahmi Puan Maharani dengan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Tak hanya dalam pertemuan di PBNU Jakarta, hal tersebut juga terasa dalam silaturahmi yang juga dilakukan Puan saat berkunjung ke kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur kala melakukan kunjungan kerja ke Surabaya.

Ia menambahkan, kedatangannya ke PBNU juga sekaligus sebagai bentuk merajut kerja sama dalam upaya membangun bangsa dan negara. Puan menegaskan, semua anak bangsa harus saling bergandengan tangan untuk membuat Indonesia semakin besar.

"Kami datang ke sini selain silaturahmi tentu saja ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa dan negara itu tidak bisa sendirian. Membangun bangsa itu harus dilakukan secara gotong royong," jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, sejarah kedekatan PDIP dengan PBNU pun diharapkan agar bisa terus dipertahankan. Puan mengatakan, PDIP dan PBNU memiliki satu visi dan misi yang sama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"NU bersama dengan PDIP tentu saja mempunyai konstituen yang sama yaitu wong cilik. Karenanya kami berharap ke depan apa yang menjadi tugas-tugas dari PDIP dengan NU bisa-bisa bersama kami sinergikan, bisa sama-sama kami lakukan secara konkret sampai ke bawah," papar Puan.

"Dan sebagai partai politik kami bersama dengan PBNU dapat tetap menjaga NKRI dan didasarkan nilai-nilai Pancasila yang harus kami implementasikan dengan seluruh hati rakyat Indonesia," lanjut Puan.

Ia pun menyinggung mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang masih ada di Indonesia. Puan mengajak se-

luruh elemen bangsa untuk bersatu membantu penanganan pandemi Covid-19. "Komitmen ini harus bersama-sama kita lakukan untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera, dan konkret dalam melaksanakan hal-hal yang kami lakukan," jelas legislator dapil Jawa Tengah V tersebut.

Puan pun menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Begitu pula dengan Ketua PBNU Gus Yahya, panggilan ringkas Yahya C Staquf. Jumpa pers berlangsung setelah acara pertemuan tertutup dan silaturahmi dengan Gus Yahya beserta pengurus yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu dalam Kongres Nahdlatul Ulama di Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Gus Yahya, Bu Puan Maharani kan akan mencalonkan diri jadi Presiden pada 2024 nanti, bagaimana sikap PBNU apakah akan mendukung?" tanya seorang wartawan kepada Yahya Cholil Staquf pada akhir jumpa pers di

beranda Kantor PBNU itu.

Ketua Umum PBNU masa khidmat 2022-2027 yang biasa disapa Gus Yahya itu agaknya tak menyangka mendapat pertanyaan itu.

Namun dengan spontan ia menjawab, "Saya belum diberitahu, jadi belum bisa kasih pernyataan." Jawaban itu membuat para suasana menjadi riuh bersahutan riuh. Sedangkan Puan yang berdiri di sebelah Gus Yahya tertawa.

2024 yang diusulkan segelintir orang, tetap mengemuka dalam tanya jawab dengan wartawan. Secara lugas Puan mengatakan bahwa DPR RI akan berpegang pada keputusan yang telah diambil bersama dengan pemerintah perihal waktu penyelenggaraan pemilu.

"Sudah ditetapkan bersama oleh DPR RI dan Pemerintah bahwa Pemilu nanti akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi DPR akan berpegang

anan lebih di masyarakat. "Dia ingin mengambil peran di masyarakat menjadi orang pertama yang mencecar, mitra yang paling mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini. Dan ini menunjukkan bahwa dia juga sedang genit terhadap masyarakat," kata Efriza.

Sikap kritis Puan itu, kata Efriza, harus dipertahankan karena memberikan nilai positif bagi anak Megawati Soekarnoputri itu. Selain itu, sikap tersebut juga memberikan kepercayaan ter-



Analisis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin

Sebelumnya Gus Yahya mengemukakan banyak kemungkinan kerja sama pasca pertemuan dan silaturahmi itu. "Banyak yang akan kami kerjakan bersama, baik dengan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI maupun Mbak Puan sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Dalam perbincangan tadi, kami mencapai banyak kesepahaman soal bagaimana berbagi tugas untuk merawat dan membangun bangsa," katanya.

Kendati silaturahmi tersebut sama sekali tak membahas persoalan politik, pertanyaan seputar Pemilu, terutama terkait wacana penundaan Pemilu

pada kesepakatan itu," katanya.

Hal ini tentu menegaskan bahwa sikap yang diambil oleh DPR RI selaras dengan apa yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Yakni menolak wacana penundaan Pemilu yang merupakan pelanggaran konstitusi dan penyelewengan amanat rakyat.

Toh belakangan ini Puan tampak kerap mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Misalnya soal krisis minyak goreng.

Menurut pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, Puan menunjukkan bahwa dia bisa mengambil per-

hadap publik bahwa Puan mewakili kepentingan rakyat.

"Apa yang disampaikan itu jangan sampai datar, harus tetap kritis, harus juga punya solusi, jangan tidak ada aksi atau dampak nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat," sambungnya.

Puan pun saat ini tengah menikmati kenaikan elektabilitas berdasarkan hasil survei Laboratorium Suara Indonesia (LSI), di mana dia masuk ke posisi lima besar dengan tingkat keterpilihan 6,2 persen. Biasanya elektabilitas hanya nol koma atau satu koma.

Pengamat politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, melihat naiknya tingkat

keterpilihan Puan tidak terlepas dari hasil kerja yang dapat memuaskan publik. Penerimaan publik terhadap Puan didasari penilaian positif langkah politik yang dilakukannya belum lama ini, yang sering mengkritik kebijakan pemerintah pusat dan sering mengangkat permasalahan yang sehari-hari dialami masyarakat.

Dari hasil survei itu, kata Wasisto, saat ini Puan Maharani bisa dibilang sudah diterima masyarakat. Hal ini juga akan memberikan keyakinan di internal PDIP, yaitu Puan layak diusung pada Pilpres 2024.

"Keyakinan internal itu akan secara bertahap naik jika penerimaan publik terhadap mereka berdua (Puan dan PDIP) tetap positif," kata Wasisto. Namun, sergahnya, Puan harus tetap mempertahankan posisinya dengan lebih rajin tampil di depan publik dan menjadi komunikator yang baik bagi masyarakat.

"Saya pikir menjadi sosok objektif, meski dalam koalisi; dan juga peduli dengan rakyat adalah kuncinya," tandas Wasisto.

Soal pernyataan Puan tentang Pemilu sudah fixed 14 Februari 2024, tentu saja masih normatif di tengah gencarnya wacana penundaan Pemilu yang berimplikasi perpanjangan jabatan Presiden.

Analisis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, memprediksi pada akhirnya PDIP mendukung Jokowi menjabat presiden satu periode lagi, dengan catatan penting.

"Hari ini PDIP keras kritik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, tetapi kalau skenarionya Jokowi dan Puan Maharani, saya yakin PDIP belum tentu menolak," kata Ujang.

Ujang juga mengungkap pertemuannya dengan salah satu menteri sekaligus petinggi partai di koalisi pemerintahan Jokowi. "Ketika berdiskusi dia mengatakan,

'Jang, ini ada desain menunda pemilu dan memperpanjang jabatan presiden'. Saya bilang, apa iya?" lanjut Ujang

Alasannya Komisi II DPR, KPU, Bawaslu sudah menetapkan pemilu pada 14 Februari 2024. "Dia bilang, 'Apa sih yang nggak mungkin di Indonesia',"

kata Ujang

tanpa menyebut nama menteri dimaksud.

"Proses amendemen bisa terjadi. Mahathir Mohamad (mantan PM Malaysia yang menjabat terlama) pernah mengatakan politik itu drama. Ternyata, ketika saya

dapat informasi itu, ada dirigennya, ada yang mengatur. Seminggu berikutnya, Cak Imin, Airlangga (Ketum Golkar), dan Zulkifli Hasan langsung mengatakan pemilu ditunda. Saya katakan, wah ini betul-betul skenario yang by design. Siapa yang biayain? Oh ini, tetapi saya tidak sebutkan di sini, tetapi ini A1," imbuhnya.

Ujang mengaku, bertemu pula den-

pemerintah memiliki cukup kekuatan untuk itu, DPR dan MPR dipimpin koalisi pemerintah, tidak ada yang sulit. Meskipun menjalankan amendemen dalam waktu singkat, tentu tidak perlu dibahas soal kualitas. Kualitas itu nomor sekian," tandas Dedi.

Nah, kembali ke pertemuan Puan dan Gus Yahya, Ketua Umum PBNU menegaskan lembaganya akan menjadi fasilitator dialog antara rakyat dan pemerintah terkait isu penundaan Pemilu. "PBNU ini cuma mendengar dan mungkin menjembatani di awal, jika diperlukan," kata Gus Yahya.

PBNU juga akan menerima keputusan yang dikeluarkan pemerintah dan parlemen dalam isu Pemilu 2024.



Pengamat politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati

gan pimpinan partai koalisi lainnya usai Mahfud MD menegaskan bahwa Jokowi tetap menginginkan pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. "Begitu Mahfud katakan pemilu tetap 2024, maka narasi penundaan, narasi perpanjangan masa jabatan presiden beralih lagi kepada narasi (Jokowi) tiga periode. Kembali ke skenario awal. Pimpinan dari partai lain katakan ke saya, 'kalau Presiden inginkan amendemen, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma skenarionya adalah tiga periode itu,' ungkap Ujang.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai amendemen UUD 1945 sangat memungkinkan. "Mungkin saja (amendemen dilakukan),

"Kami persilakan saja kepada yang berwenang untuk membahasnya. PBNU akan menerima apa pun putusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang, pemerintah, DPR, dan pihak lain," katanya.

Mengenai sikap PBNU terkait pemilu mendatang, Gus Yahya mengatakan akan mengikuti suara terbanyak yang dihasilkan parlemen dan pemerintah. "Silakan, kita tinggal ikut saja," tandasnya

Jadi, dinamika politik mengenai penundaan Pemilu 2004 dan perpanjangan jabatan ataupun amendemen konstitusi untuk kemungkinan tiga periode jabatan Presiden masih akan berlanjut. Sedangkan perjalanan Puan, sejauh ini, memang belum menemui hambatan. ●



TANTANGAN TEKNOLOGI DI WADUK JATILUHUR

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum pernah menjadi sorotan lantaran sempat menjadi sungai yang paling tercemar di dunia. Termasuk Waduk Jatiluhur yang membendung aliran sungai yang melekat dengan nama kerajaan kuno Tarumanagara itu. Bagaimana sekarang?

Desakan memenuhi kebutuhan pangan memicu teknologi dan inovasi. Namun, dampak dan tata kelolanya memerlukan perhitungan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Begitu pula dengan DAS Citarum di Jawa Barat.

Saat menjadi salah satu panelis dalam dialog bertema "Panel Dialogue: Scaling Up Governance and Collaborative Ac-

tions In Combating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions In Indonesia" sebagai rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia, akhir tahun lalu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memaparkan, pada 2018 pengukuran kualitas air, sungai yang melekat dengan nama kerajaan kuno Tarumanagara ini dalam kondisi cemar berat dengan indeks

kualitas air (IKA) sebesar 33,43 poin.

Pada 2018 itu Citarum harus menerima julukan sebagai sungai paling kotor di dunia. Namun kini, kata Ridwan Kamil, kondisi Citarum mulai membaik. Pada periode 2020-2021, Citarum memiliki IKA sebesar 55 poin dan masuk dalam kategori cemar ringan.

Menurut Ridwan Kamil, pemulihan kondisi Sungai Citarum penting dike-



tahui dunia. Salah satu alasannya, sungai sepanjang 270 kilometer itu telah menjadi sumber kehidupan bagi 18 juta penduduk yang tersebar di 13 kabupaten dan kota yang dilintasinya.

Sungai terpanjang di Jabar itu juga memiliki peran penting bagi kemakmuran lahan seluas 682.227 hektare (ha) di sejumlah 1.454 desa. Ridwan Kamil memaparkan, upaya pemulihan Sungai Citarum sebelumnya menargetkan agar kualitas air masuk kategori cemar sedang.

Kini, kualitas air telah masuk kategori cemar ringan yang memungkinkan penggunaan air sungai untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, dan mengairi tanaman. Namun, budidaya ikan air tawar yang menggunakan teknologi keramba jaring apung itu ternyata menimbulkan dampak negatif baru. Yang menonjol adalah di Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat yang bernama resmi Waduk Ir H Juanda ini.

Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, waduk itu pada 2020 menampung sekitar 160 ribu unit keramba jaring apung. Sementara perhitungan daya dukung waduk hanya sebesar 21.000 unit atau sekitar 12 persennya saja. Malah bukan hanya di Waduk Jatiluhur saja keramba jaring apung ini menjadi masalah, melainkan di waduk lain di DAS Citarum: Waduk Saguling di Bandung Barat dan Waduk Cirata yang berlokasi di tiga kabupaten: Bandung, Cianjur, dan Purwakarta.

Dampak jumlah keramba jaring apung yang berlebihan itu adalah limbah pakan maupun limbah ikan budidaya yang juga melimpah. Alhasil, tumbuhan air eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) yang termasuk gulma (tumbuhan pengganggu) berkembang pesat memenuhi permukaan air waduk. Terlebih pada musim hujan.

Di awal musim hujan Oktober 2021

lalu, misalnya, sebaran eceng gondok di Jatiluhur bukan main luasnya. Malah ada yang menyebutnya paling parah dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Jatiluhur Atim Priantono mengatakan, luasan eceng gondok yang merambat di waduk Jatiluhur hampir mencapai 10 persen dari luas waduk atau danau. "Kalau tahun ini termasuk yang paling parah, karena menurut perkiraan pertumbuhan eceng gondok saat ini hampir mencapai 1.000 ha," ungkap Atim, Senin, 18 Oktober 2021.

Sedangkan luas total Waduk Jatiluhur mencapai sekitar 8.300 ha. Dengan demikian eceng gondok sudah memenuhi hampir 15 persen kawasan perairan bendungan terbesar di Indonesia itu.

Selain luas, pertumbuhan gulma air tawar itu termasuk cepat dan dapat mencapai ketinggian yang mengganggu karena

saking suburnya zat hara yang tersedia dari limbah pakan dan limbah ikan. "Kalau di tengah waduk, eceng itu hampir satu meter tingginya. Dibandingkan dengan perahu jukung, ukuran eceng gondok justru lebih tinggi eceng," kata Atim.

Sedangkan Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jatiluhur mengidentifikasi beberapa dampak yang akan terjadi jika tanaman gulma tersebut semakin menebal dan tidak tertangani. Direktur Operasional PJT II Jatiluhur Anton Mardiyono menyebutkan, dampak tersebut antara lain kualitas air di banyak ekosistem menjadi sangat menurun, eceng gondok yang mati akan tenggelam dan mempercepat proses pengendapan air.

hilangnya nilai konservasi, estetika, rekreasi, dan pariwisata sehingga dibutuhkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak sedikit untuk mengatasinya," ungkap Anton.

Nah, soal pariwisata ini, 23 wisatawan sempat terjebak eceng gondok di tengah Waduk Jatiluhur pada Minggu malam, 17 Oktober 2021. Untungnya, tim pencari dan penyelamat (SAR) gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban pada tengah malam.

"Kantor SAR Bandung menerima laporan pada pukul 20.20 WIB dari pihak keluarga korban terkait 23 orang yang terjebak di Waduk Jatiluhur, Kab. Purwakarta terdiri dari 20 orang dewasa dan 3 Orang anak," tulis akun Instagram Basarnas Jabar

ran yang cukup dalam.

Nah, bagaimana penanganan eceng gondok di Waduk Jatiluhur? Anton mengemukakan upaya Jasa Tirta II dalam penanganan persoalan tersebut dengan penanggulangan semi mekanis melalui pengarahannya ke darat (netting) dan pengangkatan di pinggir menggunakan backhoe, amphibious, dump truck. Penanggulangan full mekanis dengan pengangkatan di air dengan menggunakan harvester dan storage barge. "Selain itu Jasa Tirta II bersama dengan para stakeholder melaksanakan kegiatan insidental dalam pengangkatan eceng yang berada di pinggir-pinggir perairan waduk," kata dia.

Penanganan itu rupanya menghadapi



"Bila eceng masuk ke dalam intake (saluran air masuk) dapat mengganggu operasional bendungan. Juga konsentrasi oksigen terlarut sangat rendah. Bahkan sampai batas nol," kata Anton, Minggu, 24 Oktober 2021.

Tidak hanya itu, kata dia, makhluk hidup air, seperti ikan dan spesies lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik sehingga akhirnya mati. Hilangnya ikan dan hewan lainnya dalam mata rantai ekosistem air menyebabkan terganggunya keseimbangan air, antara lain berkembangnya cyanobacteria (blue-green algae) yang mengandung toksin sehingga membawa risiko kesehatan bagi manusia dan hewan. "Juga

dalam unggahannya pada 17 Oktober 2021.

Para korban dikabarkan sedang bertibur bersama keluarga ke Waduk Jatiluhur menggunakan perahu jukung. Namun perahu terjebak di tengah waduk karena tertutup Eceng Gondok sehingga tidak bisa kembali ke daratan dan membutuhkan evakuasi.

Tumbuhan air ini sudah memenuhi hampir seluruh permukaan air waduk. Mereka kehabisan bahan bakar dan terjebak di antara tebalnya tanaman tersebut. Selama menunggu mereka pun sempat merasa khawatir bantuan tidak datang. Sedangkan posisinya berada di tengah perairan

banyak kendala. Antara lain faktor cuaca kalau terjadi hujan dan alat yang tersedia untuk melakukan pengangkatan tidak sebanding dengan tebaran eceng gondok dan luasannya yang mencapai seribu hektare.

Soal penanganan eceng gondok di Jatiluhur tentu saja merupakan bagian dari perbaikan DAS Citarum. Sejak Citarum mendapat julukan sungai paling tercemar di dunia, pemerintah pusat tanggap untuk memperbaikinya. Alhasil, keluarlah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang diteken Presiden Joko

Widodo pada 14 Maret 2018 lalu.

Nah, memperingati ulang tahun keempat Perpres 15 Tahun 2018 itu, sejumlah pemangku kepentingan berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Pengarah dana Perpres ini salah satunya. Tampak pula Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Duta Besar Jerman Ina Lepel, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono menyampaikan tiga solusi alternatif mengatasi pencemaran eceng gondok di Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Solusi ini sekaligus untuk mendukung program Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum sesuai dengan amanah Perpres 15 Tahun 2018.

"Permasalahan yang ditemukan di lapangan memang harus segera ditangani dengan baik. KKP siap," ujar Menteri Trenggono dalam kunjungan yang berlangsung pada Selasa, 15 Maret 2022. Menurut dia, langkah alternatif untuk mengendalikan limbah dari kegiatan budidaya di waduk pada DAS Citarum antara lain pengurangan jumlah unit keramba jaring apung sesuai dengan daya dukungnya. "Sudah ada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37/2021 tentang ini," ungkap Pak Menteri Kelautan dan Perikanan.

Setelah jumlahnya sesuai dengan daya dukung ekosistem, lanjutnya, keramba jaring apung yang berada di waduk harus diubah menjadi lebih ramah lingkungan. Menteri Trenggono juga menginformasikan kementeriannya melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Riset Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Jatiluhur telah mengembangkan keramba jaring apung ramah lingkungan Sistem Manajemen Air Resirkulasi Terintegrasi (KJA SMART), dengan mengintegrasikan budidaya ikan dengan tanaman.

Alternatif ketiga yakni moratorium (penghentian sementara) budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung selama periode waktu tertentu, lalu dilakukan perbaikan produktivitas perairannya. "Setelah produktivitas perairan pulih, maka kegiatan budidaya dapat dilakukan kembali dengan penataan yang lebih ramah lingkungan dan pengawasan yang lebih

ketat," tambahnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sejauh ini telah memberikan dukungan kegiatan perikanan berkelanjutan di DAS Citarum dan pendampingan bagi masyarakat terdampak untuk alih profesi. Langkah konkret operasional yang telah dilaksanakan antara lain pendampingan teknis budidaya ikan, monitoring dan pemberian bantuan untuk pembudidaya yang beralih profesi, salah satunya bantuan sarana budidaya bioflok.

"Melalui langkah konkret tersebut dan

telah ditetapkan," pungkasnya.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi solusi yang disampaikan oleh Menteri Trenggono. Menurutnya, kegiatan budidaya di DAS Citarum memang harus ditata dan dikelola dengan baik. "Luar biasa kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bukan tidak boleh mengembangkan keramba jaring apung. Tapi semua harus ditata," ujarnya.

Jadi, kata dia, jumlah keramba jaring apung harus dibatasi sesuai dengan daya tampung dan daya dukung waduk. "Lebih



dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat turut memperbaiki lingkungan dan produktivitas perairan, sehingga Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang

dari itu mohon maaf, karena enak di kalian tidak enak ke orang lain. Pengaturan ini harus kita sepakati bersama," tandas Luhut.

Nah, kita tunggu pelaksanaannya. Juga berharap terobosan teknologi baru yang menyertainya. ●



TANAH DAN AIR BERSATU DI IBU KOTA NUSANTARA

Gabungan tanah dari berbagai penjuru daerah di Indonesia bersatu dalam Kendi Nusantara. Simbol dukungan untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Adalah Presiden Joko Widodo langsung yang memimpin prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara dari 34 gubernur dan perwakilan gubernur seluruh Indonesia. Lokasinya di kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022.

Didampingi Ibu Negara, Iriana Jokowi, Presiden tiba di kawasan Titik Nol IKN disambut oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Aji Muhammad Arifin. Sultan Kutai Kartanegara kemudian menggelar prosesi adat sebelum Presiden dan Ibu Negara berjalan menuju Titik Nol IKN.

Sedangkan Presiden dan Ibu Negara berjalan menuju Titik Nol IKN diiringi tarian Ganjar Ganjur dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Selanjutnya Presiden menginisiasi ritual Kendi Nusantara dengan meminta setiap gubernur membawa sebanyak dua kilogram tanah dan satu liter air dari daerahnya masing-masing.

Tanah dan air diambil dari lokasi yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah. Berlanjut kemudian, tanah dan air dari seluruh provinsi dimasukkan ke dalam kendi bernama Kendi Nusantara yang terbuat dari tembaga. Ritual inilah yang

disebut dengan ritual Kendi Nusantara yang secara filosofis dimaknai sebagai simbolis dari kalimat Tanah Air Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat kesempatan untuk menuang tanah dan air ke dalam kendi pertama kali. Sedangkan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjadi penuang terakhir sekaligus menutup prosesi tersebut. Anies merupakan Gubernur yang wilayahnya menjadi Ibu Kota lama, sedangkan Isran adalah Gubernur temat wilayahnya menjadi Ibu Kota baru.

Presiden mengatakan, penyatuan tanah dan air Nusantara ini menandai

cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera dimulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. "Saya hadir di sini bersama-sama 34 gubernur dari 34 provinsi dari seluruh Tanah Air, bersama 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur. Kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Lalu Presiden menekankan pula bahwa prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara merupakan bentuk kebhinekaan dan persatuan yang kuat untuk membangun Ibu Kota Nusantara. "Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam pembangunan ibu kota negara ini akan sangat membantu apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud," kata Presiden.

Sebelum pelaksanaan ritual Kendi Nusantara, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada seluruh gubernur di Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Minggu, 13 Maret 2022 malam. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyatakan proses penyatuan tanah dan air yang dibawa dari seluruh Indonesia menjadi momen bersejarah yang akan selalu dikenang oleh generasi mendatang.

"Seluruh gubernur dari seluruh daerah berkumpul dan menyatukan tanah-tanah yang ada di wilayah Indonesia ini. Jadi ini sebuah sejarah yang menurut saya mungkin tak ada di dunia, baru kali ini terjadi di Indonesia," ujarnya di kawasan Titik Nol IKN Nusantara.

Setelah melaksanakan ritual Kendi Nusantara, Presiden mengikuti prosesi penanaman pohon khas dari 34 provinsi di Titik Nol IKN Nusantara. Pada kesempatan ini Presiden menanam pohon meranti merah (*Shorea leprosula*), sedangkan Ibu Negara Iriana Jokowi menanam pohon kamper (*Dryobalanops aromatica*).

Prosesi penanaman pohon diikuti pula 34 gubernur dari seluruh provinsi dengan menanam pohon khas dari daerahnya masing-masing. Antara lain pohon kemiri, kecapi, rasamala, rambutan, bisbul, pala, kemang hingga

bengkirai.

Presiden mengatakan, rangkaian prosesi tersebut dilakukan untuk menandakan persatuan Indonesia. "Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang

agar cita-cita bangsa bisa segera terwujud.

Nah, Senin malam 14 Maret 2022, Presiden bermalam di Titik Nol IKN Nusantara menggunakan tenda. Kegiatan berkemah Presiden menandakan



kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini," ujar Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta dan seluruh masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan IKN akan sangat membantu

keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara.

Tempat Presiden Jokowi berkemah merupakan lokasi Istana Negara kelak akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. Presiden dan Ibu Negara berkemah di lokasi IKN hingga Selasa, 15 Maret 2022 siang.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru

Budi Hartono, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, tidak ada makanan khusus saat Presiden dan Ibu Negara bermalam di kawasan Titik Nol IKN. Selain kue dan buah-buahan, pihak Istana juga menyediakan mi instan di dalam tenda.

"Makanan biasa saja kue dan buah. Enggak ada makanan khusus, paling mi instan," kata Heru.

Isran Noor satu-satunya kepala daerah yang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemah di dekat lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan 33 gubernur lain batal ikut karena tempat dan fasilitas di lokasi berkemah terbatas.

"Presiden menginap bersama Ibu Negara (Iriana Jokowi). Gubernur hanya Kalimantan Timur saja (karena) kondisi tempat sangat terbatas. Fasilitas air dan lain-lain juga sangat terbatas," ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Jakarta, Senin, 14 Maret 2022.

Menurut Heru, kondisi lapangan dan sarana yang terbatas membuat para kepala daerah urung menginap di lokasi. "Karena sarana yang terbatas.

Air, tenda, dan lahan yang tidak rata," ujar Heru saat dikonfirmasi pada Senin siang.

Heru menyampaikan Presiden sudah mengecek tenda yang akan dijadikan tempat untuk bermalam. Tenda Presiden begitu sederhana. Tidak banyak fasilitas yang tersedia.

Ia merinci fasilitas di dalam tenda hanya terdapat kasur dan tidak ada pendingin ruangan. "Isi tenda hanya kasur saja, tidak ada AC," tambah Heru.

Sedangkan tenda di perkemahan yang digunakan Presiden bersama Ibu Negara merupakan barang inventaris. Tenda tersebut dibeli saat gempa bumi terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, pada 2019; namun belum sempat dipakai.

"Itu tenda inventaris, sudah lama punya Setpres. Sudah lama inventaris, 2019 saat gempa Poso. Belum sempat dipakai saat gempa dulu," jelas Heru.

Ia menyebutkan, tenda jenis inflatable air itu bermerek Quechua Arpenaz. Karena kondisi yang dinilai masih bagus, pihak Istana pun tidak membeli tenda baru untuk digunakan Presiden saat berkemah di IKN.

Sekretariat Presiden juga menyediakan enam unit kamar mandi untuk Presiden dan para menteri serta pejabat lainnya yang turut berkemah. Fasilitas sanitasi terdiri dari shower dan toilet duduk. Menurut pihak Istana, pemakaian shower dinilai lebih hemat dalam penggunaan air daripada gayung.

"Kalau gayung kan boros. Shower biar hemat karena air terbatas. Kalau lima gayung itu shower sudah cukup untuk mandi, tetapi kalau gayung bisa satu ember satu orang," jelas Heru.

Di area perkemahan juga terdapat tenda-tenda untuk para menteri dan rombongan yang turut bermalam. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga turut berkemah mendampingi Presiden. Antara lain Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia; dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Kemudian ada Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono; Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe; serta Gubernur Kaltim, Isran Noor. ●





6 BERHALANGAN, 1 KELELAHAN

Dari 34 Gubernur Provinsi di Indonesia, enam antaranya berhalangan hadir dalam acara Kendi Nusantara. Sedangkan satu Gubernur kelelahan dan mengalami dehidrasi karena cuaca di lokasi acara memang bersuhu tinggi.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengungkapkan, enam Gubernur berhalangan hadir dengan alasan kesehatan. "Semua izin karena kesehatan kurang fit. Semua alasan ijin karena kesehatannya," ungkapnya Senin, 14 Maret 2022.

Yang tak hadir antara lain adalah Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Para gubernur yang berhalangan itu mewakili kedatangan mereka kepada Wakil Gubernur hingga Asisten Gubernur.

Mewakili Gubernur Papua Lukas Enembe adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua, Y. Derek Hagemu. Dalam acara tersebut, Derek menyerahkan tanah yang dikumpulkannya dari 29 Kabupaten/Kota di Papua.

Sementara untuk Gubernur yang hadir dalam acara tersebut, antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Bas-

wedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dalam acara itu, Jokowi mengundang seluruh dari 34 gubernur di Indonesia. Para gubernur itu diminta membawa tanah dan air dari lokasi yang dianggap menggambarkan kekhasan dan kearifan lokal daerah masing-masing.

Anies Baswedan misalnya, membawa tanah dan air dari Kampung Akuarium yang merupakan salah satu lokasi pembinaan kawasan kumuh di Jakarta. Sedangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membawa tanah dari lokasi situs Keraton Kerajaan Majapahit.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membawa air dan tanah dari sejumlah gunung di Jawa Tengah yang diyakini menjadi puser bumi atau pusat dunia. Sedangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membawa tanah dan air yang dia kumpulkan dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Di lokasi acara Kendi Nusantara, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura sempat mengalami kelelahan. Meski sempat ditangani tim kesehatan, penanganan tak berlangsung lama dan kondisi Gubernur kembali pulih.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulawesi Tengah, Eddy Nicolas Lesnusa mengklarifikasi pem-

beritaan media yang menyebutkan kelelahan ikut seremoni titik nol di IKN Gubernur Sulawesi Tengah Pingsan. Menurut dia, situasi lokasi titik Nol Nusantara yang berbukit ditambah teriknya matahari sempat membuat Gubernur Rusdy Mastura dehidrasi dan kelelahan.

"Jadi tidak benar kalau dibilang pingsan. Beliau hanya mengalami kelelahan. Tapi sudah kembali pulih setelah mendapat penanganan tim medis di lapangan. Saat ini kondisi beliau segar seperti biasa," kata Eddy.

Menurut dia, seluruh prosesi seremoni di titik Nol Nusantara, IKN diikuti Gubernur Rusdy Mastura dengan tuntas bersama Presiden. Tanah dan air yang dibawa dari Sulawesi Tengah sudah diserahkan Gubernur Rusdy kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan saat presiden kesulitan membuka bungkusan tanah, Gubernur Cudydemikian biasa disapa dengan cekatan membantu membuka bungkusan tersebut dan selanjutnya dituangkan ke dalam wadah Nusantara.

Sedangkan Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan cita-cita pembangunan Otorita IKN. Ia berharap dukungan terhadap pembangunan Otorita IKN dapat terus mengalir dari berbagai instansi dan masyarakat. ●



PILIH-PILIH KONTINGEN MERAH PUTIH

Indonesia dipastikan tak akan datang dengan kekuatan besar ke ajang SEA Games 2020 di Hanoi, Vietnam, 12-23 Mei. Kontingen Merah Putih hanyalah cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menegaskan, langkah itu dilakukan mengingat SEA Games hanya sasaran antara pembinaan prestasi olahraga nasional atau evaluasi menuju Asian Games.

Meski begitu, Kemenpora saat ini belum menentukan cabang olahraga mana saja yang akan dikirim ke Vietnam. Pasalnya masih dalam tahap penilaian tim independen.

"Sekarang ini sedang proses review. Meski pelatnas sudah jalan sejak Januari, tetapi kami memprioritaskan cabang-cabang yang mendukung kami di DBON. Karena kita akan segera ikut kualifikasi Olimpiade Paris 2024," kata Zainudin usai menutup Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Tangerang, Selasa (8/3/2022).

Menurutnya, Kemenpora akan memfokuskan cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan banyak

medali dan berpotensi menjadi juara umum cabang olahraga.

Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, menambahkan, partisipasi dalam SEA Games 2022 hanya bentuk solidaritas Indonesia kepada tuan rumah Vietnam dan komunitas olahraga Asia Tenggara. Sebab, SEA Games seharusnya digelar 2021, namun diundur ke 2022 akibat lonjakan kasus COVID-19 di Vietnam.

Penundaan tersebut berakibat



pembatasan anggaran persiapan dan keberangkatan menuju multievent dua tahunan itu. Okto juga menyebut, pengiriman atlet ke SEA Games harus dibatasi, hanya untuk cabang olahraga yang berpotensi meraih medali.

"Jadi, tentunya agak kurang tepat apabila ditanya target, karena ini bukan tempatnya target, tetapi hanya sebatas partisipasi kita di Asia Tenggara. Apabila ada yang mandiri, berdasarkan kesepakatan kami dengan cabor. Semua cabor akan kami berangkatkan apabila mereka mau mandiri, artinya mereka mau berisiko (membayar) sendiri dan kami akan mendukung mereka," kata Okto.

Sementara itu, cabang olahraga atletik menargetkan bisa membawa pulang delapan medali emas SEA Games 2022. Target tersebut masih bisa terealisasi di tengah keterbatasan kejuaraan saat ini. Terutama ketika atletik Indonesia tidak akan melakukan uji coba ke luar negeri dalam persiapan menuju SEA Games.

"Kalau bicara peluang kekuatan, kami melakukan pengumpulan data apa yang mereka lakukan. Kekuatan kami masih baik. Tujuh hingga delapan medali emas bisa diperoleh, bahkan bisa lebih. Tidak hanya Indo-

nesia. Thailand, Malaysia, Singapura juga sama sulit melakukan uji coba," kata Sekretaris Jenderal PB PASI, Tigor Tanjung.

Pada SEA Games edisi sebelumnya di Filipina, Indonesia meraih 16 medali



dengan rincian 5 emas, 6 perak, dan 5 perunggu, di bawah Vietnam (16 emas) Thailand (12), Filipina (11), dan Malaysia (5).

Terkait keterbatasan anggaran, PB PASI harus memangkas jumlah atlet yang akan dikirim ke Vietnam nanti. Tigor menyebut, dari 39 atlet yang tergabung di pelatnas, kemungkinan hanya ada 23 yang bisa diberangkatkan.

Namun, keputusan tentang nama-nama atlet yang akan diturunkan belum bisa dipastikan. Sebab masih perlu dibicarakan lagi dengan KOI dan Kemenpora.

di Gedung Kemenpora, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Zainudin menyebut, kehadiran IG-ORNAS sangat strategis untuk mewujudkan peta jalan pembinaan olahraga yang dimulai dari hulu ke hilir. Guru olahraga berperan penting dalam pencarian talenta-talenta berbakat yang ada di sekolah.

"Peran aktif saudara-saudara guru olahraga sangat penting. Tak hanya berperan di hulunya untuk meningkatkan kebugaran masyarakat, khususnya para siswa dan siswi di SD, SMP, tetapi juga sampai hilirnya tentang pembinaan prestasi. Saya sangat berharap, peran aktif dari para guru olah-

kebugaran jasmani yang benar. Serta meluncurkan dan menghidupkan kembali Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di sekolah-sekolah.

Dia menyebut, saat ini, ada sekitar 600-700 ribu guru olahraga di seluruh Indonesia, baik yang berada di bawah naungan Kemendikbud maupun Kemenag. Dia memastikan guru-guru olahraga di seluruh Indonesia dapat terlibat dalam implementasi DBON guna meningkatkan kebugaran masyarakat dan pengembangan prestasi olahraga nasional.

"Tentunya ini PR kita semua untuk mensosialisasikan di seluruh Indonesia. Dan ini selanjutnya tidak



Cari Talenta Dari Sekolah

Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mendorong penerapan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) kepada semua pihak, termasuk guru olahraga. Mereka diminta menerapkan DBON demi meningkatkan kebugaran masyarakat dan pengembangan prestasi olahraga.

Pernyataan itu disampaikan Menpora Zainudin Amali saat mengukuhkan Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS) masa bakti 2021-2025

raga di seluruh Indonesia untuk mendukung implementasi DBON," ungkap Zainudin.

Sementara itu, Ketua Umum IGORNAS, Dikdik Setia Munardi, mengatakan, pihaknya dan pengurus sudah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai peningkatan kebugaran masyarakat dan pengembangan prestasi olahraga.

Langkah yang telah disiapkan di antaranya dengan mengadakan pelatihan bagi pelatih (TOT) untuk mengetahui bagaimana cara mengukur indeks

hanya di pusat saja, sinergi dengan Kemenpora sangat luar biasa. Kemenpora sudah menjadi rumah kami, ini harus ditindaklanjuti ke tingkat provinsi, harus masif, sehingga talenta-talenta kita persiapkan bersama," terangnya.

"Dengan usaha yang masif, bersinergi dari pusat hingga daerah, ditargetkan masalah di hulu terkait kebugaran dapat teratasi. Jika tahun lalu indeks kebugaran masih rendah, tahun depan dan tahun-tahun berikutnya dapat terus meningkat," pungkasnya.

PB ESI Gelar Pelatnas Jelang SEA Games

Sebanyak 128 atlet esport akan mengikuti program pemusatan pelatihan nasional (Pelatnas) untuk persiapan SEA Games 2022 Vietnam, Mei mendatang.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zai-nudin Amali, pun memberikan semangat dan mengingatkan kembali misi yang diemban para atlet adalah untuk mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

"Sejak awal diundang ke tempat ini sudah tahu tugas dan misinya membuat lebih dari 270 juta penduduk Indonesia bangga atas prestasi esport Indonesia.

Menpora juga mengapresiasi kinerja PBESI yang dengan sigap menyampaikan lampiran lengkap laporan penyelenggaraan pertandingan esport dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua September lalu, meski masih dalam kategori ekshibisi.

"Kemenpora akan selalu memberikan dukungan kepada pengurus esport dan perkembangan cabang olahraga esport Tanah Air. Apalagi kalau prestasi ditunjukkan, maka dukungannya bertambah," ujar Menpora.

Ketua Harian PBESI, Bambang Sunarwibowo, mengungkapkan, pihaknya telah memiliki konsep besar, mulai penerapan regulasi yang ada secara

kali ini memiliki persiapan yang lebih matang dibandingkan pelatnas SEA Games 2019 Filipina, di mana Indonesia belum mampu membawa pulang emas.

"Kami menyiapkan semua aspek, dari fisik, mentalitas, nutrisi. Untuk kali ini kami sangat yakin dan optimis untuk mendapat medali," tutur Ibnu.

Program Pelatnas akan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama akan berlangsung 1-10 Maret 2022. Fokus Pelatnas tahap pertama adalah untuk melatih dan menyeleksi seluruh anggota kontingen SEA Games 2022. Tahap selanjutnya akan lebih fokus pada mentalitas.



Bagaimana rakyat Indonesia bangga, kalian harus berprestasi dengan kembali ke Tanah Air membawa medali," kata Menpora di depan para atlet esport di Jeep Station Indonesia, Mega Mendung, Bogor, Senin (7/3/2022).

Kehadiran Menpora merupakan kunjungan pertamanya ke cabang olahraga yang melakukan persiapan menuju pelatnas SEA Games Vietnam, setelah mendapat undangan dari Ketua Harian Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI), Bambang Sunarwibowo.

berlanjut dan berjenjang dari mulai pusat hingga daerah.

PBESI mengusung strategi sosialisasi esport yang ada dengan melakukan berbagai program pembinaan, termasuk akademi esport dan program pelatihan pusat, yakni pelatnas.

"Ada juga pembinaan berjenjang dari Piala Pelajar, Piala Mahasiswa, kemudian liga 1 dan 2, serta program lainnya yang dikoordinasikan bersama federasi internasional," kata Bambang.

Ketua Badan Tim Nasional Esport, Ibnu Riza, menambahkan, pelatnas

"Pada tahap kedua, 17-30 April itu kita akan fokus kepada mental dan fisik, karena nanti di Vietnam sana, pengalaman saya mengikuti SEA Games 2019 di Manila, di mana kita mendapat dua perak itu aspek mental dan fisik itu jauh lebih penting, karena di sana kita akan terkuras energi dan emosinya," kata Manajer Timnas, Erlangga Putra.

"Jadi, saya minta kepada 66 atlet yang terpilih itu mentalnya benar-benar dijaga, karena ini untuk Merah Putih bangsa Indonesia," pungkasnya. ●



MOTOGP MERIAHKAN WISATA LOMBOK

Ajang balap motor MotoGP di Sirkuit Mandalika, kawasan Kuta, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat tentu saja terkait dengan pariwisata. Jadi, mengiringi lomba pacu MotoGP, destinasi wisata di sekitarnya akan ikut ramai oleh pengunjung. Ada gala dinner juga rupanya.

Sirkuit Mandalikanya saja sudah menjadi objek wisata. Dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Circuit, arena ini merupakan sirkuit Internasional Indonesia yang bakal menjadi tuan rumah balap MotoGP. Sirkuit Mandalika dibangun di Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sirkuit ini memiliki panjang total 4,31 km dengan 17 tikungan, serta memiliki kapasitas penonton mencapai 196.700 orang. Mandalika International Circuit ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 12 November 2021 lalu, dan akan menggelar balap MotoGP pada 20 Maret 2022.

Sejauh ini minat menyaksikan langsung MotoGP Mandalika yang juga perdana digelar ini terlihat dari

penjualan tiket yang disediakan penyelenggara. Dari tiga hari digelarnya agenda MotoGP Mandalika, tiket hari ketiga atau Race Day menjadi yang paling laris manis.

Meski baru berlangsung tanggal 20 Maret nanti, tapi tiket sudah ludes jauh-jauh hari sebelumnya. Sekadar berbagi info, rentang harga tiket itu berkisar dari yang termurah Rp115.000 untuk menonton sambil berdiri hingga



tempat VIP dengan layanan premium yang tiketnya dibanderol Rp10 juta dan Rp15 juta.

Nah, dari Instagram panitia penyelenggara, @themandalikagp sudah viral informasi bahwa tiket untuk sejumlah zona umum pada hari perlombaan (race day), Minggu 20 Maret 2022 telah habis terjual. "Tiket Race Day tanggal 20 Maret sudah terjual habis," ungkap akun Instagram panitia.

Melihat antusiasme penonton yang banyak mengincar Race Day di zona umum, pihak penyelenggara memutuskan untuk menyediakan kuota tiket tambahan yang juga dalam jumlah terbatas. "Namun atas permintaan yang sangat tinggi kami akan mengeluarkan ekstra kuota tambahan yang jumlahnya sangat terbatas," lanjut keterangan tersebut.

Meski tiket zona umum ludes

terjual, tapi dalam balapan nanti pihak penyelenggara juga telah menyiapkan zona khusus untuk penggemar Marc Marquez ataupun Maverick Vinales berkumpul. Zona khusus itu diberi nama Grandstand J dan Grandstand K dan tiketnya masih tersedia.

Tak jauh berbeda dengan tiket zona khusus, tiket untuk hari pertama dan kedua dengan agenda latihan bebas dan kualifikasi masih tersisa. Menteri BUMN, Erick Thohir yang berpengalaman menggelar event Asian Games 2018, tidak mempermasalahkan penjualan tiket hari pertama dan hari kedua MotoGP Mandalika tidak habis.

Ia menjelaskan, hasil penjualan tiket balapan MotoGP yang lebih laris di race day juga terjadi di negara lain. Jadi, Menteri Erick sangat bersyukur karena tiket race day sudah sold out alias ludes.

Menurut dia, tiket MotoGP Mandalika untuk hari pertama dan kedua ini tidak habis karena adanya covid-19 varian omicron. "Saya meyakini jika pada tahun depan penjualan tiket akan meningkat tiga kali lipat. Saya sampaikan jika ini pada tahun pertama dan MotoGP ini bukan Asian Games ya," ungkapnya saat berkunjung ke Sirkuit Mandalika Jumat, 11 Maret 2022.

Selain soal ticketing, kunjungan langsung ke Mandalika, menurut Erick, untuk memastikan kesiapan titik-titik penayangan media bagi penonton di seluruh dunia. Maksudnya agar mendapatkan sudut pandang dan kualitas terbaik.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah tampak mendampingi Erick Thohir dalam kunjungan kali ini. "Ya, menemani Pak Menteri BUMN Mas Erick Thohir, melihat persiapan



penyelenggaraan MotoGP,” kata Bang Zul sapaannya.

Bang Gubernur juga menyampaikan pemerintah provinsi NTB sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menghadirkan event ini. “Semoga tahun depan penyelenggaraan event ini lebih baik lagi. Sebagaimana disampaikan Pak Erick juga bahwa kami terus meningkatkan animo masyarakat lokal agar ikut serta menonton event ini,” ungkapnya.

Sejauh ini Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan dengan dukungan Kementerian Perhubungan Indonesia telah menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton. Shuttle Bus bergerak dari masing masing simpul transportasi dengan jam operasional yang telah

ditetapkan dan perlu diperhatikan persyaratan bagi masyarakat yang akan menggunakan shuttle bus tersebut.

Syaratnya, memiliki tiket MotoGP, hasil negatif tes antigen bagi yang belum divaksin dua kali dengan biaya Rp. 80.000. Syarat lain, wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama di perjalanan.

Penyediaan bus gratis tersebut untukantisipasi bila ada lonjakan penonton yang diprediksi/ditargetkan mencapai 63 ribu. Sebanyak 278 bus disediakan untuk melayani rute ke pusat kota dan simpul transportasi di luar kawasan sirkuit.

Persiapan lainnya, BUMN PT Angkasa Pura I sudah menyusun skenario operasional dan mitigasi potensi risiko

guna memastikan kelancaran pelaksanaan MotoGP 2022 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan sebanyak 2.592 slot penerbangan telah tersedia di Bandara Internasional Lombok untuk mendukung pelaksanaan MotoGP 2022.

Hingga saat ini, lanjut Faik, sebanyak 609 slot telah terisi dan masih ada sekitar 1.983 slot penerbangan yang tersedia untuk dapat dimaksimalkan oleh maskapai yang ingin mengajukan extra flight.

“Selama periode pelaksanaan event 17-22 Maret 2022, Bandara Internasional Lombok diperkirakan akan melayani hingga 18.800 penumpang per hari, meningkat lima kali lipat jika dibandingkan dengan rata-rata harian selama pandemi yang hanya 3.500 penumpang per hari,” ungkapnya, Minggu, 13 Maret 2022.

Untuk mendukung kelancaran penanganan kedatangan seluruh pebalap, crew, Official Team dan seluruh penonton, Angkasa Pura I menyiapkan sebanyak 260 personel per shift yang terdiri dari pegawai internal seperti Aviation Security, Terminal Service Officer, Customer Service, Facility Care, dan pihak eksternal seperti Petugas Imigrasi, Ground Handling, Bea Cukai, KKP, Panitia MGPA dan Satgas COVID-19.

“Angkasa Pura I bersama seluruh stakeholders terkait berkomitmen untuk bersama-sama memastikan kelancaran operasional dan men-



gantisipasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan perhelatan MotoGP 2022 yang menjadi area operator bandara," ujarnya.

Antara lain, kata Faik, untuk menghadapi kemungkinan terjadinya over capacity. "Bahkan cuaca buruk yang menyebabkan pesawat tidak dapat mendarat dan lainnya," sambungnya.

Adapun konsep mitigasi tersebut adalah "One Day Trip" dalam Triangle Area Bandara Internasional Lombok - Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali-Bandara Juanda Surabaya yang mencakup berbagai upaya mitigasi seperti seamless operating hours yang beroperasi 24 jam di waktu pelaksanaan event.

Selain itu juga akan dilakukan reposisi parkir pesawat apabila terjadi over capacity pada konfigurasi parkir pesawat di apron Bandara Internasional Lombok. Kapasitas apron yang tersedia di Bandara Internasional Lombok dapat menampung hingga 24 pesawat dengan konfigurasi 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat wide body.

Sedangkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dapat menampung 31 pesawat dengan konfigurasi 20 pesawat small body, 18 pesawat narrow body dan 4 pesawat wide body dan Bandara Juanda Surabaya dapat menampung 27 pesawat dengan konfigurasi 16 pesawat small body, 8 pesawat narrow body dan tiga pesawat wide body.

Faik mengatakan, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Juanda Surabaya juga akan berfungsi sebagai alternate aerodrome, jika Bandara Internasional Lombok tidak beroperasi akibat cuaca buruk atau hal-hal yang berpotensi menghalangi landas pacu. "Angkasa Pura I akan berkoordinasi dengan pihak maskapai jika dibutuhkan penambahan jumlah pesawat, fleet management, rotasi pesawat, kesiapan operator ground handling yang melayani rute-rute triangle tersebut," ucapnya.

Selain itu, Faik juga mengatakan Angkasa Pura I bersama dengan Kementerian Perhubungan RI juga menyediakan fasilitas shuttle bus gratis di Bandara Internasional Lom-

bok. Sebanyak 31 bus dengan total kapasitas 925 seat disiapkan untuk mendukung mobilitas pengguna jasa yang ingin menyaksikan MotoGP 2022 di Mandalika.

"Melalui berbagai upaya yang kami lakukan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan kelancaran perhelatan event internasional MotoGP 2022 serta mendukung keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kesehatan bagi seluruh pengguna jasa yang akan datang ke Lombok," ujarnya.

Masih terkait dengan event MotoGP di Mandalika PT Hotel Indonesia Natour (HIN) melalui anak usaha PT Hotel Indonesia Group (HIG) akan menggelar Gala Dinner Khas Lom-

Indonesia. "Upaya penyiapan hunian alternatif bagi penonton MotoGP yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat membantu mengatasi kebutuhan akomodasi, dan semoga event MotoGP yang merupakan event internasional akan mengangkat dan membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia pasca pandemi," kata Iswandi Minggu, 13 Maret 2022.

Ia menambahkan, HIG menyambut kegiatan MotoGP dengan memberikan layanan khusus kepada tamu yang berkunjung ke Mandalika untuk menyaksikan event besar MotoGP yang akan berlangsung pada 18-20 Maret 2022 ini. "Gala Dinner ini konsepnya unik dan berbeda, dengan



bok di Pinggir Pantai Senggigi. Hotel Merumatta di Lombok, salah satu jaringan Hotel Indonesia Group, akan mengadakan Gala Dinner yang berlangsung setiap hari mulai tanggal 17 hingga 21 Maret 2022.

Bekerja sama dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat, Dinas Pariwisata NTB dan dinas terkait, HIN pun menggandeng desa wisata yang tersebar di seluruh wilayah Mandalika dan sekitarnya seperti Desa Setanggor, Kampung Wisata Mandalika dan lain sebagainya menjadi hunian alternatif yang menarik bagi penggemar dan penonton MotoGP.

Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour, Iswandi Said menyampaikan, perhelatan MotoGP Mandalika akan menjadi event bersejarah bagi

suasana di pinggir pantai Senggigi yang indah diiringi live music, sedangkan para tamu dapat menikmati hidangan makanan khas Lombok," lanjut Iswandi.

Di samping mendukung penyiapan akomodasi di Mandalika, Mataram dan sekitarnya; HIN sebagai anggota Holding BUMN Pariwisata Indonesia (Injourney) berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam menyiapkan perumahan warga menjadi hunian alternatif bagi para penonton MotoGP mengingat ketersediaan hunian hotel berbintang mendekati fully-booked.

Jadi jelas Mandalika dan Lombok bakal ramai. Bukan oleh balap motor saja, melainkan pariwisata secara keseluruhan juga. ●

KE LOMBOK BUKAN MOTOGP SAJA

Mandalika hanya satu pilihan. Banyak destinasi wisata tersedia di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Selain event tahunan MotoGP, Lombok memang kaya destinasi wisata. Nah, di sekitar sirkuit itu, tersedia sejumlah lokasi layak singgah untuk menikmati panorama dan kearifan lokal. Berikut gambarannya:

Pantai Kuta Mandalika

Walaupun namanya Pantai Kuta, sama seperti di Bali, lokasinya jelas berada di Lombok. Dari sirkuit Mandalika, menuju lokasi ini memerlukan

waktu tak sampai setengah jam. Pantai Kuta Lombok di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menawarkan pemandangan indah, air laut yang jernih, hingga tempat bermain anak.

Pantai Pink

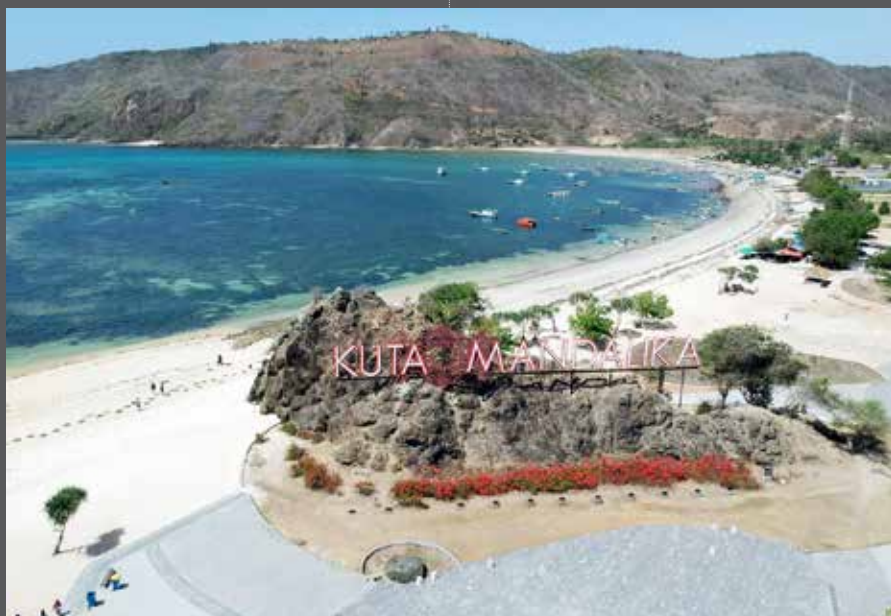
Pantai Tangsi atau dikenal sebagai Pantai Pink ini seperti namanya, menawarkan keindahan pasir merah muda berpadu dengan jernihnya air laut yang tenang. Warna pink di pantai ini

berasal dari serpihan karang dan biota laut lain yang terbawa arus ke daratan.

Karena memiliki ombak yang tenang, pantai cantik ini menawarkan snorkeling sebagai aktivitas utamanya. Wisatawan bakal dimanjakan dengan beraneka ragam koral dan spesies ikan.

Bukit Merese

Bukit ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk mencapai puncaknya, jika berhasil mendaki bukit ini, kita dapat menikmati pemandangan sirkuit dari kejauhan sekaligus alam sekitar yang menakjubkan. Sekadar



saran, untuk mendaki bukit sebaiknya memilih saat matahari terbit alias sunrise.

Pantai Tanjung Bongo

Destinasi wisata yang berada di Kabupaten Lombok Tengah ini punya pesona yang tak kalah menarik dibandingkan dengan pantai lain yang lebih dulu terkenal.

Pantai Tanjung Bongo terletak di balik Bukit Merese ini masih bersih dan terbelang sepi pengunjung. Ketika air laut surut, pantai ini akan membentuk sebuah kolam kecil seperti jacuzzi alami yang bisa digunakan untuk berendam ataupun berenang.

Pantai Aan

Pantai Aan yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia ini memiliki air laut yang jernih berwarna kebiruan. Warnanya seakan kontras dengan pasir putih yang terhampar dilengkapi ombak tenang yang memi-

kat hati wisatawan.

Salah satu kawasan pantai di Lombok ini menjadi incaran pengunjung terutama bagi yang hobi berenang, menyelam, ataupun sekadar berfoto sambil menikmati suasana laut yang tenang.

Pantai Setangi

Tak hanya Pantai Kuta, Sirkuit Mandalika juga dekat dengan Pantai Setangi. Pantai ini ditumbuhi dengan banyak pohon kelapa, memiliki garis pantai yang lumayan panjang, dan air laut yang bersih nan jernih. Lokasinya beralamat di Jalan Raya Senggigi, Malaka, Pemenang, Kab. Lombok Utara.

Taman Wisata Pusuk Sembalun

Jika ingin menjauhi pantai, Mandalika juga menawarkan wisata di Taman Pusuk Sembalun. Taman Pusuk Sembalun menawarkan pemandangan alam yang beragam, Kita juga bisa melihat Gunung Rinjani langsung dari tempat ini. Selain itu, Taman Pusuk Sembalun juga terdapat spot-spot lain yang layak muat di Instagram, Instagramable.

Air Terjun Mangku Sakti Batuan

Air Terjun Mangku Sakti Batuan merupakan salah satu air terjun yang

diketahui oleh wisatawan, padahal sudah menyandang predikat yang terindah di Pulau Lombok. Bahkan di perjalanan menuju air terjun ini, Anda sudah disuguhkan pemandangan mempesona hamparan padang rumput di jalur menuju tempat wisata tersebut.

Pantai Seger

Sedikit bergeser ke timur dari Mandalika Beach, Anda bisa menemukan satu lagi destinasi wisata pantai yang tak kalah memukau, yakni Pantai Seger. Wisata yang menjadi salah satu andalan Mandalika ini lokasinya berada di Desa Sukadane, Kecamatan Pujut.

Uniknya, Pantai Seger menyimpan legenda mengenai Putri Mandalika dari Kerajaan Lombok. Masyarakat Sasak percaya bahwa pantai ini menjadi tempat Putri Mandalika menenggelamkan diri.

O ya, melihat kilas balik sejarah nama Mandalika, kisahnya terkait legenda setempat, tentang seorang putri yang sangat cantik bernama Mandalika. Putri Mandalika menjadi incaran banyak pemuda, namun tak satu pun dapat menjerat hatinya. Karena tidak ada satu pun lamaran yang diterimanya, Putri Mandalika memilih melompat ke laut dari sebuah bukit.

Putri Mandalika yang menceburkan diri ke laut dipercayai oleh masyarakat sekitar menjelma menjadi sosok cacing laut yang dinamakan Nyale. Nah, pada waktu-waktu tertentu, cacing nyale muncul ke permukaan laut hingga pantai. Hal ini terjadi setiap setahun sekali. Hari-hari kemunculan cacing nyale ini pun kini menjadi momen yang ditunggu oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Biasanya Februari atau Maret Nyale muncul dan warga setempat turun ke pantai menangkapnya.

Itulah beberapa destinasi wisata di sekitar sirkuit Mandalika. Namun, tetap hati-hati dan ketat menerapkan prokes. Untuk menghindari kerumunan atau berkunjung dengan rombongan terbatas, pilih mobil yang lapang di perjalanan: Multi-Purpose Vehicle (MPV) atau Sport Utility Vehicle (SUV). •



berada di bawah kaki Gunung Rinjani. Sepanjang sungainya dipenuhi dengan berbagai jenis bebatuan yang indah dan unik.

Selain pantai dan taman, ternyata pulau Lombok juga terdapat air terjun yang terletak di kaki Gunung Rinjani. Air terjun ini bernama Mangku Sakti Batuan. Air terjun ini memiliki keunikan, dimana airnya berwarna hijau toska yang diakibatkan oleh kandungan belerang.

Air terjun ini masih sedikit



PESOHOR TERSERET KASUS CRAZY RICH

Ternyata polisi menjerat Indra dan Doni dengan sangkaan penipuan melalui aplikasi trading. Jika Indra Kenz terkait aplikasi Binomo, Doni Salmanan melalui Quotex.

Yang melaporkan Indra adalah Maru Nazara. Pelapor awalnya melaporkan Indra ke Polda Metro Jaya, namun pelaporan itu ditarik penyidik Bareskrim Polri dengan nomor laporan B/0058/II tertanggal 3 Februari 2002 tentang dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media elektronik. Pada hari yang sama, Doni Salmanan dilaporkan oleh RA pada 3 Februari 2022 lalu ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Intinya, para pelapor merasa dibohongi seakan melalui trading di jaringan internet dapat menjadi kaya seperti crazy rich Medan dan Bandung itu. Alhasil, pelaporan itu menjadi perkara hukum.



Nah, dalam proses hukum, polisi ternyata mengungkap ada uang dan barang dari kedua crazy rich itu mengalir ke sejumlah pesohor. Beberapa antaranya sudah menerima panggilan polisi untuk memberikan keterangan. Namun, ada juga yang belum terungkap. Berikut beberapa pesohor yang sudah menjadi pemberitaan media lantaran terseret kasus kedua crazy rich asal Medan dan Bandung itu.

Kakak beradik Fuji Utami dan Fadly Faisal termasuk pesohor yang diberitakan menerima aliran uang dari Indra Kenz. Kakak beradik itu rupanya pernah terkait bareng Indra Kenz dan Vanessa Khong. Dalam sebuah video yang beredar, Fuji dan Fadly menerima uang senilai Rp10 juta lantaran menjadi pemenang dalam permainan yang dibuat keduanya. "Indra Kenz Sultan Medan mau bagi-bagi duit. Ada 1.000 dolar Singapura atau satunya ini Rp10 juta ya. Pokoknya kita (main) tebak-tebakan untuk mereka," ujar Indra Kenz dalam video TikTok-nya



Dua anak muda berjuduk Crazy Rich, orang kaya yang boros dan suka pamer, kini menjadi tahanan kepolisian. Keduanya Indra Kesuma alias Indra Kenz yang dikenal Crazy Rich Medan, Sumatera Utara dan Doni Salmanan Crazy Rich Bandung, Jawa Barat.





yang diunggah pada 10 Januari 2022.

Malah pesohor Deddy Corbuzier juga sempat menerima aliran uang dari Indra Kenz. Mantan suami Kalina Oktarani itu pernah menerima uang senilai Rp150 juta dari Crazy Rich Medan itu. Ternyata uang itu tidak masuk ke kantong pribadi Deddy Corbuzier, tapi menjadi hadiah pertandingan catur antara Dewa Kipas dan GM Irene yang berlangsung Maret 2021. Kabarnya bila uang tersebut memang dipermasalahkan, Deddy Corbuzier pun akan menagihnya ke Dewa Kipas agar mengembalikan uang tersebut.

Selain Deddy, pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar juga terkait dengan Crazy Rich itu. Mereka diberitakan mendapatkan saweran dari Doni Salmanan sebagai hadiah resepsi pernikahan berupa uang dolar berbalut amplop cokelat. Momen pembukaan amplopnnya pun diabadikan dalam kanal YouTube mereka, hanya saja Billar dan Lesti tidak menyebutkan secara gamblang jumlah nominal uang dollar tersebut.

Doni datang kondangan dan memberikan amplop tebal kepada Rizky Billar. Ketika isi amplop diintip bersama Lesti Kejora, mereka berdua kaget hingga berebutan. "Lo lihat kan nikahan gue kemarin kan apa maharnya dolar bro, ini juga dolar, bro," ucap Rizky Billar.

Selanjutnya Rizky Febian. Pada 2021 lalu, Doni Salmanan sempat

mengaku iseng menang lelang sebuah produk minuman yang diadakan oleh anak komedian Sule itu. Konon uang itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tak tanggung-tanggung, Doni memenangi lelang dengan tawaran Rp400 juta. Rizky Febian tercatat sudah memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada Rabu, 16 Maret 2022.

Rizky Febian sendiri mengunggah perihal minuman racikannya di media sosial. Kala itu, Rizky meminta pengikutnya memberikan harga untuk minuman tersebut.

Rizky menyebut minuman itu ada yang menawar hingga Rp20 juta. Namun tawaran itu kalah dari Doni Salmanan yang mendadak datang dan mematok harga Rp400 juta.

Bahkan Doni langsung mentransfer yang tersebut. Rizky Febian mengaku sampai gemetar mendapatkan transferan tersebut dan menyebut uang itu akan digunakan untuk membantu orang lain.

Pesohor lainnya yang terkait kasus trading online dua crazy rich itu adalah Reza Arap Oktavian. Pada pertengahan 2021 lalu, Doni Salmanan membuat heboh lantaran memberikan saweran sebesar Rp1 miliar kepada Reza Arap. Kala itu, sang Youtuber sedang melakukan streaming game online Ragnarok.

Aksi Doni Salmanan menyawer Reza Arap hingga Rp1 miliar sempat



viral pada Juli 2021. Kala itu, Reza tengah bermain gim daring sembari live YouTube. Kemudian, Doni yang menyaksikan live tersebut menyawer Reza Arap sejumlah uang hingga total berjumlah Rp1 miliar.

Reza Arap kaget mendapatkan saweran tersebut. Ia mengungkapkan di media sosial bahwa semula saweran Doni Rp400 juta, dan terus bertambah hingga Rp1 miliar. "Aku dapat donasi dari pria bernama Doni Salmanan Rp 400 juta hanya dalam 15 menit siaran langsung," tulis Reza Arap dalam Twitter miliknya.

Kemudian Youtuber Arief Muhammad. Sejumlah media memberitakan Doni Salmanan pernah membeli mobil mewah berjenis Porsche milik Arief seharga Rp4 miliar. Momen itu diabadikan dalam kanal YouTube Doni. Dalam proses transaksi pembelian mobil sport yang akan dihadiahkan kepada istrinya itu, Doni bahkan tak melakukan negosiasi harga.

Arief Muhammad menegaskan tidak ada unsur yang mengharuskan dia mengembalikan uang. Dia dan Doni Salmanan saat itu melakukan akad jual beli bukan diberi uang secara cuma-cuma. "Unsurnya nggak ada yang masuk untuk balikin uang, karena kami akadnya jual beli. Wujud barangnya ada.

Masih banyak yang penasaran, apakah ada pesohor lain yang ikut terseret. Kita tunggu saja pada saatnya. •



Gejolak Minyak Goreng

ANTREAN HINGGA DESAKAN MENTERI PERDAGANGAN MUNDUR

Di berbagai titik pelosok Tanah Air terjadi antrean minyak goreng. Memang ironi, negeri penghasil minyak mentah sawit (crude palm oil, CPO) terbesar di dunia mengalami kelangkaan minyak goreng.

Salah satu antrean terpanjang terjadi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Warga mengular hingga lebih dari satu kilometer demi mendapatkan minyak goreng pada operasi pasar yang digelar Pemerintah Kabupaten Lahat di Gelanggang Olahraga (GOR) Bukit Telunjuk pada Rabu, 9 Maret 2022.

Toh tetap banyak warga yang tidak

kebagian. Maka terjadilah saling dorong antarpengantre. Begitu kuat saling dorong itu hingga pagar GOR hampir rubuh.

Malah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, antrean minyak goreng memicu Sandra, 41, meregang nyawa. Ibu lima anak ini semula terjatuh pingasan ketika berkerumun di depan sebuah minimarket di Jalan Kampung Cina RT 05 Kelurahan Teluk Bayur Ke-



camatan Teluk Bayur, Berau, Sabtu, 12 Maret 2022.

"Setelah jatuh, warga berusaha menolong. Namun meninggal saat menuju rumah sakit," ungkap Kapolsek Teluk Bayur AKP Kasiyono.

Kisah-kisah antrean dramatis itu boleh jadi akan semakin banyak jika kelangkaan minyak goreng dan harganya tetap membumbung. Sudah lebih dari enam bulan negeri produsen terbesar CPO sedunia ini mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.

Tanda-tanda kelangkaan minyak goreng sebenarnya sudah terendus setidaknya sejak Oktober 2021. Memang ironi, negeri penghasil minyak mentah sawit (crude palm oil, CPO) ter-

besar di dunia mengalami kelangkaan minyak goreng.

Pada Oktober 2021 lalu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) sudah berteriak bahwa harga minyak goreng di tingkat eceran terus merangkak. Naik. Kala itu harganya sudah menyentuh Rp 19.000-Rp 20.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi (HET) berkisar Rp 12.000-Rp 13.000.

Hukum pasar, penawaran dan permintaan berlaku. Ketika permintaan melonjak, sementara pasokan tetap, apalagi langka, maka harga akan melasat.

Nah, harga CPO sejak tahun lalu memang melonjak. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menjelas-

kan harga minyak goreng ini memang sangat tergantung pada bahan baku Crude Palm Oil (CPO), yang saat ini juga melonjak harganya.

"CPO naik karena terjadi gangguan pasokan dunia untuk bahan baku nabati," kata Oke, Sabtu 13 November 2021. Menurut dia, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

Antara lain, gangguan panen dari Kanada dan Argentina sebagai pemasok minyak Canola terbesar. Tercatat paling tidak produksinya turun sekitar tujuh persen sehingga pasokan dunia terganggu.

Untuk CPO, produksi Malaysia turun sekitar delapan persen karena kekurangan tenaga kerja imbas pandemi. Ini juga menjadi salah satu pendorong kenaikan harga.

Oke melanjutkan, krisis energi pada beberapa negara seperti India, China, Eropa sehingga mengalihkan ke bio-energy, termasuk biodiesel. Sehingga konsumsi bahan bakar dari minyak sawit itu melonjak, menumbuhkan permintaan yang besar.

"Biaya logistik tinggi akibat pandemi karena penurunan frekuensi pelayaran, yang membuat space kapal angkut terbatas juga berdampak pada kelangkaan kontainer internasional," katanya.

Senada dengan itu, pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengungkapkan, kenaikan harga minyak goreng disebabkan adanya kekurangan pasokan akan minyak nabati (oils) dan minyak hewani (fats) di pasar global.

"Pandemi ini membuat suasana lapangan produksi semua serba tak jelas. Produksi minyak nabati dan minyak hewani semua menurun dibandingkan dengan produksi di tahun sebelum adanya pandemi. Intinya, seperti hukum ekonomi, di mana antara supply dan demand terjadi kepincangan maka pasokan dunia sangat berkurang," ujar Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Senin 25 Oktober 2021.

Ia mengatakan produksi minyak nabati dan hewani telah menurun sebanyak 266.000 ton pada 2020. Penurunan produksi tersebut juga terjadi

pada 2021.

Selain itu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan adanya kenaikan harga minyak sawit atau CPO Indonesia. Saat ini kata Sahat, harga CPO di Indonesia masih berbasis harga CPO CiF Rotterdam. Dia menilai, apabila harga CiF Rotterdam mengalami kenaikan, maka harga CPO lokal juga naik.

Sahat juga menjelaskan, saat ini industri penghasil minyak goreng di Indonesia tidak punya hubungan usaha dengan perkebunan sawit. Oleh sebab

pemerintah sudah melakukan upaya mitigasi permasalahan harga minyak goreng. Dengan cara memastikan stok dalam negeri saat ini 628 ribu ton cukup untuk jangka waktu 1,5 bulan. "Jangan sampai CPO diekspor semua," katanya.

Pihaknya juga melakukan pemba-hasan penyediaan minyak goreng dengan kemasan sederhana, secara marathon dibahas dengan pelaku usaha. Minimal untuk mengamankan sampai Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Namun, tahun berganti, harga min-

2,5 atau sekitar Rp 8.500 per kilogram untuk kemasan sederhana.

Puan berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat karena harus mampu menstabilkan harga pangan sehingga beban rakyat akan terbantu. Dia menyoroti tingginya harga minyak goreng, sehingga disarankan agar pemerintah menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata.

Sedangkan sebelumnya, pada akhir Oktober 2021, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) me-



Ketua DPR RI Puan Maharani

itu, menurut dia, harga jual yang dipasarkan oleh industri penghasil minyak goreng sama dengan harga CPO yang sudah ditambahkan dengan biaya olah, biaya kemasan, dan biaya ongkos angkut.

"Dengan demikian harga jual mereka juga sesuai dengan kondisi lapangan; dan kini para produsen minyak goreng sudah tidak bisa lagi mengikuti harga patokan yang ditetapkan oleh regulator," ungkap Sahat.

Sedangkan Dirjen Oke menegaskan

yak goreng malah kian melambung. Di awal tahun, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mengendalikan harga minyak goreng.

"Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan," kata Puan, Minggu, 9 Januari 2022. Dia mencontohkan negara tetangga Malaysia dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik yaitu menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM

15.600 per liter. meminta HET minyak goreng kemasan sederhana dinaikkan lantaran lonjakan harga CPO global serta peningkatan biaya produksi. GIMNI meminta HET minyak goreng itu dapat naik menjadi Rp 15.600 per liter.

Dalam Konferensi Minyak Sawit Indonesia ke-17 dan Tinjauan Harga 2022, Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan harga CPO dunia berkisar 1.000 dollar AS per ton hingga 1.250 dollar AS per ton.

Alhasil, Kementerian Perdagangan sebagai regulator menaikkan HET minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen dari Rp 11.000 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Perubahan ini menyesuaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO dunia yang diperkirakan masih tetap tinggi pada tahun ini.

Dirjen Oke Nurwan mengatakan, HET itu akan berlaku permanen untuk menggantikan HET sebelumnya. Menurut dia, penentuan HET lama mengacu pada harga CPO global yang waktu itu di kisaran 600 dollar AS per ton. "HET lama perlu diubah karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang," kata Oke.

Toh di mata anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, sudah enam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tapi belum satupun berhasil memberikan solusi yang dituntut rakyat. Yaitu minyak goreng murah apapun jenis kemasannya dan stoknya banyak.

Kebijakan itu antara lain, penetapan HET untuk minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Kemudian kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter di ritel modern, kemudian kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak goreng.

"Faktanya di lapangan masih ada pembatasan stok, dari distribusi ke agen, dari agen ke ritel. Nah kenapa sampai ada pembatasan pasokan?" kata Yeka dalam konferensi pers virtual, Selasa, 22 Februari 2022.

Yeka menambahkan, pengusaha dan pedagang minyak goreng kini melihat peluang, akan ada kebijakan baru lainnya dari pemerintah. Pasalnya, sudah ada enam regulasi tadi tapi belum ada yang berhasil. Sehingga sangat mungkin akan ada perubahan aturan lagi," tambahnya.

Benar saja, di awal Maret 2022, kebijakan DMO yang semula 20 persen dikabarkan akan naik menjadi 30 persen. Namun, dampak terhadap gejolak minyak goreng di dalam negeri belum terlihat. Malah eksportir terdengar menyuarakan keberatan.

Seiring dengan itu, sayup-sayup mulai terdengar desakan agar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meletakkan jabatan. Alasannya, tak sanggup mengatasi gejolak minyak goreng.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Political and Public Policy

minyak goreng dan mereka menguasai 46,5 persen pasar," ucapnya Sabtu, 12 Maret 2022.

Sebelumnya, Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer mengaku ada kesengajaan sehingga gejolak minyak goreng ini berlanjut. "Ini mainan



Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer



Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie

Studies, Jerry Massie. "Memang controlling pemerintah sangat lemah san kinerja Lufti ini sangat dan amat buruk. Paling mudah mengatsi itu pemerintah langsung turun jangan lagi ke penyalur atau agen atau bentuk tim satgas minyak goreng. Yang saya bingung kinerja Kemendag. Memang ada 4 perusahaan besar sebagai produsen

kartel CPO lah. Mereka sengaja mengatur harga. Sudah jelas Presiden minta harga turun, ini kok malah jadi langka," kata Noel, Senin, 14 Februari 2022.

Noel melanjutkan, fakta ini jelas memperlihatkan kegagalan Mendag Lutfi mengelola harga minyak goreng. Apakah ada yang antre mejadi penggantinya? •



HOLDING BUMN PANGAN IKUT KELIMPUNGAN

Minyak goreng langka dan mahal harganya, holding BUMN pangan ID Food pun ikut turun tangan mengatasinya. Hasilnya bagaimana?

Jelas kelimpungan. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan hanya sekitar 10 persen permintaan yang dipenuhi holding BUMN pangan. Mereka mencatat mengajukan permohonan pasokan migor sebanyak 30 kali, tapi yang dipenuhi hanya 2-3 kali.

"Kami inginnya, saat kesulitan (pasokan migor) di pasar dan mengadu ke kami, langsung dikirim (migor oleh Holding Pangan). Ini (kenyataannya) tidak," kata Ketua Umum APPSI Sudaryono dalam konferensi pers virtual, Kamis, 10 Maret 2022.

Padahal Kementerian Perdagangan mengklaim telah menyalurkan 415,78 ton minyak goreng (migor) dari

pasokan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) ke pasar tradisional melalui holding BUMN pangan. Nyatanya, pedagang di pasar tradisional mengatakan permintaan mereka tak mendapat respons dari holding BUMN pangan.

Nah, Sudaryono APPSI mengatakan anggotanya tersebar di 16.000 pasar yang menampung 16 juta pedagang pasar. Dia mencatat hanya sekitar 1.600 pasar yang menerima pasokan minyak goreng dari holding BUMN pangan.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarjowan mengatakan menjajaki kerja sama dengan BUMN holding pangan, PT Rajawali



Nusantara Indonesia (RNI) untuk mengirimkan langsung migor curah ke pasar. Namun, proses kerja sama belum berjalan karena terhambat kesepakatan pembayaran.

RNI mengajukan pembayaran langsung dilakukan saat pedagang pasar menerima migor curah. Sedangkan, pedagang pasar meminta pembayaran pertama setelah RNI mengirimkan migor curah kloter kedua, atau lebih dikenal dengan sistem 2-1.

Ikappi meminta RNI agar dapat melonggarkan waktu pembayaran. Pada saat yang bersamaan, Ikappi berdiskusi dengan para pedagang pasar untuk dapat berkompromi dengan sistem pembayaran yang diajukan RNI. "Maka, kami harapkan ada kelonggaran yang diberikan pemerintah (untuk mediasi hal ini). Minimal ada kelonggaran minyak goreng masuk pasar dan stabilitas harga terjadi," kata Reynaldi.

Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang sebelumnya menjabat CEO Id Food menanggapi kesulitan pedagang usai

kunjungan ke Pasar Kebayoran Lama, Rabu, 9 Maret 2022. "Himbara (Himpunan Bank Negara) ini harusnya bisa memfasilitasi pedagang-pedagang yang sudah (menjadi agen) seperti ini. Kalau seperti ini (agen pasar tradisional), NPL (non-performing loan)-nya tidak akan tinggi," kata dia.

Arief menilai bank yang sesuai untuk memfasilitasi skema pembiayaan di pasar tradisional adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Menurut dia, fasilitas yang bisa digunakan adalah supply chain financing.

Saat berkunjung ke Pasar Kebayoran Lama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkomitmen untuk menjual 30 ton migor curah ke Toko Bumi Makmur seharga Rp 11.700 per Kg. Namun demikian, Leo harus memastikan pedagang pasar akan menjual migor curah tersebut dengan harga Rp 12.800 per Kg.

"Dari pada (distribusi langsung migor pemerintah ke Pasar Kebayoran Lama) saingan sama ini (Toko Bumi Makmur), mendingan jual ke sini 30 ton per hari,"

kata Lutfi.

Sedangkan Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food berkomitmen terus melakukan pendistribusian minyak goreng untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit yang berlaku sejak 1 Februari 2022. Upaya tersebut dilakukan melalui pemerataan pendistribusian minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Komersial ID Food Frans M Tambunan mengatakan, sejak awal Januari 2022 ID Food telah berperan aktif menjalankan pendistribusian minyak goreng ke sejumlah titik di wilayah Indonesia sebagai upaya pengendalian harga.

Frans bilang, sampai dengan 10 Maret 2022, ID Food telah mendistribusikan minyak goreng sebanyak 8,1 juta liter, yang terdiri dari 6,4 juta liter minyak goreng curah, 1,6 juta liter minyak

goreng kemasan, dan 27 ribu liter minyak goreng jerigen. Jumlah tersebut didistribusikan ke 402 titik di seluruh Indonesia, yang tersebar di provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.

"Seiring perkembangan harga minyak goreng yang masih fluktuatif, kegiatan pendistribusian minyak goreng akan terus dilakukan ID Food ke pasar-pasar rakyat dengan mengandalkan cabang perdagangan dan logistik ID Food Group yang tersebar di seluruh Indonesia," ungkapnya Jumat, 11 Maret 2022.

Lebih lanjut Frans mengatakan, lini bisnis distribusi dan logistik ID Food yang dimotori PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Rajawali Nusindo menjadi ujung tombak dalam skema pendistribusian minyak goreng ke para pedagang dan konsumen. Pendistribusian dilakukan dengan menerjunkan armada truk tangki minyak goreng langsung ke pasar-pasar tradisional. Pihaknya memilih untuk langsung turun ke pasar

guna memastikan minyak goreng disalurkan kepada pihak yang tepat, dalam hal ini pedagang dan konsumen akhir.

"Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah memastikan minyak goreng didistribusikan kepada pihak yang tepat, salah satunya dengan cara turun langsung ke pasar tradisional dan membatasi jumlah pembelian," paparnya.

Menurut Frans, untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar dan tepat sasaran, berbagai langkah mitigasi dan persiapan telah dilakukan. Salah satunya menjalin kolaborasi dengan menggandeng berbagai pihak dari mulai supplier, pelaku usaha, pengelola pasar, serta otoritas keamanan setempat.

"Kolaborasi yang baik dengan instansi dan lembaga terkait serta berbagai pelaku usaha mulai dari private sector dan UMKM menjadi kunci untuk memperlancar alur distribusi sehingga mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng," ujarnya.

Ia berharap, pendistribusian yang akan terus dilakukan secara masif dalam beberapa hari ke depan tersebut dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai

Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk Indonesia Timur, ID Food tercatat mendistribusikan sebanyak 13.200 minyak goreng kemasan premium (ukuran 1 liter) ke Papua. "Minyak goreng dikirim melalui transportasi pesawat Hercules dan didistribusikan melalui Rajawali Nusindo member of ID Food Cabang Sorong kepada Pedagang lokal di Papua," kata Frans.

Ia menambahkan, pendistribusian minyak goreng kemasan premium ini merupakan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang serta Apical Group. Kemudian pendistribusian ini akan dibarengi dengan sosialisasi kepada Pedagang lokal di Papua agar harga jualnya sesuai harga ketetapan Pemerintah yakni sebesar Rp 14.000 per liter.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menambahkan, minyak goreng masih menjadi fokus pembahasan pemerintah dalam ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan serta harga pangan.

"Kami terus berkoordinasi dengan BUMN Pangan, Kementerian Perdagangan sebagai stakeholders Badan Pangan Nasional dalam pendistribusian minyak goreng ke



masyarakat," papar Arief.

Ia mengatakan, Badan Pangan Nasional akan berkolaborasi dengan ID Food dan PTPN (BUMN Perkebunan) dalam menyalurkan minyak goreng lanjutan melalui ketersediaan olein dengan target 6 juta liter curah per bulan. "Pemerintah akan mengatur distribusinya, kolaborasi berbagai pihak termasuk BUMN dan Private sektor," terang Arief.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk menjaga ekosistem dan rantai pasok pangan dengan baik, perusahaan-perusahaan pelat merah harus ikut serta membantu dengan segala kemampuan dan menjadi solusi.

Sedangkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, Holding BUMN Pangan ID Food akan membantu pemerintah mendorong pemerataan distribusi minyak goreng di seluruh Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat berjalan mengingat saat ini pasokan minyak goreng sudah cukup melimpah.

"Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai stok meskipun rantai distribusi minyak goreng belum berjalan

normal," ujarnya.

Toh, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, akan terus memantau ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai HET. Mendag akan menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan harga bergejolak di tengah surplusnya pasokan daerah.

Menanggapi kondisi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, Menteri BUMN Erick Thohir berpendapat, hal ini merupakan peran tugas dan tanggung jawab BUMN. Di mana BUMN tak hanya menjalankan fungsi korporasi, tetapi juga wajib melayani masyarakat dengan baik.

Menteri Erick meyakini, perlu kolaborasi antara Pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengurai kondisi ini. Ia pun mengajak perusahaan swasta dan pelaku usaha minyak goreng yang memiliki kapasitas produksi lebih tinggi untuk membantu agar dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

Merespon kondisi terkini, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menggelar rapat koordinasi Badan Pangan Nasional bersama sejumlah

lembaga dan pelaku usaha. Dalam rapat tersebut membahas dan disepakati diantaranya pencantuman label harga pada kemasan minyak goreng. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah spekulasi kenaikan harga jual yang dapat merugikan masyarakat. Ia mengatakan, dengan langkah ini diharapkan masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan HET.

Untuk mengatasi situasi ini, Arief mengatakan, semua pihak yang berkepentingan, khususnya para pelaku usaha minyak goreng perlu duduk bersama menyamakan semangat untuk memberikan service level yang baik kepada masyarakat.

Arief juga menegaskan, menjelang persiapan Ramadhan, Badan Pangan Nasional menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga pangan meliputi minyak goreng. "Hal ini merupakan penugasan Presiden kepada Badan Pangan Nasional agar dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan Beberapa komoditas pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2022," kata Arief.

Kita lihat hingga 2 Mei 2022, hitung-hitungan Idul Fitri tiba. Semoga tak ada lagi yang kelimpungan. ●





Peringatan FAO

WASPADA TERIGU (DAN PUPUK) JUGA

Badan pangan dunia di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, Food and Agricultural Organization (FAO) memperingatkan akan terganggunya rantai pasok dan gangguan logistik yang berdampak buruk terhadap ketahanan pangan global. Penyebabnya, selain wabah Covid-19, perkembangan krisis Rusia-Ukraina menambah tantangan itu.

Maka Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu yang berasal dari Tiongkok mengemukakan, selama dua tahun terakhir, Covid-19 telah menghadirkan banyak tantangan bagi ketahanan pangan global. "Sekarang, apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina menambah tantangan signifikan lainnya," kata Dongyu, Jumat, 11 Maret 2022.

Ia menjelaskan, Rusia dan Ukraina memainkan peran penting dalam produksi dan pasokan pangan global. Rusia adalah pengeksport gandum terbesar di dunia, dan Ukraina adalah yang terbesar kelima. Bersama-sama, mereka menyediakan 19 persen pasokan jelai (barley) dunia, 14 persen gandum, dan empat persen jagung, yang merupakan lebih dari sepertiga ekspor sereal (biji-bijian) global. Mereka juga merupakan pemasok utama rapeed dan menguasai 52 persen pasar ekspor minyak bunga matahari dunia. Pasokan pupuk global juga sangat terkonsentrasi, dengan Rusia sebagai produsen utama.

Rantai pasokan dan gangguan logistik pada produksi biji-bijian dan minyak biji-bijian Ukraina dan Rusia serta pembatasan ekspor Rusia, kata Dongyu, akan sangat berdampak pada ketahanan pangan. "Hal ini terutama berlaku untuk sekitar lima puluh negara yang bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk 30 persen atau lebih pasokan gandum mereka. Banyak dari mereka adalah negara kurang berkembang atau berpenghasilan rendah, negara-negara defisit pangan di Afrika Utara, Asia dan Timur Dekat. Banyak negara Eropa dan Asia Tengah bergantung pada Rusia untuk lebih dari 50 persen pasokan pupuk mereka, dan kekurangan di sana dapat berlanjut hingga tahun depan," ungkap Dongyu.

Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk daftar bergantung pasokan gandum bahan baku terigu itu. Utamanya dari Ukraina. Data FAO mengungkapkan, hingga 2021 lalu hampir 30 persen pasok gandum Indonesia berasal dari Ukraina, negara produsen gandum penting

sebagaimana terlihat pada lambang negaranya yang berwarna biru langit dan rona keemasan ladang gandum siap panen.

Sedangkan data Komisi Perdagangan PBB (UN Comtrade) mengungkapkan, impor terbesar Indonesia dari Ukraina pada 2020 adalah biji-bijian (sereal) dengan nilai 710,42 juta dolar. Setara dengan sekitar Rp10,18 triliun.

Jadi, peringatan Dirjen Dongyu mengisyaratkan akan terjadinya gangguan pasok dan logistik gandum yang mencakup Indonesia juga. Itu berarti harga terigu di dalam negeri kemungkinan akan naik.

Nah, jika kecamuk krisis Rusia-Ukraina berlama-lama, sangat boleh jadi harga tepung terigu dan produk hilirnya, mulai dari panganan seperti gorengan dan aneka kue, juga mie instan, akan terpengaruh. Pastinya bukan turun. Sementara Indonesia yang mayoritas warganya muslim ini akan memasuki Ramadan pada April 2022 dan Idul Fitri pada awal Mei tahun ini.

Tanpa krisis Rusia-Ukraina pun, kata Dongyu, harga pangan yang sudah

meningkat sejak paruh kedua tahun 2020, mencapai titik tertinggi, rekor sepanjang sejarah, pada Februari 2022 karena tingginya permintaan, biaya input dan transportasi, serta gangguan pelabuhan. Harga global gandum dan jelai, misalnya, naik 31 persen selama tahun 2021. Harga minyak lobak dan minyak bunga matahari naik lebih dari 60 persen.

Permintaan yang tinggi dan harga gas alam yang fluktuatif juga telah mendorong kenaikan biaya pupuk. Misalnya, kata Dongyu, harga urea, pupuk nitrogen utama, telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam 12 bulan terakhir.

"Intensitas dan durasi konflik masih belum pasti. Kemungkinan gangguan terhadap kegiatan pertanian dari dua eksportir utama komoditas pokok ini dapat secara serius meningkatkan kerawanan pangan secara global, ketika harga pangan dan input internasional sudah tinggi dan tidak stabil," ujar Dongyu.

Sebagai rekomendasi kebijakan, Dongyu menyarankan agar perdagangan pangan dan pupuk global tetap terbuka. Setiap upaya, kata dia, harus dilakukan untuk melindungi kegiatan produksi dan pemasaran yang diperlukan untuk memenuhi permintaan domestik dan global. Rantai pasokan harus terus bergerak, yang berarti melindungi tanaman tegakan, ternak, infrastruktur pemrosesan makanan, dan semua sistem logistik.

Saran lain, hindari reaksi kebijakan ad hoc. "Sebelum memberlakukan tindakan apa pun untuk mengamankan pasokan makanan, pemerintah harus mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap pasar internasional. Pengurangan tarif impor atau penggunaan pembatasan ekspor dapat membantu menyelesaikan tantangan ketahanan pangan masing-masing negara dalam jangka pendek, tetapi hal itu akan menaikkan harga di pasar global," tandasnya.

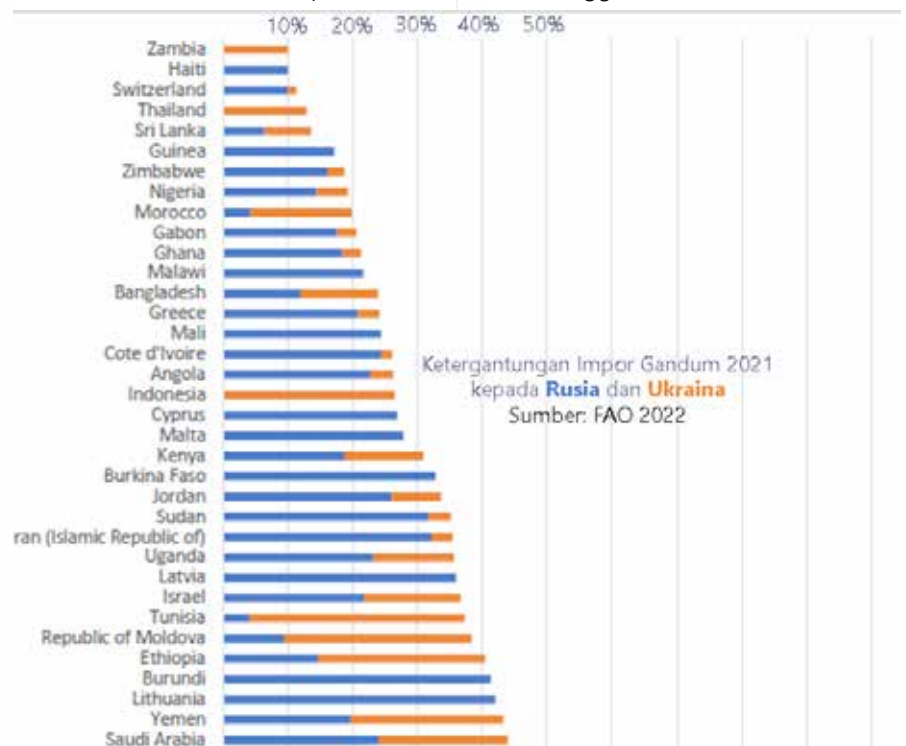
Untuk saran kebijakan itu, Indonesia memang menghadapi dilema. Soal minyak goreng dan bahan baku minyak mentah sawit (crude palm oil, CPO) misalnya. Keduanya tak tertahankan untuk mengalir ke pasar ekspor yang menawarkan rekor harga tertinggi. Se-

mentara Menteri Perdagangan M Lutfi ingin menerapkan jaminan pasok lokal (domestic market obligation DMO) hingga 30 persen. Harap maklum CPO yang sebelum Covid-19 hanya harganya berkisar 600 dolar AS per ton, per Maret 2022 sudah mencapai sekitar

kan konsumen atau tidak.

"Saya belum bisa bilang begitu (memastikan). Tidak tahu masih bisa dijalankan per 1 April atau tidak?" ungkap Neil, Selasa, 8 Maret 2022.

Sedangkan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah,



dua kali lipatnya.

Untuk pangan impor, muncul usulan agar penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% mulai 1 April 2022 ditunda dulu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, lembaganya masih mengkaji penerapan PPN 11% tersebut, juga terkait efeknya yang akan memberat-

setuju jika pemerintah agar menunda implementasi kenaikan tarif PPN menjadi pertengahan kuartal II/2022. "Buat saya it's okay kenaikan tarif PPN ditunda sampai kita melihat kondisi perekonomian terkini yang lebih objektif. Hemat saya PPN baru diterapkan pada mid kuartal II/2022 atau sesudah Lebaran," kata Said, Jumat, 11 Maret 2022.

Jadi, apa hendak dikata? Kita akan mengalaminya bersama-sama. •

KRISIS

Gunawan Effendi

Krisis Rusia-Ukraina menjadi bukti bahwa perang di Abad XXI melampaui pengertian sederhana tentang pertempuran dan kemenangan. Bukti itu sudah tampak sejak Perang Dingin usai berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, pertengahan Abad XX.

Istilah Perang Dingin digunakan karena tidak ada pertempuran besar-besaran secara langsung antara kedua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta sekutu masing-masing. Namun, kedua negara besar itu berada di balik konflik regional besar yang dikenal sebagai perang proksi. Konflik tersebut didasarkan pada perjuangan ideologis dan geopolitik untuk pengaruh global oleh kedua negara adidaya ini, menyusul aliansi sementara dan kemenangan mereka melawan Nazi Jerman pada 1945. Selain melalui persaingan pengembangan persenjataan nuklir dan pengerahan militer konvensional, upaya menjadi yang paling dominan berlangsung melalui perang psikologis, kampanye propaganda, spionase, embargo yang meluas, persaingan di acara olahraga dan kompetisi teknologi seperti perlombaan luar angkasa.

Dalam konteks itu, negara dengan kemampuan riset dan pengembangan teknologi yang inovatif memerlukan banyak biaya. Motif ekonomi untuk menjamin pertahanan dengan pasokan energi, pangan, dan karena itu juga air, semakin menonjol dan berimplikasi luas: Keterlibatan swasta terutama di bidang teknologi dalam potensi dan kecamuk konflik. Yang paling menjadi perhitungan adalah negara-negara yang memiliki kekuatan teknologi nuklir.

Ekonom kawakan seperti Nouriel Roubini sulit menghindari kerumitan analisis itu dengan melihat krisis Rusia-Ukraina sebagai eskalasi besar Perang Dingin II, dengan empat kekuatan revisionis – Tiongkok, Rusia, Iran, dan Korea Utara – menantang dominasi global lama Amerika Serikat dan tatanan internasional yang dipimpin Barat yang diciptakannya setelah Perang Dunia II. Empat kekuatan revisionis itu seperti juga AS memiliki potensi teknologi nuklir yang jelas.

Sebenarnya bukan krisis Rusia-Ukraina saja yang menja-

di bukti. Ahli pertahanan di King's College London, Warren Chin, menyebut juga Laut Cina Selatan.

Krisis Rusia-Ukraina terkait dengan pasokan gas Rusia ke Eropa. Lantas ada apa dengan Laut Cina Selatan? Ya pangan dan energi juga urusannya.

Indonesia jelas berkepentingan langsung di kawasan Laut Cina Selatan. Di bidang pangan, soal kerawanan penjagaan kawasan penangkapan ikan timbul-tenggelam namun belum bekesudahan. Tiongkok tercatat sebagai negara penangkap ikan terbanyak di dunia. Indonesia nomor dua.

Sedangkan di bidang energi, akhir tahun lalu tersiar kabar Tiongkok meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di Laut Natuna Utara yang Cina

klaim bagian wilayah Sembilan Garis Putus-putus atau Nine Dash Line di Laut Cina Selatan. Harap maklum, Natuna memiliki cadangan minyak sebesar 135,17 juta barel dan cadangan gas sebesar 1,26 triliun kaki kubik, terutama di blok East Natuna.

Pada sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral mengisyaratkan Indonesia bakal menghadapi defisit gas pada 2022 sebesar 667 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd), setelah surplus gas pada 2020 dan 2021 terus menyusut. Defisit tersebut terus meningkat hingga 4.021 juta standar kaki kubik. Hal itu terjadi karena pasokan gas pada 2030 hanya mencapai 1.406 mmscfd atau cuma 24,6 persen dari total pasokan gas pada 2021 yang masih 5.709 mmscfd. Proyeksi ini mengasumsikan produksi yang sedang berjalan, tanpa ada pasokan atau investasi baru.

Nah, Tiongkok juga dikabarkan melayangkan protes terhadap latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar berbasis di darat, dengan upacara pembukaan di Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Agustus 2021. Latihan kali ini yang melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, sebenarnya sudah berlangsung rutin sejak 2009.

Jadi, Ukraina dan Natuna memang berjauhan. Namun, tetap ada kemiripan, juga dalam konteks potensi eskalasi krisisnya. ●



nfo indonesia

www.infoindonesia.id

Network



INFO PASANG
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Koran Cetak Info Indonesia



 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



INOVASI UNTUK NEGERI
nfo indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #18 MARET 2022

**EKONOMI
MANDEG
MENDING
PECAT
MENDAG**



Rp75.000,-